



Drs. ZULKIFLI AS, M.Si
WALIKOTA DUMAI

EKO SUHARJO, SE
WAKIL WALIKOTA DUMAI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2021

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

**“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial
Melalui Penguatan Sektor Kesehatan, Sosial Dan Ekonomi
Untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Dumai Yang Makmur Dan Madani”**

PRIORITAS RKPD TAHUN 2021

PRIORITAS I

Pemantapan
pelayanan air bersih
dan infrastruktur dasar

PRIORITAS II

SDM yang berdaya saing
serta pemantapan
implementasi nilai-nilai
budaya dan keagamaan

PRIORITAS III

Pemantapan ekonomi
daerah dan
pengentasan kemiskinan

PRIORITAS IV

Pemantapan pelayanan
publik

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2020



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 2 Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD yang disusun sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2021.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2021

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2021.
- (4) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2021.
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR 33 SERI E

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021. RKPD Kota Dumai Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menetapkan 4 (Empat) Prioritas Daerah dan dengan tema pembangunan Tahun 2021 ***“Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui penguatan sektor kesehatan, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani”***. Kemudian Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 sebagai penjabaran tahun Kelima periode Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen Perangkat Daerah dan Stakeholder dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2021. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2016 – 2021 nantinya.

Akhirnya, Kami berharap semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-16
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
b. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
c. Topografi	II-2
d. Geologi	II-3
e. Hidrologi	II-3
f. Klimatologi	II-4
g. Demografi	II-5
1. Kependudukan	II-5
2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk	II-6
3. Struktur Penduduk	II-7
a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-7
b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-8
h. Wilayah Rawan Bencana	II-10
i. Potensi Pengembangan Wilayah	II-12
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-13
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-13
1. Perkembangan PDRB	II-13
2. Pendapatan Perkapita	II-22
3. Tingkat Kemiskinan	II-23
4. Distribusi Pendapatan	II-27
5. Inflasi	II-28
6. Produktivitas Total Daerah	II-30
7. Kondisi IPM Kota Dumai	II-30
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-37
A. Pendidikan	II-32
1. Angka Melek Huruf	II-32
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-33
3. Angka Usia Harapan Hidup	II-35
B. Kesehatan	II-36
1. Persentase Balita Gizi Buruk	II-36
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-52
A. Seni Budaya	II-38
B. Olah Raga	II-42
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-43
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-43
A. Pendidikan	II-43
1. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SD /MI dan SMP/Mts	II-43

2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/Mts	II-45
3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs	II-46
4. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs	II-47
5. Angka pendidikan yang ditamatkan	II-48
6. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	II-50
7. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik	II-50
8. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik	II-50
9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	II-51
10. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK	II-52
11. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	II-53
12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	II-54
13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-55
B. Kesehatan	II-56
1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	II-57
2. Rasio Dokter per Satuan Penduduk	II-58
3. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk	II-59
4. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	II-62
5. Angka kelangsungan hidup bayi	II-63
6. Angka Kematian Balita	II-63
7. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	II-64
8. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	II-65
9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	II-66
10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-67
11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II-69
12. Cakupan Kunjungan Bayi	II-71
13. Cakupan Puskesmas	II-72
14. Cakupan Puskesmas Pembantu	II-75
15. Akses Pelayanan Kesehatan	II-76
16. Penyakit Menular dan Tidak Menular	II-77
17. Indikator SPM Kesehatan	II-79
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-79
Persentase rumah tinggal bersanitasi	II-80
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)	II-80
2. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)	II-81
3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	II-82
4. Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat	II-84
5. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB	II-84
D. Perumahan dan Pemukiman	II-85
1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-85
2. Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-87
3. Persentase Luas Permukiman yang Tertat	II-87
4. Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Rasio Bangunan ber-IMB	II-89
5. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	II-89
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-90
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000	II-90

	Penduduk	
	2. Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	II-91
	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	II-91
	4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	II-92
	5. Persentase Penegakan PERDA	II-92
	6. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	II-92
	7. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	II-93
	8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota	II-93
	9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	II-93
	10. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	II-94
	11. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	II-94
	12. Resiko Bencana Kebakaran Permukiman	II-94
F.	Sosial	II-96
	1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-96
	a. Persentase PMKS yang Tertangani	II-96
	b. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	II-97
	c. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	II-98
	2. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	II-98
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-98
A.	Urusan Ketenagakerjaan	II-98
	1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-98
	2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	II-98
	3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	II-98
	4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-99
	5. Pencari Kerja yang Ditempatkan	II-99
	6. Jumlah Pengangguran Terbuka	II-100
	7. Keselamatan dan Perlindungan	II-101
	8. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	II-101
B.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-102
	1. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	II-102
	2. Rasio KDRT	II-102
	3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	II-102
	4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-103
	5. Pengarus Utamaan Gender	II-103
	6. Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II-104
C.	Pangan	II-105
	1. Ketersediaan Pangan Utama	II-105
	2. Jumlah Alih Fungsi Lahan	II-107
D.	Urusan Pertanahan	II-107
E.	Urusan Lingkungan Hidup	II-112
	1. Persentase Penanganan Sampah	II-112
	2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per	II-112

	Satuan Penduduk	
	3. Peningkatan Suhu Udara dan Kualitas Udara di Kota Dumai	II-113
	4. Kualitas Air Tanah	II-115
	5. Penyediaan Sumber Air Baku	II-116
	6. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai	II-116
F.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-119
	1. Kepemilikan KTP	II-119
	2. Ketersediaan DataBase Kependudukan Skala Provinsi	II-119
	3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	II-120
G.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-120
H.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-121
	1. Cakupan Peserta KB Aktif	II-121
	2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-121
I.	Urusan Perhubungan	II-122
	1. Jumlah Arus Penumpang Umum	II-122
	2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	II-123
	3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	II-123
	4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum	II-124
	5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	II-124
	6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	II-124
	7. Pemasangan Rambu-rambu	II-125
J.	Urusan Komunikasi dan Informatika	II-125
	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi	II-125
	2. Website Milik Pemerintah Daerah	II-127
K.	Urusaan Koperasi Usaha dan Menengah	II-127
	1. Koperasi Aktif	II-127
	2. Usaha Mikro dan Kecil	II-127
L.	Penanaman Modal	II-129
	1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA	II-129
	2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	II-130
	3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II-130
	4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	II-131
M.	Kepemudaan dan OlahRaga	II-131
	1. Jumlah Organisasi Pemuda	II-131
	2. Jumlah Organisasi Olahraga	II-131
	3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	II-132
	4. Jumlah Kegiatan Olahraga	II-132
	5. Lapangan Olahraga	II-133
N.	Statistik	II-133
O.	Kebudayaan	II-133
	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-133
P.	Perpustakaan	II-134
	1. Jumlah Perpustakaan	II-134
	2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	II-134
	3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	II-135
	4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	II-135
Q.	Kearsipan	II-136
2.1.3.3	Fokus Urusan Layanan Pilihan	II-136
A.	Pariwisata	II-136
	1. Kunjungan Wisata	II-136

	B. Pertanian	II-137
	1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	II-137
	2. Luas Areal Perkebunan	II-138
	3. Populasi Ternak Unggulan	II-139
	4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	II-139
	C. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-140
	1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB	II-140
	D. Kelautan dan Perikanan	II-140
	1. Produksi Perikanan Laut	II-140
	2. Produksi Perikanan Budidaya	II-141
	E. Perdagangan	II-142
	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	II-142
	2. Ekspor Bersih	II-142
	F. Perindustrian	II-143
	1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB	II-143
	2. Pertumbuhan Industri	II-143
2.1.3.4	Fokus Urusan Penunjang	II-145
	A. Perencanaan Pembangunan	II-145
	B. Administrasi Pemerintahan	II-145
	C. Urusan Pengawasan	II-147
	D. Urusan Keuangan	II-148
	E. Urusan Kepegawaian	II-149
2.1.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-151
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-151
	A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-151
	1. Pengeluaran per Kapita	II-151
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-152
	A. Perhubungan	II-152
	1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II-152
	2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	II-153
	B. Penataan Ruang	II-153
	C. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-154
	1. Jumlah Penginapan / Hotel	II-154
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-154
	A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-154
	1. Angka Kriminalitas	II-154
	2. Lama Proses Perijinan	II-155
	3. Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	II-158
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-159
	A. Ketenagakerjaan	II-159
	1. Persentase Lulusan S1/S2/S3	II-159
	2. Rasio Ketergantungan	II-160
	3. Rasio Penduduk yang Bekerja	II-160
2.2	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2019 dan REALISASI RPJMD Tahun ke 4	II-166
2.2.1	Evaluasi Kinerja Tahun 2019	II-166
2.2.2	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	II-171
2.3	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-172

2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-172
	a. Aspek Geografi dan Demografi	II-173
	b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-173
	c. Aspek Pelayanan Umum	II-175
	d. Aspek Daya Saing Daerah	II-176
	1. Bidang Tenaga Kerja	II-176
	2. Bidang Ekonomi dan Iklim Investasi	II-178
	3. Bidang Sosial Budaya	II-179
	e. Isu Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sustainable <i>development goals (SDG's) Tahun 2019</i>	II-182
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-193
	A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-193
	B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-198
	C. Urusan Pilihan	II-205
	D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	II-208
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Telaahan Kebijakan Nasional Yang Terkait Dengan Kota Dumai	III-1
3.2	Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai	III-3
3.3	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-6
	3.3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2021	III-10
	3.3.2 Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum	III-25
	3.3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-26
3.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-29
	3.4.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan	III-30
	3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-39
	3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-52
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021		IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-1
	4.1.1 Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	IV-1
	4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-2
	4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-9
	4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021	IV-12
	4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2021	IV-12
	4.1.6 Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2021 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021	IV-13
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021	IV-16
4.3	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Target 2021 Terhadap Prioritas Rkpd Tahun 2021	IV-39
4.4	Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals (SDG'S)</i> Target 2021 Ke Dalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-40
4.5	Antisipasi Pemulihan Pembangunan Pasca Pandemi COVID-19	IV-41
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021		V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		VI-1
BAB VII PENUTUP		VII-1
LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDP SAMPAI TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD KOTA DUMAI 2016-2021		
LAMPIRAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021		
LAMPIRAN III PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		
LAMPIRAN IV SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) TAHUN 2021		

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1. 1	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021	I -8
------------	--	------

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai	II -4
Tabel 2.2	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2019	II -5
Tabel 2.3	Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2020	II -5
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -6
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2012-2019 Menurut Kecamatan	II -6
Tabel 2.6	Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -7
Tabel 2.7	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -8
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2019	II -8
Tabel 2.9	Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai tahun 2019	II -11
Tabel 2.10	Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai	II -11
Tabel 2.11	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2019	II -14
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -15
Tabel 2.13	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019	II -18
Tabel 2.14	Kontribusi Sektoral PDRB 2014-2019	II -19
Tabel 2.15	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -20
Tabel 2.16	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -21
Tabel 2.17	Hasil Analisis Tipologi Kelas Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -22
Tabel 2.18	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -23
Tabel 2.19	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -23
Tabel 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -27
Tabel 2.21	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2015-2018 Kota Dumai vs Provinsi Riau	II -29
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -31
Tabel 2.23	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019	II -31
Tabel 2.24	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2019	II -32
Tabel 2.25	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	II -37
Tabel 2.26	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar	II -39
Tabel 2.27	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -39
Tabel 2.28	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -40
Tabel 2.29	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -40
Tabel 2.30	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -40
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2019	II -41
Tabel 2.32	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau	II -41
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga	II -42
Tabel 2.34	Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau	II -42
Tabel 2.35	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -44
Tabel 2.36	Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2018	II -45
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -45
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 201-2019	II -47
Tabel 2.39	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -49
Tabel 2.40	Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2019	II -50
Tabel 2.41	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2019	II -51
Tabel 2.42	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013 - 2019	II -51
Tabel 2.43	Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -53
Tabel 2.44	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -54
Tabel 2.45	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -55
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -55
Tabel 2.47	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai	II -55
Tabel 2.48	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2012-2019	II -57
Tabel 2.49	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019	II -58
Tabel 2.50	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -59
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai	II -60
Tabel 2.52	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2019	II -69
Tabel 2.53	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2019	II -73
Tabel 2.54	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -73
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019	II -74

Tabel 2.56	Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2019	II -74
Tabel 2.57	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai	II -75
Tabel 2.58	Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019	II -79
Tabel 2.59	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -80
Tabel 2.60	Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2018 dan 2019 per Kecamatan	II -81
Tabel 2.61	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2019	II -81
Tabel 2.62	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -83
Tabel 2.63	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -84
Tabel 2.64	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -85
Tabel 2.65	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai	II -87
Tabel 2.66	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai	II -88
Tabel 2.67	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2019	II -89
Tabel 2.68	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016-2019	II -90
Tabel 2.69	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -91
Tabel 2.70	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -91
Tabel 2.71	Persentase Peningkatan Pos Sskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -92
Tabel 2.72	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai	II -93
Tabel 2.73	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai	II -93
Tabel 2.74	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai	II -93
Tabel 2.75	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai	II -94
Tabel 2.76	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai	II -94
Tabel 2.77	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai	II -94
Tabel 2.78	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -95
Tabel 2.79	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -99
Tabel 2.80	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019	II -100
Tabel 2.81	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -100
Tabel 2.82	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2018 dan 2019	II -100
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020	II -101
Tabel 2.84	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019	II -102
Tabel 2.85	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -102
Tabel 2.86	Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016	II -103
Tabel 2.87	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012-2019	II -103
Tabel 2.88	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -105
Tabel 2.89	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -105
Tabel 2.90	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2019	II -106
Tabel 2.91	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai	II -107
Tabel 2.92	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017	II -107
Tabel 2.93	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani	II -109
Tabel 2.94	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan	II -112
Tabel 2.95	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -112
Tabel 2.96	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -113
Tabel 2.97	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -114
Tabel 2.98	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2019	II -114
Tabel 2.99	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2018-2019	II -115
Tabel 2.100	Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur	II -115
Tabel 2.101	Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2018-2019	II -117
Tabel 2.102	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai	II -117
Tabel 2.103	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2018-2019	II -118
Tabel 2.104	Kepemilikan KTP Tahun 2012-2019	II -119
Tabel 2.105	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2012-2019	II -120
Tabel 2.106	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2012-2019	II -120
Tabel 2.107	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -120
Tabel 2.108	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2013-2018	II -121
Tabel 2.109	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai	II -122
Tabel 2.110	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -122
Tabel 2.111	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -123
Tabel 2.112	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012-2019	II -123

Tabel 2.113	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -124
Tabel 2.114	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -124
Tabel 2.115	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2012-2019	II -125
Tabel 2.116	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2019	II -125
Tabel 2.117	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai	II -127
Tabel 2.118	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2019	II -128
Tabel 2.119	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2019	II -128
Tabel 2.120	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2019	II -128
Tabel 2.121	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2017 - 2019	II -128
Tabel 2.122	Jumlah Perusahaan FMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -129
Tabel 2.123	Nilai Investasi FMDN dan PMA di Kota Dumai 2013-2019	II -130
Tabel 2.124	Persentase Nilai Realisasi FMDN dan PMA Kota Dumai	II -131
Tabel 2.125	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -131
Tabel 2.126	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -132
Tabel 2.127	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012-2019	II -132
Tabel 2.128	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -132
Tabel 2.129	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -133
Tabel 2.130	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai	II -133
Tabel 2.131	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2019	II -134
Tabel 2.132	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2012-2019	II -135
Tabel 2.133	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2019	II -136
Tabel 2.134	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -137
Tabel 2.135	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok	II -138
Tabel 2.136	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2019	II -138
Tabel 2.137	Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019	II -139
Tabel 2.138	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -140
Tabel 2.139	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -140
Tabel 2.140	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -141
Tabel 2.141	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2011-2018	II -142
Tabel 2.142	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -143
Tabel 2.143	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2011-2018	II -143
Tabel 2.144	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2012-2018	II -143
Tabel 2.145	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai	II -144
Tabel 2.146	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2019	II -147
Tabel 2.147	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -148
Tabel 2.148	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2019	II -150
Tabel 2.149	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2012-2019	II -150
Tabel 2.150	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -151
Tabel 2.151	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai	II -151
Tabel 2.152	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai	II -152
Tabel 2.153	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -153
Tabel 2.154	Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2014-2018	II -154
Tabel 2.155	Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2012-2019	II -155
Tabel 2.156	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	II -155
Tabel 2.157	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai	II -156
Tabel 2.158	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2012-2018	II -160
Tabel 2.159	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -160
Tabel 2.160	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai	II -161
Tabel 2.161	Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran	II -168
Tabel 2.162	Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)	II -171
Tabel 2.163	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	II -184
Tabel 2.164	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II -185
Tabel 2.165	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II -186
Tabel 2.166	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia	II -189
Tabel 2.167	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	II -190
Tabel 2.168	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	II -191
Tabel 2.169	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	II -191

Tabel 2.170	Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	II -192
Tabel 2.171	Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	II -192
Tabel 2.172	Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	II -192
BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH		
Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2014-2018 dan tipologi wilayah	III – 15
Tabel 3.2	IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan April 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)	III – 16
Tabel 3.3	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019	III – 18
Tabel 3.4	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2019	III – 19
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 s.d 2022	III – 31
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2018 s.d 2021	III – 41
Tabel 3.7	Rekap Perbandingan Belanja Langsung Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2021	III – 42
Tabel 3.8	Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021	III – 45
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2017 - 2021	III – 54
BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021		
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	IV - 10
Tabel 4.2	Perbandingan Prioritas Tahun 2020 dan 2021	IV - 16
Tabel 4.3	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021	IV - 17
Tabel 4.4	Snkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2021 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021	IV - 20
Tabel 4.5	Snkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021	IV - 22
Tabel 4.6	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021	IV - 26
Tabel 4.7	Snkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2021	IV - 27
Tabel 4.8	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2021	IV - 38
Tabel 4.9	Snkronisasi SPM Tahun 2021 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV - 39
Tabel 4.10	Snkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2021	IV - 40
Tabel 4.11	Skenario Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Pasca Pandemi COVID-19 Untuk RKPD 2021	IV - 48
BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021		
Tabel 5.1	Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2020	V - 1
Tabel 5.2	Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021	V - 14
Tabel 5.3	Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Pemerintah Kota Dumai	V - 24
Tabel 5.4	Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai, Prioritas Provinsi Riau Tahun 2021	V - 24
Tabel 5.5	Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai dan Prioritas Nasional Tahun 2021	V - 24
BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai	VI - 1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020	VI - 4
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama	VI - 9

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Diagram Alir Penyusunan RKPd	I -1
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan RKPd	I -7
Gambar 1.3	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	I -7

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Kota Dumai	II -2
Gambar 2.2	Diagram Pie kemiringan Lereng Kota Dumai	II -3
Gambar 2.3	Piramida penduduk Kota Dumai Tahun 2019	II -11
Gambar 2.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 Kota Dumai Terhadap Provinsi Riau	II -16
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai 2014-2019	II -20
Gambar 2.7	Struktur Perekonomian regional antar kabupaten/kota se-Riau 2019	II -21
Gambar 2.8	Perkembangan angka kemiskinan kota Dumai Tahun 2014-2019	II -24
Gambar 2.9	Perkembangan angka kemiskinan tahun 2014-2019 kota Dumai dan Provinsi Riau	II -25
Gambar 2.10	Persentase penduduk miskin tahun 2014-2019	II -26
Gambar 2.11	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -27
Gambar 2.12	Kurva indeks gini Kota Dumai Tahun 2013-2018	II -28
Gambar 2.13	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau	II -29
Gambar 2.14	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2019	II -32
Gambar 2.15	Angka Melek huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -33
Gambar 2.16	Angka Rata-rata lama sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2019	II -34
Gambar 2.17	Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2018	II -35
Gambar 2.18	Perkembangan angka harapan hidup kota Dumai Tahun 2010-2019	II -36
Gambar 2.19	Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -47
Gambar 2.20	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2013-2019	II -48
Gambar 2.21	Persentase Ruang Kelas SD di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2019	II -50
Gambar 2.22	Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2019	II -51
Gambar 2.23	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -52
Gambar 2.24	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -53
Gambar 2.25	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2019	II -54
Gambar 2.26	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -55
Gambar 2.27	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai	II -56
Gambar 2.28	Guru bersertifikasi tahun 2012-2018	II -56
Gambar 2.29	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2018	II -57
Gambar 2.30	Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019	II -58
Gambar 2.31	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -59
Gambar 2.32	Angka Pravelensi Balita dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari tahun 2014-2019	II -61
Gambar 2.33	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai tahun 2010-2019	II -62
Gambar 2.34	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2010 - 2019	II -63
Gambar 2.35	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2019	II -65
Gambar 2.41	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai	II -67
Gambar 2.42	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	II -70
Gambar 2.43	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -71
Gambar 2.44	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai	II -72
Gambar 2.45	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -80
Gambar 2.46	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019	II -82
Gambar 2.47	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai	II -83
Gambar 2.48	Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -84
Gambar 2.49	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai	II -85
Gambar 2.50	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -86
Gambar 2.51	Jumlah Pelanggan Kota Dumai	II -87
Gambar 2.52	Jumlah Kawasan Kumuh	II -89

Gambar 2.53	Rumah Layak Huni	II -89
Gambar 2.54	Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	II -90
Gambar 2.55	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -105
Gambar 2.56	Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017	II -107
Gambar 2.57	Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -134
Gambar 2.58	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2011-2019	II -135
Gambar 2.59	Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2013-2019	II -137
Gambar 2.60	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2012-2019	II-141
Gambar 2.61	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai	II-142
Gambar 2.62	Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -152
	Fokus <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	II- 183
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEJANGAN DAERAH		
Gambar 2.1	Peta Sebaran Kasus COVID-19 Kota Dumai	III-8
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Kota Dumai	III-13
Gambar 2.3	Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2019	III-14
Gambar 2.4	IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2011-2019	III-19
Gambar 2.5	Perkembangan IPM kota dumai berdasarkan AHH, HLS dan Pengeluaran Perkapita	III- 20
Gambar 2.6	Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018	III- 21
Gambar 2.7	Perbandingan indeks Gini Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2014-2018	III- 22
Gambar 2.8	Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2015-2019	III- 23
Gambar 2.9	Kondisi perbandingan Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2015-2019	III- 23
Gambar 2.10	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional dan Propinsi Riau Tahun 2017-2019	III- 24
Gambar 2.11	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2019	III- 25
Gambar 2.12	Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021	III- 45



BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKPD
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 tahun ke-5. Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2021 ini sudah mengacu kepada dua peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Dumai Tahun 2021 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, rancangan akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2021, RKP Tahun 2021, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis melalui penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para dengan pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Konsultasi publik, Forum perangkat daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Proses politis dilakukan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih kedalam perencanaan pembangunan daerah

yang dibahas bersama DPRD, sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi

Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Kota Dumai, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia khususnya Kota Dumai juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, pariwisata dan sektor informal yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024;
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Dumai Tahun 2021 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, rancangan akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2021, RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

RKPD Kota Dumai Tahun 2021 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun kelima pada perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun kelima pada tahun 2021 yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah ***Pemantapan Sistem, Sarana, Potensi Dan Sumber Daya Pendukung Untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Dumai Yang Makmur Dan Madani*** Kemudian berkenaan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), khususnya yang terjadi di Indonesia, maka Tema Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2021 mengalami penyesuaian menjadi ***”Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui penguatan sektor kesehatan, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Kota***

Dumai yang makmur dan madani.. Namun Berkenaan dengan wabah Covid-19 maka Pemerintah Kota Dumai melakukan perubahan arah Kebijakan umum untuk tahun 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19. Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2021 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2021 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2021.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan RKPD
 Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 1.3 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
 Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-2 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 dengan tema **Memantapkan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata Yang Mendorong Perdagangan dan Jasa Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi**. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021 adalah (1). Pengembangan Industri; (2). Pengembangan Pertanian; (3). Pengembangan Pariwisata; (4). Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan (5). Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing. Sebagai akibat dari wabah Covid-19, Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyesuaian terhadap tema pembangunan daerah sebagai antisipasi dampak Covid-19 ini untuk tahun 2021. Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021.

Adapun sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 1.1. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1. Pengembangan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan • Meningkatnya Investasi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi Hasil Industri 2. Memperbaiki Iklim dan Promosi Investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri 2. Program Kerjasama, Fasilitasi, dan Pengembangan Perwilayahan Industri 1. Program Peningkatan Investasi (trilyun) 2. Program Penyelenggaraan Perizinan
2. Pengembangan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian 2. Program Peningkatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	Pendapatan		Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 	2. Menjamin Distribusi, Keamanan dan Kualitas Bahan Pangan	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Angka Kesmiskinan dan Pengangguran 	3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin	1. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Pemberdayaan Sosial 6. Program Penanganan Fakir Miskin
3. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau dan mendapatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan 	1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kunjungan wisatawan Mancanegara • Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan Mancanegara • Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata 3. Meningkatkan Promosi dan Kelembagaan Pariwisata 4. Mengembangkan Ekonomi Kreatif Secara Terpadu 5. Meningkatkan Peran BUMDES Dalam Pengelolaan Usaha Desa 6. Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja 7. Meningkatkan Kompetensi dan Wirausaha Muda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Program Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata 1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 1. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga di Desa 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan
4. Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Transportasi • Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman • Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik Bagi Rumah Tangga • Meningkatnya Infarastruktur Pengelolaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan Jalan dan Jembatan 2. Mengembangkan Sistem Jaringan Transportasi Yang Terintegrasi 3. Memantapkan Pelabuhan 4. Menngkatkan Ketersediaan Airbaku dan Sanitasi yang Berkualitas 5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh 6. Meningkatkan Akses dan Infrastruktur Energi Keseluruh Wilayah 7. Meningkatkan Layanan Irigasi dan Penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Preservasi Jalan dan Jembatan 1. Program Perhubungan Laut 1. Program Perhubungan Darat 2. Program Bina Sistem Transportasi 1. Program Penyelenggaraan Air minum dan Penyehatan Lingkungan 2. Program pengembangan Kegeologian 1. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman 1. Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan 1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>Konservasi Sumberdaya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup • Menurunnya Emisi Gas rumah Kaca 	<p>Abrasi/Banjir</p> <p>8. Memulihkan Kawasan yang Sudah Dalam Kondisi Kritis (Terdegradasi/terce mar) yang Terlantar Secara Terkoordinasi</p> <p>9. Meningkatkan Pengelolaan Pra bencana,Tanggap Bencana dan Pasca Bencana</p> <p>10.Meningkatkan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Ke Aneka Ragaman Hayati (KEHATI) Secara Berkelanjutan</p> <p>11.Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan DAS</p> <p>12.Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Riau</p>	<p>Konservasi Sungai, danau dan Sumberdaya Lainnya</p> <p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>1. Program Pemanfaatan Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>1. Program Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut</p> <p>1. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
5. Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat • Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketersediaan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan Kualitas Pemerataan Tenaga Penduduk 3. Meningkatkan Pendidikan Inklusif bagi penyandang Disabilitas 4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Terutama Masyarakat Miskin Kurang mampu dan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa 5. Menyediakan dan Meningkatkan Mutu Sarana dan prasarana Kesehatan 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 2. Program Bantuan Operasional Sekolah 1. Program Peningkatan Mutu Penduduk dan tenaga Kependidikan 1. Program pendidikan Khusus dan layanan khusus 1. Program Peningkatan Masyarakat 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit 3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4. Program Keluarga Berencana 5. Program Pembiayaan Kesehatan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 2. Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3. Program Pelayanan Kefarmasian dan Akses 4. Program Peningkatan pelayanan Kesehatan 5. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kesetaraan Gender • Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama 	7. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Keolahragaan 8. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran perempuan di Berbagai Bidang Pembangunan 9. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan 10. Meningkatkan Akses Semua Anak Terhadap Pelayanan yang Berkualitas Dalam rangka Mendukung tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup 11. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat 12. Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan sarana Keagamaan	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam pembangunan 1. Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang keagamaan dan Kesejahteraan social 1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sumber: Rancangan akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2021

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021.

3. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan RKP Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun kelima pada RPJMN 2019-2024. RKP Tahun 2021 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya

(pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2019-2024. Tema RKP Tahun 2021 adalah “ **Meningkatkan Industri dan Pariwisata diberbagai Wilayah didukung oleh Investasi** ”. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan program prioritas:
 - i. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - ii. Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
 - iii. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
 - iv. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan;
 - v. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi;
 - vi. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi;
 - vii. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
 - viii. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
- 2) Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan program prioritas:
 - i. Pengembangan Kawasan Strategis;
 - ii. Pengembangan Sektor Unggulan;
 - iii. Pengembangan Kawasan Perkotaan;
 - iv. Pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - v. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi;
 - vi. Kelembagaan dan Keuangan Daerah.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas:
 - i. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan;
 - ii. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

- iii. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - iv. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
 - v. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - vi. Mengentaskan Kemiskinan;
 - vii. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas:
 - i. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - ii. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - iii. Memperkuat Moderasi Beragama;
 - iv. Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
 - 5) Memperkuat Infrastruktur, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar dengan program prioritas:
 - i. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - ii. Infrastruktur Ekonomi;
 - iii. Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan;
 - iv. Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - v. Transformasi Digital.
 - 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan program prioritas:
 - i) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - ii) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - iii) Pembangunan Rendah Karbon;
 - 7) Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik dengan program prioritas:
 - i) Konsolidasi Demokrasi;
 - ii) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - iii) Penegakan Hukum Nasional;
 - iv) Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
 - v) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2021 dan

program strategis nasional (untuk lebih jelas akan dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021). Sebagai akibat dari wabah Covid-19, Pemerintah pusat melalui Bappenas melakukan penyesuaian terhadap tema pembangunan nasional sebagai antisipasi dampak Covid-19 ini untuk tahun 2021. (untuk lebih jelas akan dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2021 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2021;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2021, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih

lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2019 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. subbab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2021.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

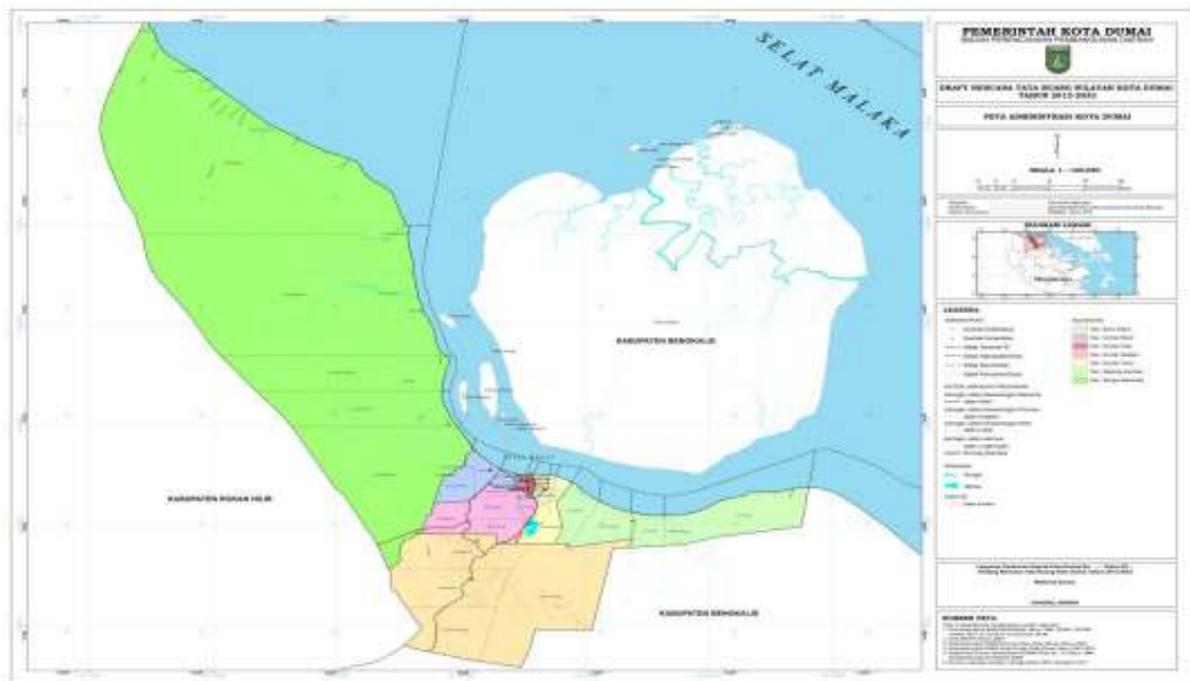
Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 206.673,36 Ha. Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- **Utara : Selat Rupa, Kabupaten Bengkalis.**
- **Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.**
- **Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.**
- **Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.**

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'00" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 206.673,36 Ha.

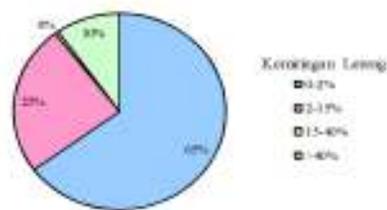
Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.



Gambar 2.1 Peta Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

c. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0 - 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 0–15 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40%, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut.

Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis Podsolid Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis alluvial di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan gley hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.

Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	1. Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2019 berkisar antara 78%-85%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2019 berkisar antara 26,7°C-28°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2019 terjadi pada bulan Oktober yaitu 347 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu 43 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 23 hari dan terkecil pada bulan Februari sebanyak 5 hari. Perkembangan banyaknya hari

dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2010 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2019

Bulan	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019
Januari	15	19	13	13	13	13	16	20	14	10
Februari	12	6	11	11	11	11	11	21	5	5
Maret	12	15	11	11	11	11	9	12	12	8
April	13	16	11	11	11	11	17	21	11	15
Mei	17	5	14	14	14	14	15	21	19	7
Juni	13	9	7	7	7	7	15	6	4	10
Juli	17	9	14	14	14	14	13	9	10	5
Agustus	13	8	18	18	18	18	9	17	14	7
September	tad	15	7	7	7	7	13	20	13	8
Oktober	tad	22	17	17	17	17	15	20	22	23
Nopember	tad	26	21	21	21	21	21	20	21	12
Desember	tad	14	24	24	24	24	20	19	18	9
	112	164	168	168	168	168	174	206	163	119

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Tabel 2.3 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)									
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019
Januari	144,0	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6	411,7	96,6	150,6
Februari	58,0	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3	418,0	44,3	43,0
Maret	329,0	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0	182,6	90,7	132,0
April	207,0	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2	181,0	166,3	177,0
Mei	330,0	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3	145,0	187,4	86,0
Juni	331,0	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6	95,0	48,6	185,0
Juli	425,0	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4	106,7	157,4	93,0
Agustus	188,0	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7	237,5	79,9	66,0
September	Tad	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7	237,8	447,3	79,0
Oktober	Tad	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3	179,4	447,3	347,0
Nopember	Tad	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0	238,3	289,7	178,0
Desember	Tad	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5	166,0	247,3	182,7
	2.012,0	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6	2.599,0	2.302,8	1719,3

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

g. Demografi

1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2014-2019. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,20%. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,15%. Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tersebut adalah 2,15% ± 0,12%. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 jumlah penduduk Kota Dumai tidak

mengalami pertumbuhan, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan pertumbuhan adalah 0,07%. Selain kematian penduduk, rendahnya tingkat kelahiran dan proses migrasi penduduk karena kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan menjadi salah satu indikator menurunnya jumlah penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08
2017	152.731	144.907	297.638	1,96
2018	155.638	147.654	303.292	2,74
2019	158.287	150.525	308.812	2,15

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2011-2018 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Berikut tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Selama Tahun 2011-2018.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2012-2019 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)								Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Bukit Kapur	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	45.479	46.522	47.565	2,35
Medang Kampai	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	11.923	12.140	12.351	1,94
Sungai Sembilan	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	32.546	33.231	33.909	2,19
Dumai Barat	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	42.364	43.247	44.119	2,17
Dumai Timur	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	64.127	65.299	66.435	1,95
Dumai Kota	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	47.570	48.261	48.910	1,62
Dumai Selatan	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	53.629	54.592	55.523	1,92
Kota Dumai	271.523	280.027	280.199	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	2,01

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Tiga kecamatan di Kota Dumai dengan kepadatan penduduk paling tinggi berturut-turut adalah Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Kota. Kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di ketiga kecamatan tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan

penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penduduk di Kota Dumai mencapai 308.812 jiwa, dengan jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 66.485 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 3.762 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan berturut-turut sebesar 33 jiwa/km². Kedua kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2001. Berikut ini tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bukit Kapur	200,00	210	230	212	217	222	227	233	238
Medang Kampai	373,00	29	30	30	31	31	33	33	33
Sungai Sembilan	975,38	31	33	31	32	33	33	34	35
Dumai Barat	44,98	864	846	882	902	922	942	961	981
Dumai Timur	47,52	1.237	1.273	1.272	1.298	1.324	1.349	1 374	1398
Dumai Kota	13,00	3.240	3.217	3.482	3.543	3.603	3.659	3 712	3762
Dumai Selatan	73,50	663	686	688	702	716	730	743	755
Kota Dumai	1.727,38	157	157	162	165	169	172	176	179

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

3. Struktur Penduduk

a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kota Dumai pada tahun 2014 sebesar 106, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kota Dumai terdapat 106 penduduk laki-laki. Seluruh Kecamatan di Kota Dumai memiliki *sex ratio* > 100, artinya seluruh kecamatan di Kota Dumai jumlah penduduk laki-laknya lebih banyak daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk Kota Dumai masih cukup baik. Jika angka *sex ratio* ini dibawah 100 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik. Disisi lain hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ke depan,

terutama untuk kebijakan pembangunan yang terkait gender. Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara proporsional, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah. Berikut Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019.

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019

TAHUN	P E N D U D U K			SEX RATIO
	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	LAKI-LAKI + PEREMPUAN (Jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	143.900	136.209	280.109	106
2015	146.792	139.175	285.967	105
2016	149.791	142.117	291.908	105
2017	152.731	144.907	297.638	105
2018	155.638	147.654	303.292	105
2019	158.287	150.525	308.812	105

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa Kota Dumai dikategorikan sebagai penduduk muda. Hal tersebut dikarenakan oleh presentase penduduk muda terhadap total penduduk masih cukup besar. Tabel 2.8 berikut adalah table penduduk kota Dumai berdasarkan kelompok Umur.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0 - 4	17.326	16.759
5 - 9	15.830	15.207
10 - 14	14.121	13.373
15 - 19	13.673	12.558
20 - 24	12.516	12.038
25 - 29	14.044	13.570
30 - 34	13.182	12.975
35 - 39	12.130	11.887
40 - 44	11.327	10.856
45 - 49	10.176	9.610
50 - 54	8.086	7.693

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
55 - 59	6.273	5.835
60 - 64	4.634	3.681
65+	4.969	4.969
JUMLAH	158.287	150.525
RASIO JENIS KELAMIN	105,16	
RASIO KETERGANTUNGAN (PERBANDINGAN)	49,60	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kota Dumai memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2018 sebanyak 66,84% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan 33,16% lagi merupakan penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan data tersebut, besar rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) di Kota Dumai adalah 0,49, artinya jumlah penduduk usia kerja di Kota Dumai hampir dua kali lipat penduduk usia non produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif..

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan window of opprtunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 0,49, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Berikut ini gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2019.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2019
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut, lebih dari 11% penduduk Kota Dumai merupakan balita, lebih dari 10% merupakan penduduk usia 5-9 tahun, dan lebih 2% merupakan penduduk usia >65 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-9 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar.

h. Wilayah Rawan Bencana

Kota Dumai mempunyai kawasan rawan bencana yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana yaitu bencana banjir harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana, hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat, disinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai no.15 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah kota Dumai Tahun 2019-2039, Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah potensi rawan banjir, rawan kebakaran dan angin puting beliung. Kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan kebakaran tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan angin puting beliung tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Kejadian yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2019 terjadi peningkatan kejadian bencana,

dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2019 berturut-turut sebanyak 144 kejadian. Berikut tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai.

Tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai tahun 2019

Lokasi Kejadian	Jumlah Kejadian
Hutan dan Lahan	110
Perumahan/Pemukiman	17
Pertokoan/Kios/Kafe	9
Kantor	1
Lain-lain	7
Total	144

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah kebakaran perkotaan juga merupakan potensi bencana bagi kota Dumai. Adapun jumlah kejadian kebakaran perkotaan di Kota Dumai pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai

Bulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	-	3	-	7	2	-	3
Februari	-	6	36	53	2	29	23
Maret	-	191	16	56	3	33	41
April	-	1	9	8	7	14	45
Mei	-	1	4	-	5	-	46
Juni	63	54	6	10	3	7	47
Juli	7	14	43	10	3	7	51
Agustus	-	1	2	83	1	23	62
September	-	3	11	14	15	2	-
Oktober	-	1	2	18	1	-	-
November	-	-	-	-	5	-	-
Desember	-	-	-	-	2	-	-
Jumlah Kejadian	70	275	129	259	49	115	318

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Begitu juga dengan masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.

i. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis, **Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan.**

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar,**diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian yang terletak dikecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Dumai Selatan dan perkebunan yang terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.**

Berdasarkan kondisi klimatologi, **Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2019 berkisar antara 81,4%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan yang tersebar diseluruh kecamatan maupun perikanan yang terletak diwilayah Kecamatan Sungai Sembilan.**

Berdasarkan kondisi geologi, **umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial*serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 m dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting**

dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan kewilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah dengan tujuan untuk mencegah abrasi, erosi dan amblesan. kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun RKPD Kota Dumai Tahun 2021, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan PDRB

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data-data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2013-2019, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 23,5 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 32,9 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2019

NO	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1437.57	1551.17	1687.64	1806.63	1877.80	1929.05
2	Pertambangan dan Penggalian	108.90	120.47	121.86	116.79	120.20	128.33
3	Industri Pengolahan	12499.50	13544.27	15088.11	16611.66	18671.09	20899.25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.69	18.03	24.52	27.10	28.10	31.77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.65	4.04	4.29	4.74	4.88	5.33
6	Konstruksi	2562.18	2869.88	3214.66	3533.02	3786.76	4049.17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4589.15	4691.52	5000.29	5250.80	5416.76	5743.14
8	Transportasi dan Pergudangan	727.11	807.76	862.15	918.54	973.96	1055.84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200.38	235.07	260.52	280.82	303.92	320.06
10	Informasi dan Komunikasi	234.99	270.71	294.25	333.68	380.26	418.39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	366.13	355.03	367.27	375.46	390.06	397.21
12	Real Estat	113.12	127.22	134.71	143.28	153.25	162.04
13	Jasa Perusahaan	1.22	1.42	1.55	1.66	1.84	2.06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494.47	524.62	541.62	553.24	568.68	587.76
15	Jasa Pendidikan	122.92	142.98	149.35	155.05	161.94	177.13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.78	46.88	49.79	53.47	56.82	65.84
17	Jasa lainnya	117.70	142.50	159.68	176.90	196.64	220.03
Produk Domestik Regional Bruto		23628.47	25453.57	27962.26	30342.84	33092.97	36192.40

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan

untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2014-2019

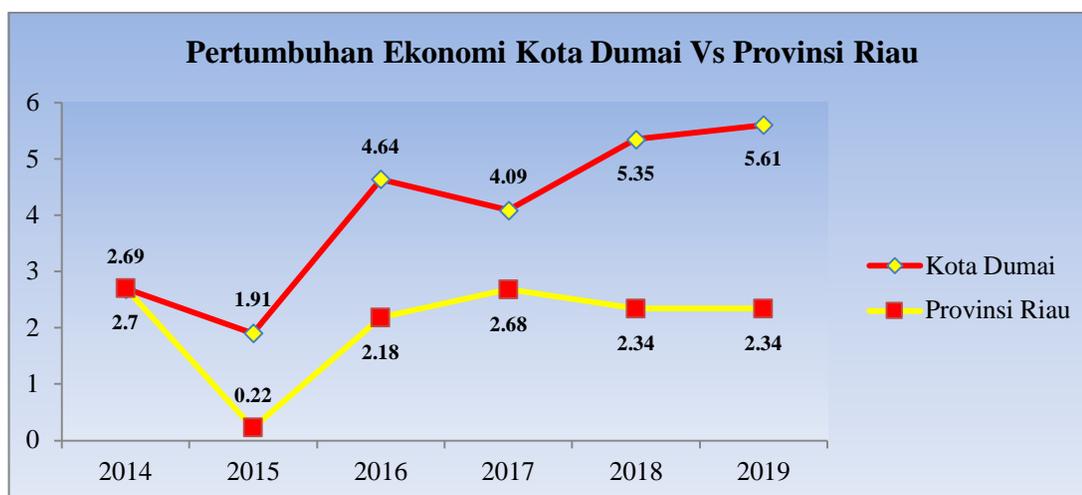
Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)						Rata - Rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,62	0,1	1,14	3,31	2,82	2,02	1,84
Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,19	-4,04	-4,95	-3,74	2,29	-1,56
Industri Pengolahan	6,19	2,92	5,71	5,17	7,51	7,17	5,78
Pengadaan Listrik dan Gas	13,65	9,75	18,12	1,04	3,21	7,29	8,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,95	2,76	(0,16)	4,60	1,13	6,24	2,75
Konstruksi	(4,59)	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	2,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,95	0,13	2,16	2,84	1,94	2,92	1,82
Transportasi dan Pergudangan	9,92	2,02	3,02	4,82	3,84	5,36	4,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,20	2,35	2,58	6,30	6,50	6,50	5,57
Informasi dan Komunikasi	11,24	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	6,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	(39,50)	(6,88)	0,51	(0,74)	2,09	0,12	(7,40)
Real Estat	3,75	5,01	1,41	3,43	3,89	5,34	3,81
Jasa Perusahaan	8,50	7,67	3,61	6,91	9,07	7,74	7,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,42	2,02	0,16	0,11	0,28	2,33	0,89
Jasa Pendidikan	8,96	5,24	0,55	2,70	3,94	5,62	4,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	9,94	0,87	5,49	5,57	10,83	5,88
Jasa lainnya	11,86	7,81	5,26	7,99	8,61	8,79	8,39
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)	2,69	2,03	4,14	4,46	5,35	5,61	4,05

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus menerus mengalami pertumbuhan dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, mulai tahun 2014 (tahun dengan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2013-2018) dapat dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama penggerak perekonomian tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah beberapa sektor yang ada di Kota Dumai, dan sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2014-2019 sebesar 3,70%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2014-2019 adalah sektor pengadaan listrik dan gas

yaitu sebesar 8,84%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan yang signifikan di tahun 2017.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 2.12 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai berfluktuasi dari tahun 2014 sampai tahun 2019, Selama periode 2014-2015, laju pertumbuhan ekonomi kota Dumai cenderung melambat, sedangkan dari 2017-2019 pertumbuhan ekonomi kota Dumai mengalami peningkatan yang sangat bagus. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut :



Gambar 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Dari Gambar di atas terlihat bahwa selama periode 2014-2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Meskipun demikian, secara umum perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2015 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau dapat dikatakan perekonomiannya melambat. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi Kota Dumai kedepannya. Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai pada tahun 2019 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis tidak prospektif yaitu industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan

minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi ; administrasi pemerintahan, dan jasa lainnya.

2. Sektor non basis tidak prospektif yaitu jasa pendidikan; Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalian; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa shift share dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas ; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi mobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya;
2. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalian; dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. menyusun tipologi perkembangan wilayah (Tipologi Klassen);
3. sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi;
6. sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Tabel 2.13 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019

No	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1138.07	1139.16	1152.20	1190.35	1223.87	1248.63
2	Pertambangan dan Penggalian	87.26	87.42	83.89	79.73	76.75	78.51
3	Industri Pengolahan	11059.23	11382.36	12032.42	12654.79	13605.18	14581
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.20	14.48	17.11	17.29	17.84	19.14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.43	3.52	3.52	3.68	3.72	3.95
6	Konstruksi	2081.31	2119.78	2184.09	2300.70	2360.06	2458.03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3771.27	3776.04	3857.61	3967.11	4044.03	4162.14
8	Transportasi dan Pergudangan	590.80	602.75	620.94	650.89	675.91	712.12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	146.74	150.19	154.07	163.77	174.41	181.12
10	Informasi dan Komunikasi	229.29	245.70	255.85	271.85	287.48	308.20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	285.15	265.54	266.88	264.91	270.44	270.76
12	Real Estat	90.25	94.77	96.11	99.41	103.27	108.79
13	Jasa Perusahaan	0.96	1.03	1.07	1.14	1.25	1.34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	421.47	429.99	430.68	431.15	432.38	442.43
15	Jasa Pendidikan	89.92	94.63	95.15	97.72	101.57	107.28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29.38	32.31	32.59	34.38	36.29	40.22
17	Jasa lainnya	94.63	102.02	107.39	115.97	125.95	137.02
Produk Domestik Regional Bruto		20132.38	20541.69	21391.57	22344.83	23540.40	24860.69

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Jika dilihat kontribusi per sektor, maka sektor /lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar (diatas 10%) pada PDRB Kota Dumai selama kurun waktu 2014-2019 adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Kontribusi Sektor PDRB 2014-2019

No	Sektor / Sub Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Pergeseran
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,08	6,09	6,04	5,95	5,67	5,33	-0,34
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,47	0,44	0,38	0,36	0,35	-0,01
3	Industri Pengolahan	52,90	53,21	53,96	54,75	56,42	57,74	1,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
6	Konstruksi	10,84	11,27	11,50	11,64	11,44	11,19	-0,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,42	18,43	17,88	17,30	16,37	15,87	-0,50
8	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,17	3,08	3,03	2,94	2,92	-0,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,92	0,93	0,93	0,92	0,88	-0,04
10	Informasi dan Komunikasi	0,99	1,06	1,05	1,10	1,15	1,16	0,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,55	1,39	1,31	1,24	1,18	1,10	-0,08
12	Real Estat	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	-0,01
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,06	1,94	1,82	1,72	1,62	-0,10
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,56	0,53	0,51	0,49	0,49	0,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,01
17	Jasa lainnya	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,02
PDRB		100	100	100	100	100	100	0,00

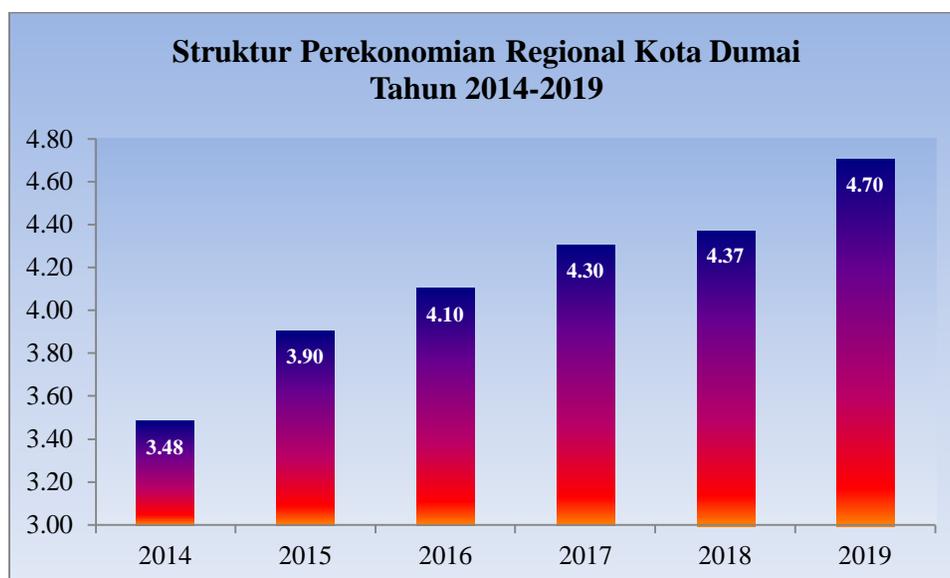
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2013-2019 terlihat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2018

**Tabel 2.15 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai
Tahun 2014-2019**

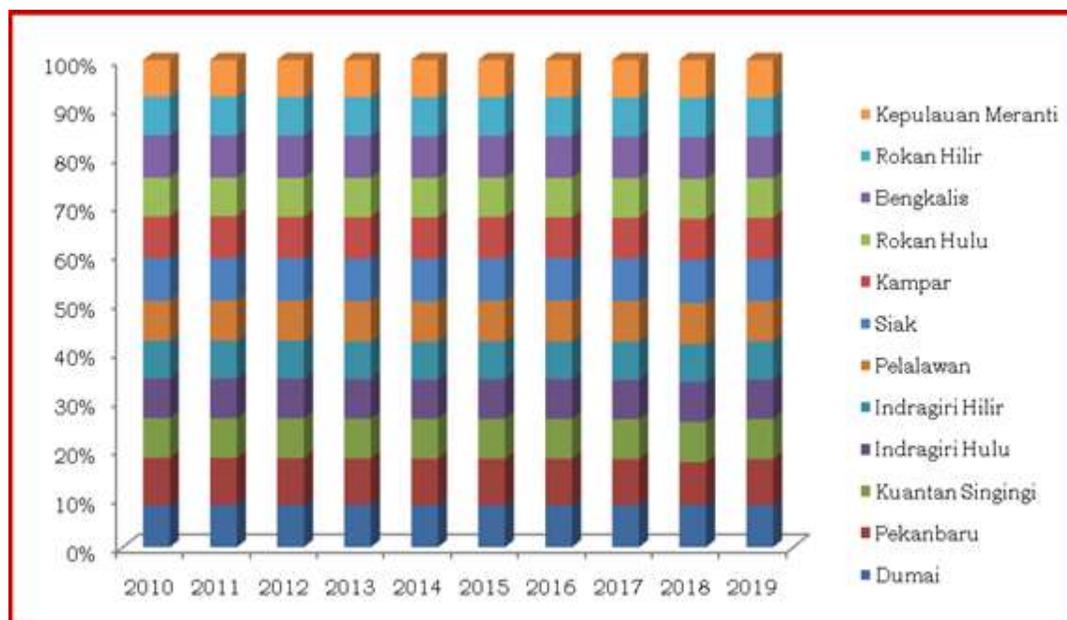
TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB KOTA DUMAI (Juta Rp.)	23.628.467	25.430.570	27.962.260	30.342.837	33.092.966	36.192.405
PDRB PROVINSI RIAU (Juta Rp.)	679.395.860	652.761.630	681.699.030	704.705.030	755.435.020	765.198.300
Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)	3,48%	3,90%	4,10%	4,31%	4,38%	4,73%

(Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)



Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2019
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Dari tabel dan Gambar di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2010-2019 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%, namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Riau tahun 2014-2019 berturut-turut adalah Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kab. Siak. Berikut gambar 2.7 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2019.



Gambar 2.7 Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2019 (Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah, dimana dominasi peran suatu sektor menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian sektoral Kota Dumai tahun 2013-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.7. Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2017 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor industri pengolahan dengan besar kontribusi rata-rata >50%. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan. Berdasarkan kriteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) berikut Kota Dumai masuk dalam kategori wilayah industri :

1. PDRB sektor industri <10%, wilayah non industri;
2. PDRB sektor industri 10-20%, wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDRB sektor industri 20-30%, wilayah tergolong semi industri;
4. PDRB sektor industri >30%, wilayah industri.

Tabel 2.16 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2014-2019

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sektor Primer	6,52	6,54	6,54	6,56	6,48	6,33	6,03	5,68
Sektor Sekunder	63,48	63,81	63,81	64,57	65,57	66,50	67,95	69,03
Sektor Tertier	30,00	29,65	29,65	28,84	27,96	27,17	26,00	25,29

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

2. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 2.17 di bawah ini tersaji Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel 2.17

Tabel 2.17 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2019

Uraian	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	84.354,54	88.928,34	95.733,57	101.798,70	108.787,11	117.198,81
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	109.784,64	102.887,81	104.861,11	105.858,67	110.826,76	110.826,76
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	2,69	1,91	4,64	4,09	5,35	5,61
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,71	0,22	2,18	2,68	2,37	2,00
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang g cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Pada Tabel 2.18 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2014-2018.

Tabel 2.18 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Perkapita Makanan							
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559	608.839	
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64	47,52%	53,12%
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan							
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256	672.279	
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36	52,48	46,88%
Jumlah Pengeluaran Perkapita	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815	1.281.118	12.453

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2019 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 927.230,- menjadi Rp. 1.281.118,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 50,96% pada tahun 2014 menjadi 47,52% di tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2014 menjadi 52,47% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

3. Tingkat Kemiskinan

Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2014-2019 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 2.19

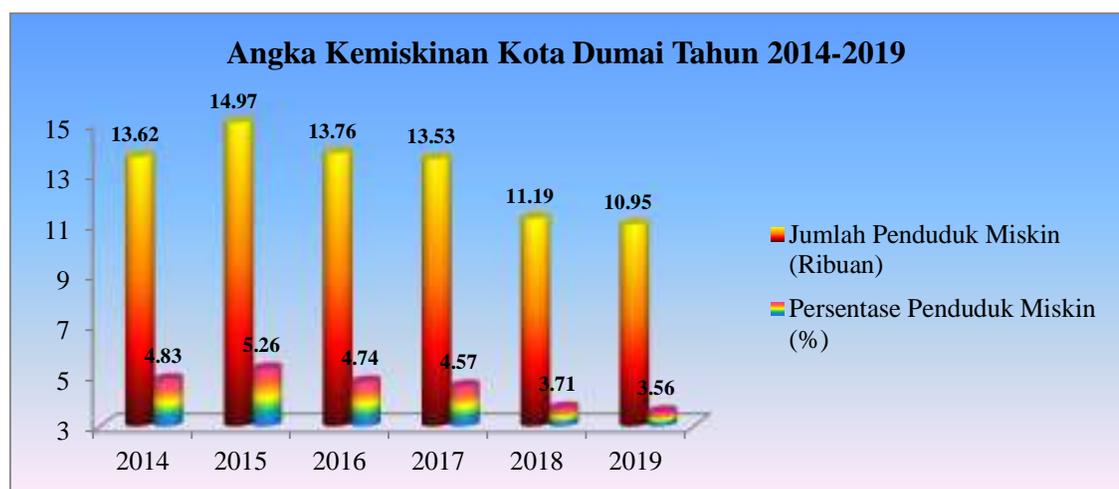
Tabel 2.19 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Dumai							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	341.525	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,62	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56
Provinsi Riau							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	379.223	399.211	426.001	456.493	479.944	528.468
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	498,28	531,39	515,40	514,62	500,44	490,72
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	7,99	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08
Indonesia							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	296.681	333.034	350.420	370.910	392.154	392.154
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	27.727,78	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.674,58
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22

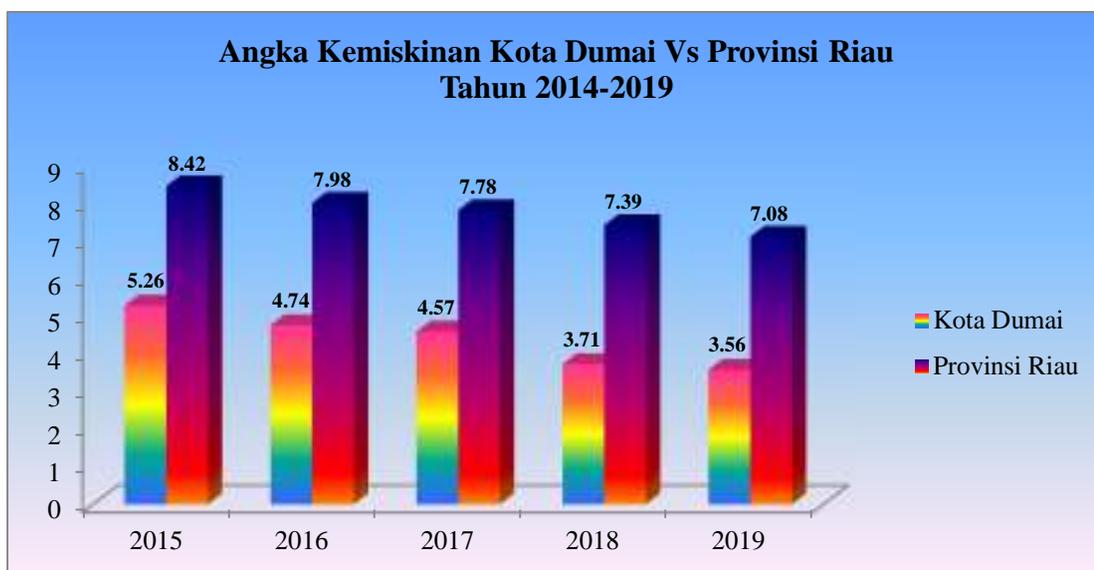
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 4,83%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 5,26% menjadi 3,56% di tahun 2019. Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Disisi lain, tingginya angka kemiskinan di tahun 2015 ini diindikasikan disebabkan oleh tingginya persentase penduduk miskin di daerah *hinterland*, baik terhadap 11 kab/kota lainnya di Provinsi Riau maupun terhadap Provinsi tetangga (Sumatera Utara 10.53% dan Jambi 8.86%). Tingginya angka pendapatan perkapita di Kota Dumai menjadi daya tarik bagi penduduk miskin di daerah *hinterland* untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kota Dumai.



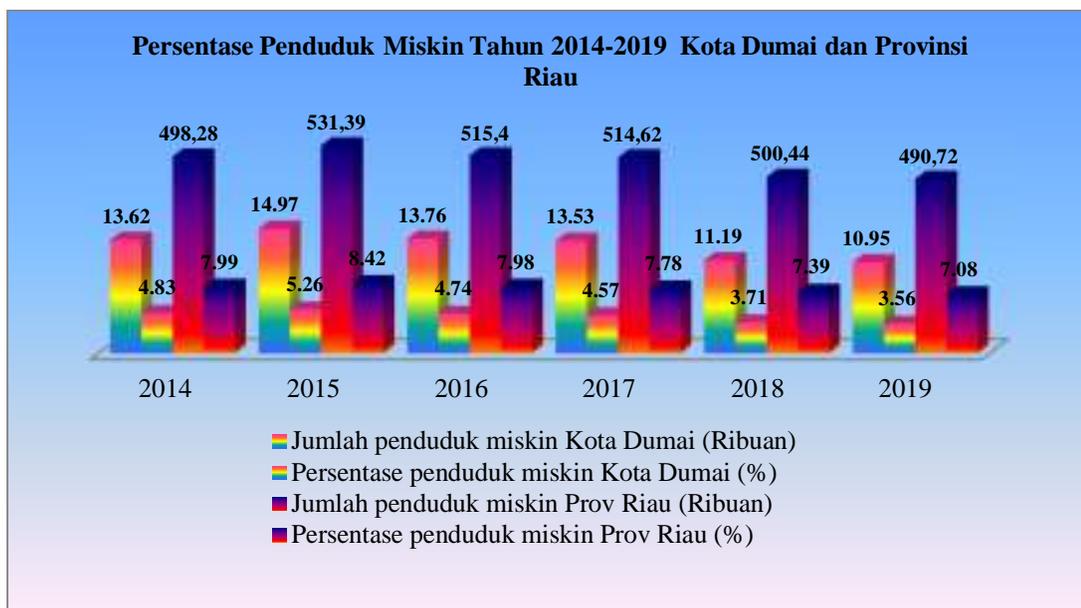
Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2014-2019 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Seperti yang terlihat pada Gambar diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2019 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,15%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 2.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Gambar 2.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Riau adalah 8,42%, kemudian mengalami penurunan menjadi 7,08% di tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan 5,26% pada tahun 2015 menjadi 3,56% di tahun 2019. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2014-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,01%, 341.525,00/kapita/bulan pada menjadi Rp. 439.152 /kapita/bulan pada tahun 2019. Selama periode 2014-2019 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

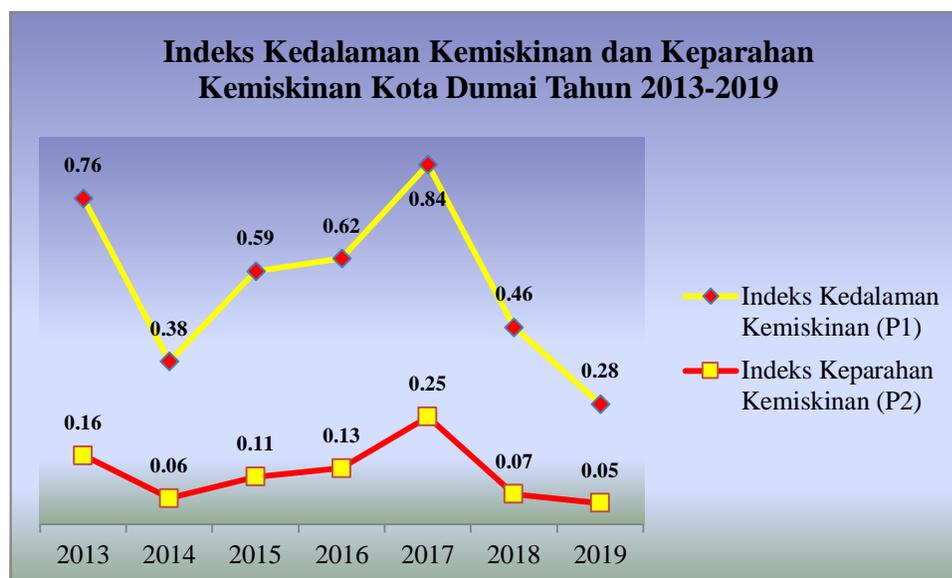
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.11 berikut tersaji perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2019.

Tabel 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05

(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2019)



Gambar 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2019

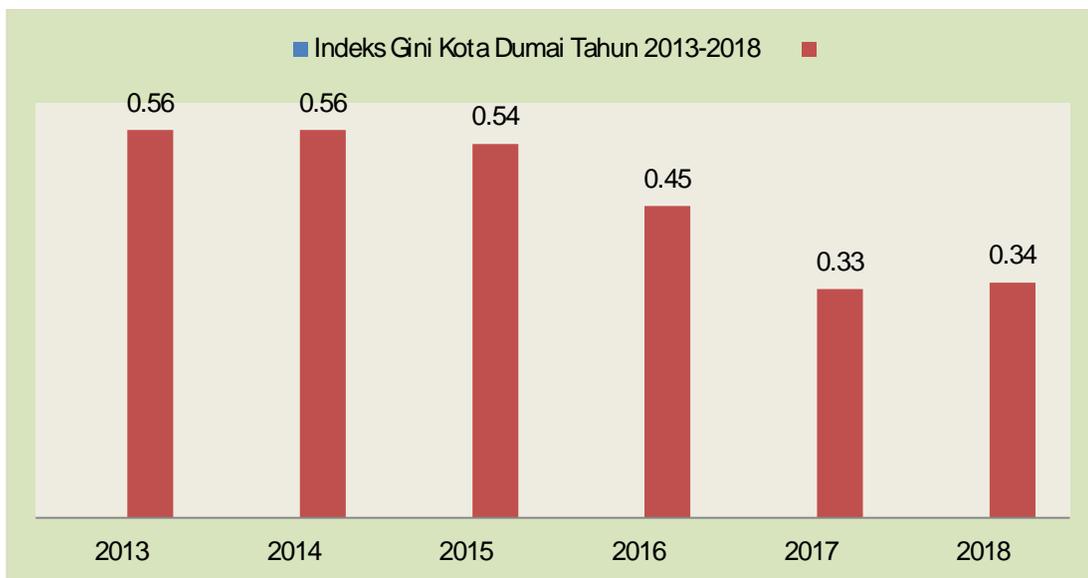
(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2020)

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa trend indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman terendah selama kurun waktu 2013-2019 terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,38, kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan namun kemudian membaik kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,28. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode trend indeks keparahan kemiskinan, selama kurun waktu 2013-2019, indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,06 kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat namun kemudian membaik pada tahun 2019 menjadi 0,05.

4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk

pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2013-2018, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Berikut ini Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018.



Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019, diolah)

5. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

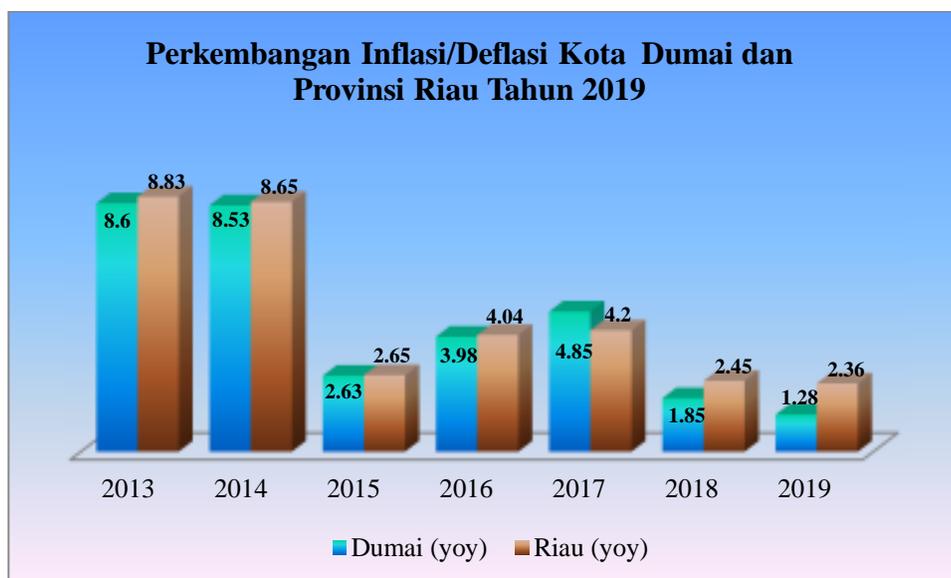
Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara

khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 2.21 menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2013-2019 dan Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Tabel 2.21 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2015-2018 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Bulan	Inflasi (Persen)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	1,28	0,43	-0,33	0,65	1,58	0,36	-0,04
Februari	0,41	0,3	-0,68	0,32	1,12	-0,24	-0,32
Maret	-0,01	0,24	0,13	0,23	-0,19	0,05	0,07
April	0,17	0,4	0,38	-0,64	-0,21	0,14	0,35
Mei	0,4	0,14	0,98	0,06	0,11	0,16	1,05
Juni	1,39	0,66	0,59	0,79	0,90	0,65	0,80
Juli	1,91	0,83	0,78	0,46	0,05	-0,10	0,41
Agustus	0,61	0,65	0,55	0,05	0,14	-0,34	-0,25
September	0,32	0,64	-0,23	0,64	0,05	-0,26	-0,79
Oktober	1,17	0,42	0,11	0,47	0,08	0,50	0,05
November	0,45	1,86	-0,02	0,82	0,62	0,70	-0,12
Desember	0,19	1,66	0,39	0,07	0,53	0,22	0,07
Dumai (yoy)	8,60	8,53	2,63	3,98	4,85	1,85	1,28
Riau (yoy)	8,83	8,65	2,65	4,04	4,20	2,45	2,36

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)



Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Dari Tabel 2.21 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2013-2019 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2013 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi selama kurun waktu 2013-2019. Pada Tahun 2019 merupakan tahun dengan inflasi paling rendah selama kurun waktu 2013-2019. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota

Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2019 seperti yang tersaji pada Gambar 2.13 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai di bulan Juni. Untuk Kota Dumai inflasi bulanan terendah terjadi di bulan Maret. Pada Tahun 2019 Kota Dumai mengalami deflasi pada bulan Januari, Februari, Agustus, September dan November.

6. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \\ &= (32.994.260,7 \times 10^6) / 1127.897 \\ &= 257.975.251,18 \end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

7. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sitem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan

dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2011-2018. Berikut table 2.22 Menampilkan angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018.

Tabel 2.22 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Dumai	11.87	12.07	12.27	12.40	12.46	12.75	12.97	12.98

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Selama periode 2010-2019 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2019 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46 ; 74,06 ; 74,64. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

Tabel 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

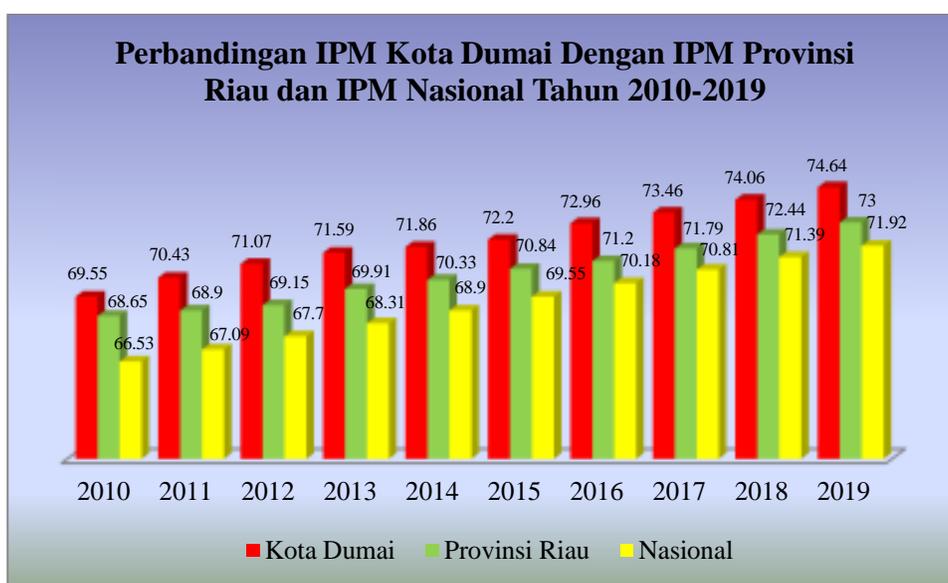
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

J Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2019, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.24 dibawah. Pada tahun 2019, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti pada Tabel 2.23 di atas maupun Gambar 2.14 Pada tahun 2019 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 74,64 ; 73,00 ; 71,92. Berikut tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2019 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2019.

**Tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2011-2019**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66	70,05
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36	69,93
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66	81,35
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)



**Gambar 2.14 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional
Tahun 2010-2019**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap sektor Pendidikan dengan indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan tren yang sangat baik, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 99,35%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2015 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Berikut Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018.

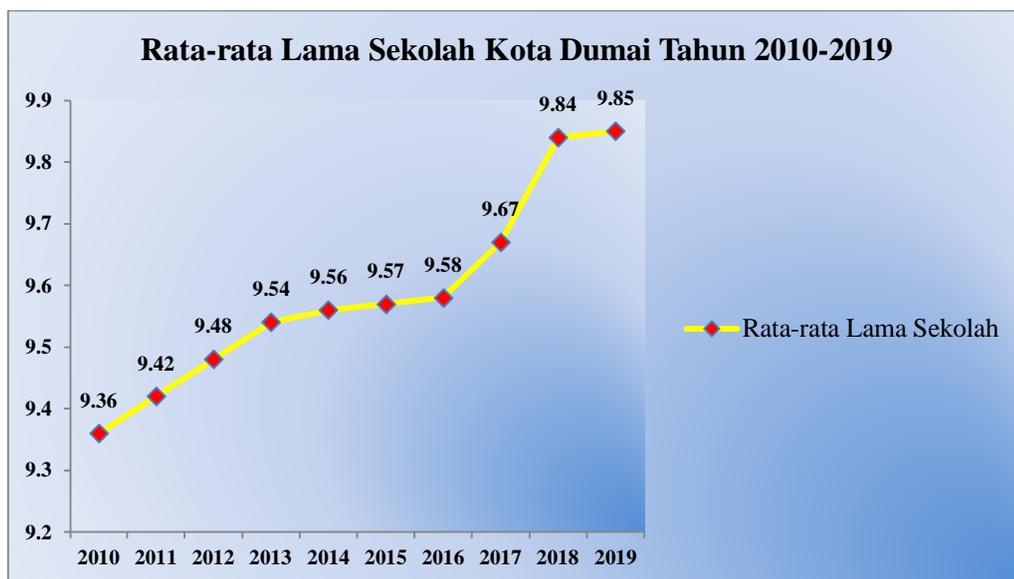


Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019)

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

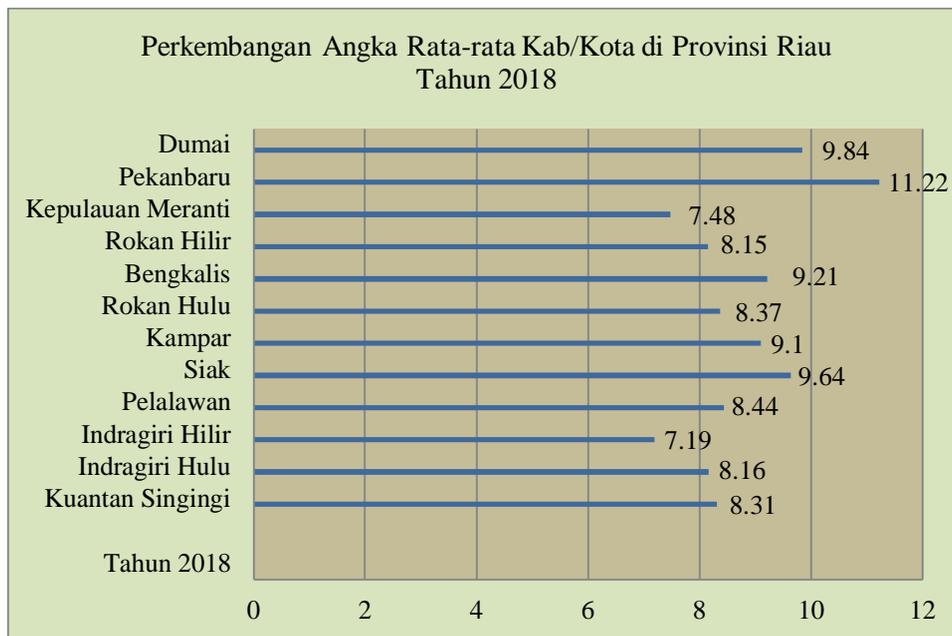
Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata

lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2019.



Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2019
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2019 terus mengalami peningkatan 9,85 pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan. Secara tingkat Provinsi Riau, untuk angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa kota dumai menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan manusia dari sisi Pendidikan. Berikut Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018.

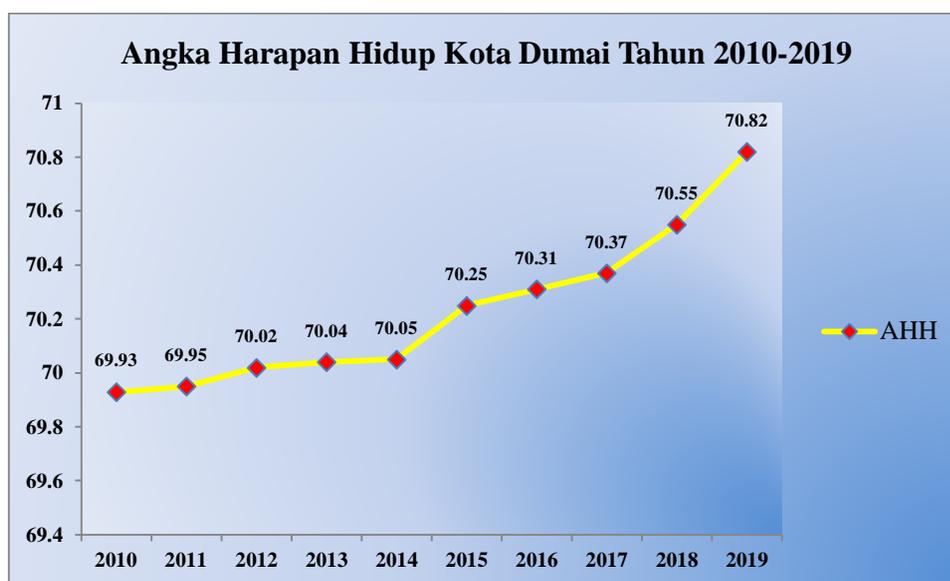


Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.18. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2019
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

B. Kesehatan

1. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.

Selama tahun 2010–2017 realisasi capaian persentase balita gizi buruk adalah 0,01%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.25 Penerima Batuan Iuran (PBI)

Sumber Dana	2016	2017	2018	2019
APBD Kota Dumai	64.514	64.949	66.200	89.298
APBN	62.158	61.414	61.166	62.249
Jumlah	126.672	126.363	127.366	151.547

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Pada tahun 2019 terdapat 151.547 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dengan target 148.887 peserta. Dengan kata lain, pada tahun 2018 sekitar 101.77% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi

penduduk kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kota Dumai bagi masyarakat kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

A. Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam

pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	114	5	5	66	102	103	114
Persentase		5%	5%	63%	95,33%	96,26%	100%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal.

Tabel 2.27 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
SMP/MTs	56	23	24	28	28	28	28
Persentase		66%	69%	80%	75,67%	75,67%	75,67%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2019 di tingkat Sekolah mencapai 100% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 75,67% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal semakin membaik,

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Dasar yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib									
		2015		2016		2017		2018		2019	
Membaca Yasin Bersama	105	68	64%	70	65%	91	85%	92	86%	92	89%
Sholat Zuhur Berjamaah		43	40%	46	43%	50	48%	51	48%	51	58%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		89	83%	92	86%	97	91%	99	93%	97	93%
Berdoa setiap memulai pelajaran		95	89%	98	92%	101	94%	102	95%	102	95%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

Apabila data diatas dirata-ratakan, maka rata-rata implementasi nilai-nilai agama pada Pendidikan dasar dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29 Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Implementasi kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib	69%	71%	79,21%	80,37%	83,75%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2019 adalah sebesar 80,75%.

Tabel 2.30 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dsar/MI	Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib									
		2015		2016		2017		2018		2019	
Membaca Yasin Bersama	35	29	81%	31	86%	91	85%	92	86%	93	87%
Sholat Zuhur Berjamaah		19	53%	23	64%	50	48%	51	48%	52	48%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		25	69%	31	86%	97	91%	99	93%	99	93%
Berdoa setiap memulai pelajaran		31	86%	33	92%	101	94%	102	95%	102	95%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2019 adalah 80.75%.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Pada Tabel 2.31 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2019.

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2019

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian Kinerja 2019	Realisasi sampai Tahun 2019	Capaian Kinerja
Sanggar seni dan budaya yang dibina	85 sanggar	40 sanggar	47,06
Jumlah grup kesenian	40	35	87,50
Jumlah Gedung Kesenian	1	0	0

(Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 85 sanggar yang dibina hanya terealisasi 40 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 40 grup kesenian hanya terealisasi 35 grup. Sedangkan pembangunan 1 (satu) gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan.

Jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 76 grup seperti yang tersaji pada Tabel 2.32. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 (enam) gedung kesenian di Provinsi Riau.

Tabel 2.32 Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
Kuantan Singingi	10	1
Indragiri Hulu	24	-
Indragiri Hilir	3	1
Pelalawan	1	-
Siak	2	-
Kampar	76	-
Rokan Hulu	24	-
Rokan Hilir	3	1
Bengkalis	3	1
Kep. Meranti	3	-
Pekanbaru	7	2
Dumai	1	-
Jumlah	158	6

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mendukung Misi

ke 7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu’. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu terpenting dalam pembangunan Kota Dumai ke depan.

B. Olahraga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya. Pada Tabel 2.33 berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabang dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabang dan Jumlah Klub Olahraga

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	32	28	33	118
Jumlah klub olahraga	Klub	112	112	112	100

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada di Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau

Kabupaten / Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Kuantan Singingi	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Pelalawan	-	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
Siak	-	Sepatu Roda	-	-	-	-
Kampar	-	Kampar (Pencak Silat)	Labersa (Golf)	-	-	-

Kabupaten / Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Bengkalis	-	-	-	PAS (Bela Diri Tarung Drajat)	-	-
Pekanbaru	1. Grand Stadion-UNRI (Sepak Bola) 2. Kaharudin Nasution Rumbai (Sepak Bola) 3. SC Rumbai (Hockey) 4. SC Rumbai (Athletic)	1. Remaja (Bulu Tangkis) 2. Angkasa (Bulu Tangkis) 3. SC Rumbai (Senam) 4. Tribuana (Karate)	1. Chevron (Soft Ball) 2. UNRI (Kawasan Olahraga) 3. UNRI (Panjat Tebing) 4. UIR Panahan	1. SC Rumbai (Basket) 2. SC Rumbai (Renang) 3. SC Rumbai (Menembak) 4. SC Rumbai (Volly Ball) 5. UIR Volly Ball	1. UNILAK (Anggar) 2. UNRI (Yudo) 3. UIN (Taekwondo) 4. UIR (Gulat)	Danau Buatan (Sky Air)
Dumai	-	-	Chevron (Tennis Meja)	-	-	Sasana Tirta Pertamina (Renang)

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019)

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Pendidikan

1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2012 hingga 2019, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 106. Angka ini menunjukkan ada sekitar 106 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2019 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 107 hal ini berarti terdapat sekitar 107 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2012 hingga tahun 2019 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 menunjukkan nilai 51 dan pada tahun 2019 naik menjadi 55.

Tabel 2.35 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Tingkatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs								
SD/MI	106	101	107	106	108	107	107	107
SMP/MI	51	51	54	53	55	55	56	55
Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas								
SD/MI	1:36	1:37	1:38	1:38	1:34	1:34	1:34	1:37
SMP/MTs	1:44	1:35	1:41	1:41	1:33	1:33	1:33	1:31

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2010 adalah sebanyak 33.983 siswa dan terjadi kenaikan sebanyak 4.216 siswa pada tahun 2018 yakni menjadi 38.199 siswa. Jumlah ruang kelas juga terdapat penambahan, pada tahun 2010 terdapat 954 ruang, kemudian bertambah sebanyak 202 ruang pada tahun 2018 menjadi 1.156 ruang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2019 yakni 1:37 artinya 1 ruang kelas menampung 37 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SD.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2010 adalah sebanyak 13.102 siswa. Terjadi kenaikan jumlah siswa pada tahun 2018 menjadi 29.370 siswa. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan yakni 308 ruang pada tahun 2010 menjadi 487 ruang pada 2018. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2019 yakni 1:31 artinya 1 ruang kelas manampung 31 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai tetap memperhatikan untuk kedepannya terhadap penambahan ruang kelas belajar.

Disamping belum terpenuhinya rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP, jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota seperti data yang tersaji pada Tabel 2.36. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih

lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Dari tabel 2.36 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per kecamatan. Di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Tabel 2.36 Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Sekolah (unit)		Jumlah Siswa (orang)		Jumlah Guru (orang)		Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah		Rata-rata Jumlah Guru per Sekolah	
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
Bukit Kapur	19	12	13.006	4.247	644	334	684	354	34	28
Dumai Barat	11	6	8.750	4.224	476	286	795	704	43	26
Dumai Kota	11	6	8.657	3.414	496	206	787	569	46	19
Dumai Selatan	16	11	12.151	6.861	648	434	759	634	40	27
Dumai Timur	28	8	20.754	6.176	1.108	372	741	772	39	24
Medang Kampai	8	4	4.098	1.237	673	144	512	309	84	13
Sungai Sembilan	21	9	10.484	3.211	352	288	499	356	16	14

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019, data diolah)

2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
APK SD/MI	107,27	107,20	107,79	111,92	100,00	105,0
APK SMP/MTs	89,67	91,58	100,18	95,60	78,89	98,42

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka 2019)

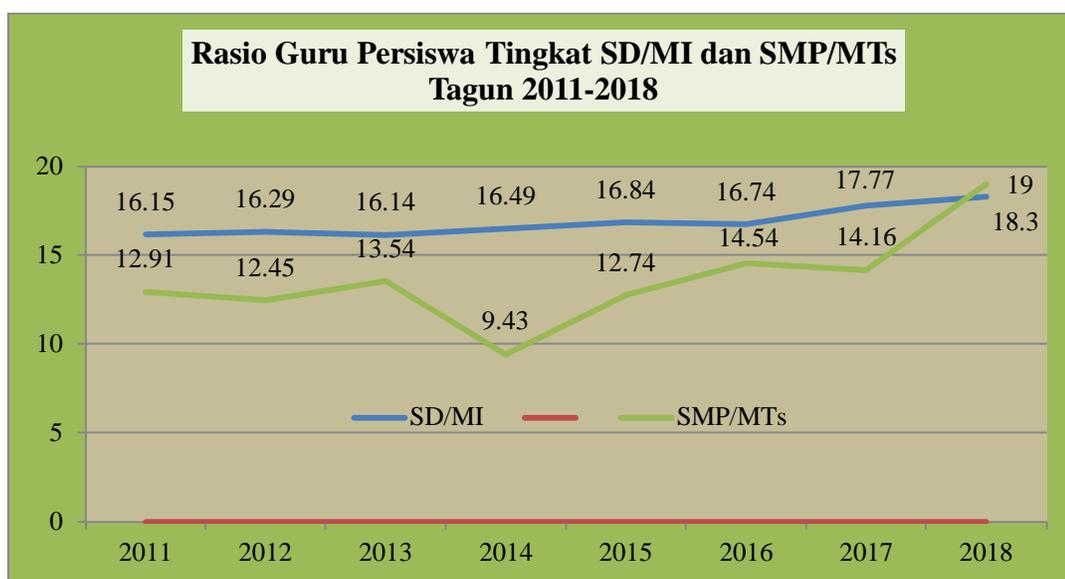
Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2014 hingga tahun 2019 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif diberbagai faktior. Pada tahun 2019 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2011 terdapat jumlah rasio guru SD 16,15, dan guru SMP 12,91.

Sedangkan di tahun 2019 terdapat 18,3 rasio guru SD/MI, dan 19 guru SMP/MTs. Berdasarkan data-data tersebut maka untuk tingkat SD/MI rasio guru per siswa pada tahun 2011 adalah 1:16,15, di tahun 2018 rasio guru persiswa 1:88,3. Angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 adalah 1:20. Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2011-2018 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, namun angkanya kian meningkat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.19. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh terkonsentrasinya jumlah siswa pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Akibatnya di daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio murid guru dalam rentang antara tahun 2011 hingga tahun 2018 tren perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah rasio guru SMP/MTs persiswa adalah 1:12,91, dan pada tahun 2018 jumlah rasio guru persiswa 1:19. Pada tahun 2019 jumlah guru sebanyak 2.064 orang dan jumlah siswa 29.368 orang dan jumlah guru tingkat SD sebanyak 4.186 orang dengan jumlah murid sebanyak 76.654 orang. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20) terpenuhi, hal ini disebabkan bahwa jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan sekolah di daerah pinggiran.



Gambar 2.19 Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2018
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019, diolah)

4. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

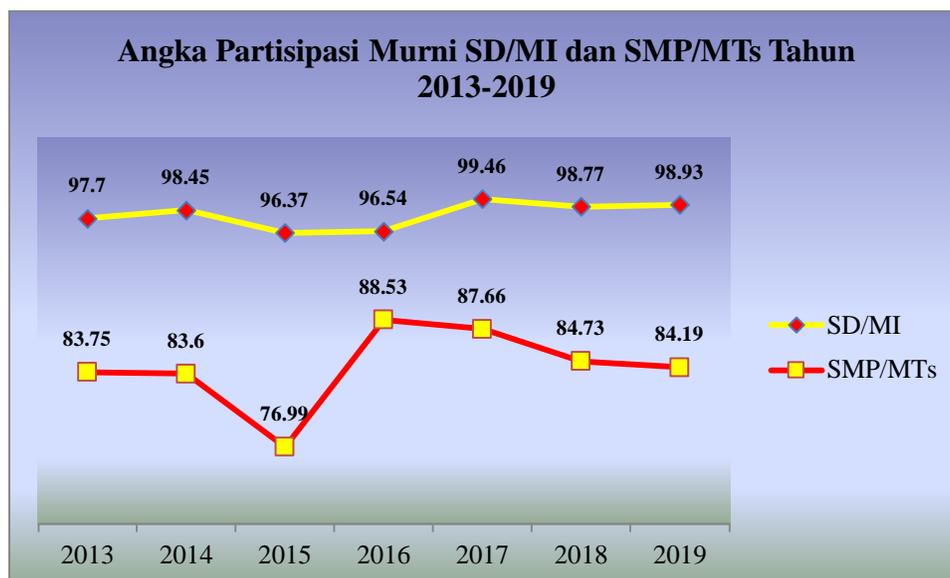
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 201-2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
APM SD/MI	98,45	96,37	96,54	99,46	98,77	93,90
APM SMP/MTs	83,60	76,99	88,53	87,66	84,73	80,07

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020, dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2014 hingga tahun 2019 fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai APM SD/MI adalah sebesar 98,45%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2018 dengan angka partisipasi murni di tahun 2018 sebesar 98,77%. Sama halnya dengan nilai APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2014-2019. Secara umum nilai APM SD/MI tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.38 diatas.

Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.



Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

5. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 2.39 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tdk/Belum Pernah Sekolah	NA	32,10 %	34,30 %	9,38%	9,41%	9,67%	0,63
Tidak/Belum tamat SD		11,00 %	10,30 %	30,70%			
SD/MI/Sederajat		16,80 %	16,20 %		15,53%	16,21%	
SLPT/MTs		12,20	12,00	13,34%	11,57%	11,92%	

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		%	%				
SMA/SMK		22,40 %	21,90 %	36,74%	22,30%	23,26%	
D I/II		0,60 %	0,60%	0,85%	0,52%	0,59%	
AKADEMI/D III		1,80 %	1,70%	2,54%	1,78%	1,88%	
S1/Sarjana		3,00 %	2,90%	6,45%	3,21%	3,46%	
S2/S3/Pasca Sarjana		0,10 %	0,10%				

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2018 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2018 sebanyak 23,26% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SMA/SMK. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari $\pm 45\%$ menjadi 9,67%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai. Ketersediaan jumlah perguruan tinggi beserta akreditasinya ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi, terampil dan mampu berdaya saing.

6. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Indikator ini sama dengan indikator angka melek huruf pada pokok bahasan fokus kesejahteraan masyarakat bagian pendidikan.

7. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2017 sebesar 38,54%. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Persentase ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2016 sebesar 41,99%, pada tahun 2019 persentasenya naik menjadi 44,27% seperti yang tersaji pada Tabel 2.40 dan Gambar 2.21

Tabel 2.40 Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2019

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)			PERSENTASE RUANG KELAS (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BAIK	446	443	518	38,54	41,99	44,27
RUSAK RINGAN	655	557	598	56,26	52,80	51,11
RUSAK BERAT	56	55	54	5,20	5,21	4,62
JUMLAH	1157	1055	1170	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.21 Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020

8. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun 2018 menunjukkan tren perkembangan yang menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas untuk jenjang SMP dalam

kondisi baik sebesar 20,05% dan pada tahun 2018 persentasenya mengalami penurunan menjadi 24,74%. Ruang kelas SMP dari tahun 2016 sampai tahun 2018 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Tabel 2.41 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2019

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)			PERSENTASE RUANG KELAS (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BAIK	105	94	201	24,53	24,74	44,28
RUSAK RINGAN	310	270	243	72,43	71,05	53,52
RUSAK BERAT	13	16	10	3,04	4,21	2,20
JUMLAH	428	380	454	100,00	100,00	100

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.22 Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4 sampai 6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah TK dan sederajat berjumlah 56 sekolah, pada tahun 2019 menjadi 128 sekolah. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di kota Dumai semakin meningkat.

Tabel 2.42 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013 - 2019

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	56	56	79	79	101	128	128

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.23 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013-2019
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

10. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

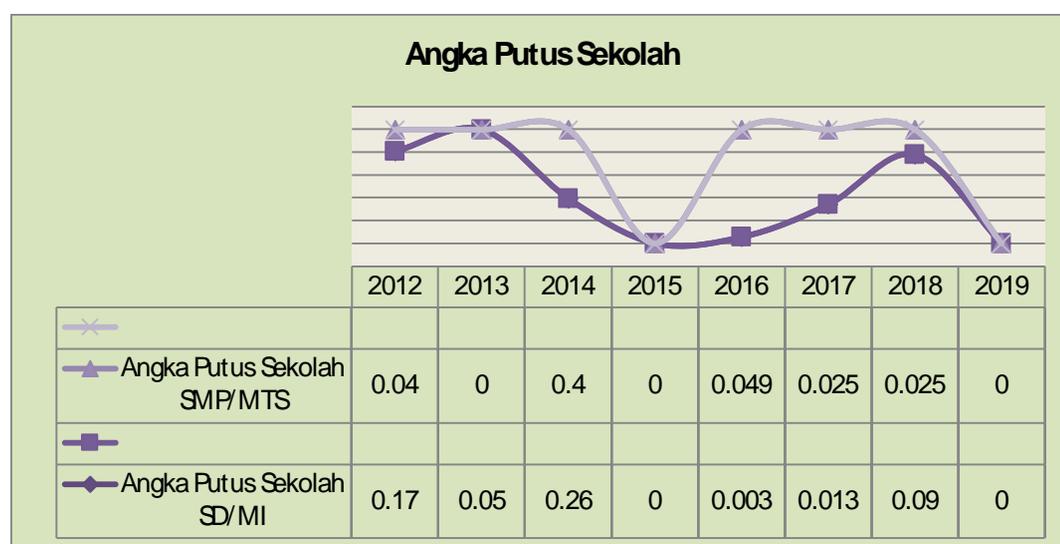
Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2014, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan, artinya persentase siswa yang putus sekolah semakin besar dan dalam kurun waktu antara 2015 hingga tahun 2019 tren perkembangan angka sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penurunan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2012 adalah sebesar 0,17%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,26% dan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,00%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2012 angka putus sekolah adalah sebesar 0,04%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,40% dan pada tahun 2019 angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,00%.. Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2015, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut.

Untuk angka putus sekolah SD/MI/ dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2012-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.43 dan Gambar 2.24 berikut.

Tabel 2.43 Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013	0,09	0,00
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025	0,025	0,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

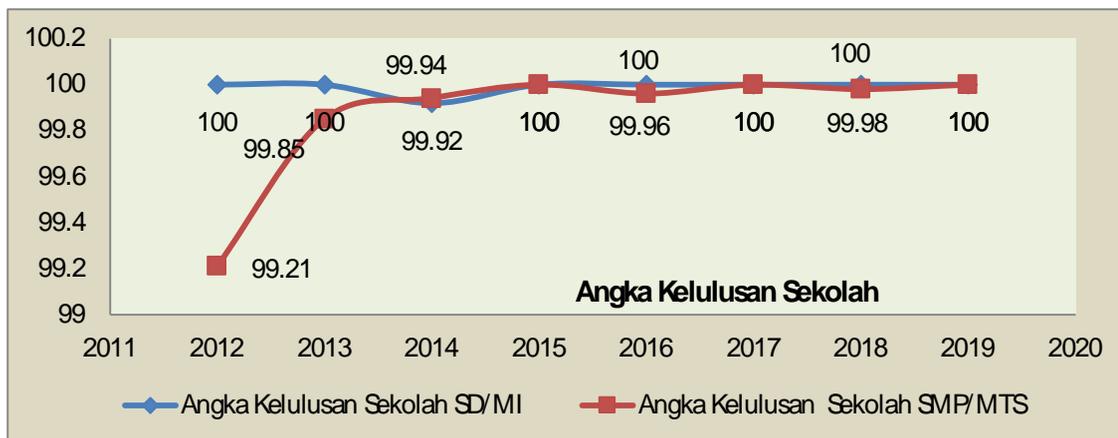
11. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2019, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2012 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100% namun tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 99,92%, dan pada tahun 2019 naik kembali angka kelulusan menjadi 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2012 angka kelulusan 99,21% dan pada tahun 2019 angka kelulusan adalah sebesar 100%.

Tabel 2.44 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kelulusan Sekolah SD/MI	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kelulusan Sekolah SMP/MTS	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	100,00	99,98	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kkebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.25 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

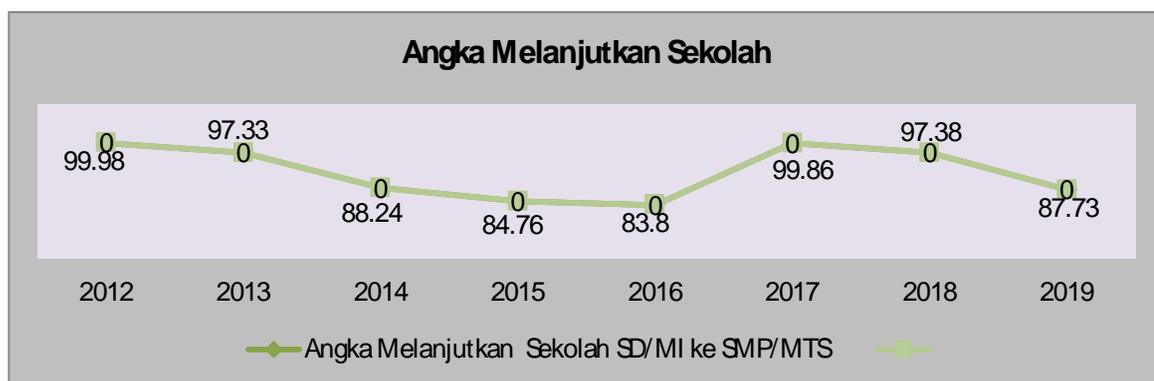
12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2012 hingga 2019 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2012 dengan nilai 99,98%. Pada tahun 2019 angka melanjutkan menurun dari tahun sebelumnya dari 97,38% menjadi 87,73%. Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan mulai meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

**Tabel 2.45 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2012-2019**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	99,86	97,38	87,73

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



**Gambar 2.26 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2012-2019**

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2015-2018

Angka Partisipasi Sekolah (tahun)	2015	2016	2017	2018
7-12	99,61	99,11	99,46	100
13-15	95,51	93,82	95,23	95,88
16-18	67,85	74,02	81,03	72,42

(Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2019)

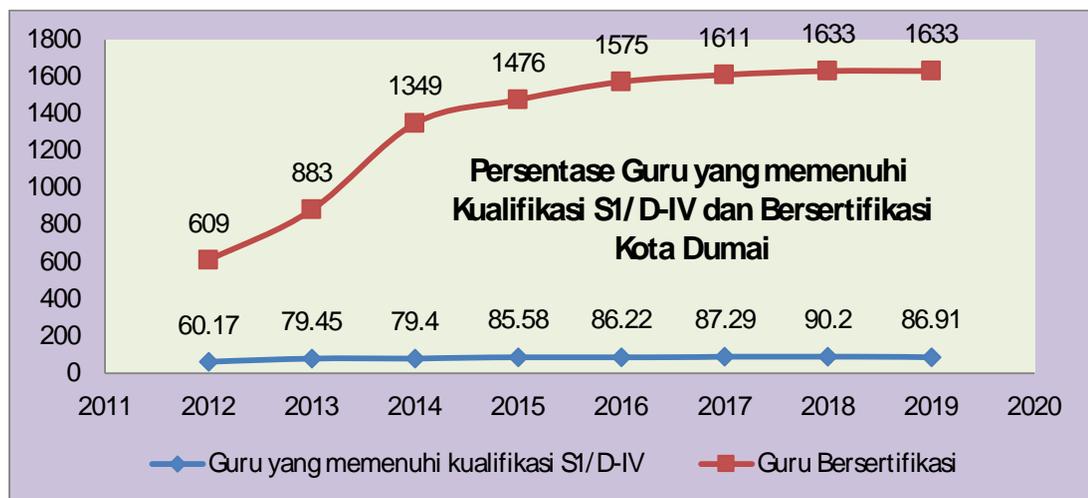
13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 60,17%, dan pada tahun 2019 menjadi 89,91.

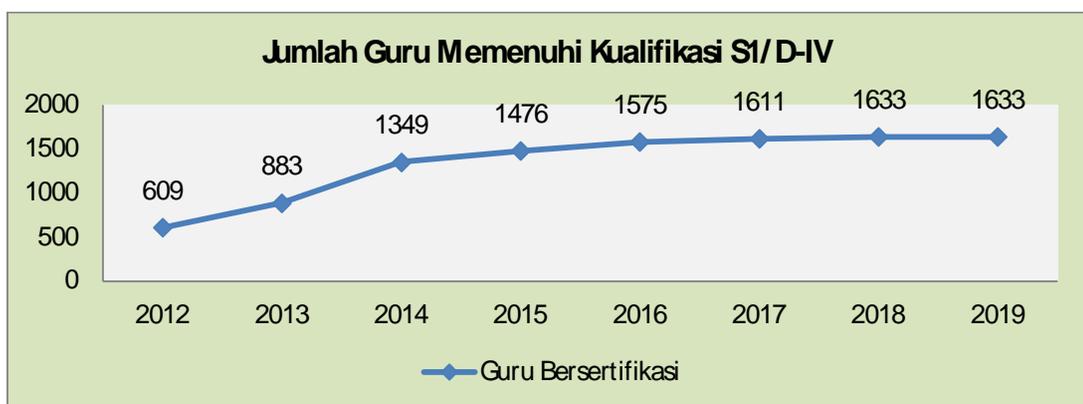
Tabel 2.47 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	87,29	90,20	86,91
Guru Bersertifikasi	609	883	1.349	1.476	1.575	1.611	1.633	1.633

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.27 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.28 Guru Bersertifikasi Tahun 2012-2019
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau murid, serta mempersiapkan murid untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

B. Kesehatan

1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

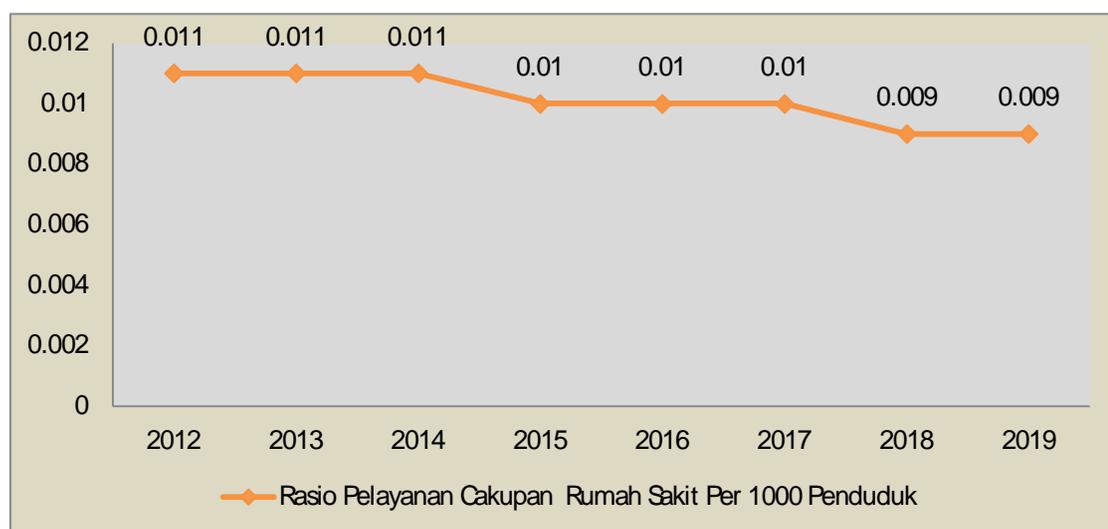
Pada tahun 2012-2019 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe C yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2012-2019 tersaji pada Tabel 2.47 gambar 2.33.

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2012 adalah sebesar 0,011, tahun 2019 sebesar 0,009. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2012 ke tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2019, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,009 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.48 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah Penduduk	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019, diolah)



Gambar 2.29 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

2. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

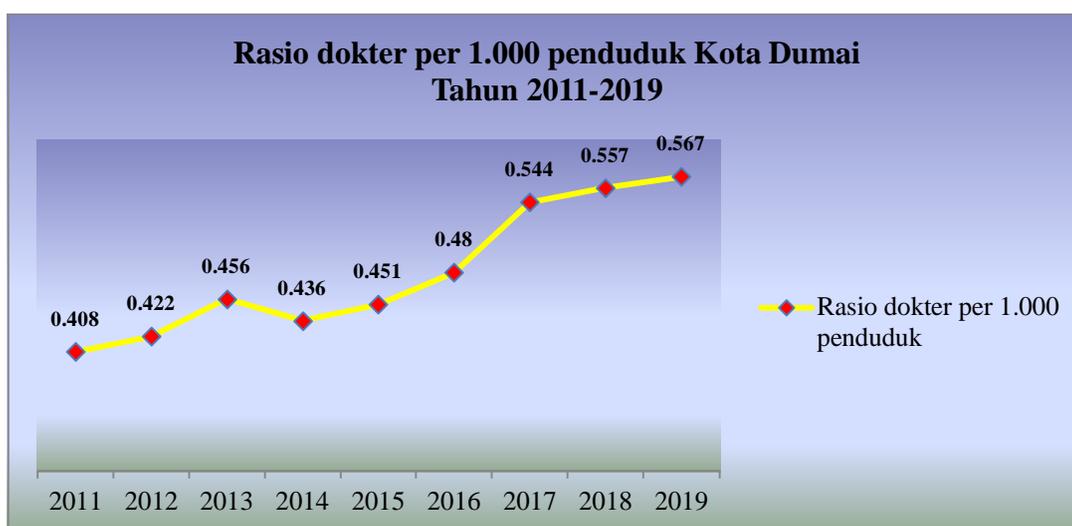
Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2019 mengalami fluktuasi, dari 106 dokter pada tahun 2011 menjadi 175 dokter pada tahun 2019.

Tabel 2.49 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokter	106	113	125	122	129	140	162	169	175
Jumlah penduduk	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812
Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544	0,557	0,567

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2019 adalah sebesar 0,567 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,567 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 1765 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, namun penambahan jumlah dokter yang melayani tidak seimbang dengan penambahan jumlah penduduk.



Gambar 2.30 Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2019

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

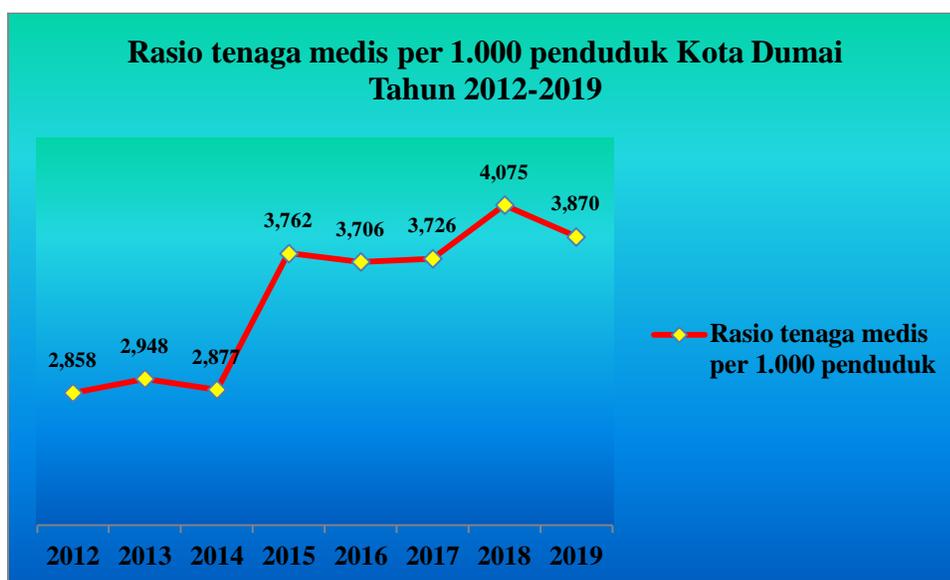
3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis di Kota Dumai meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2012 sampai dengan 2019, menunjukkan peningkatan dari 2,858 menjadi 3,870. Berikut ini tabel 2.50 dan Gambar 2.31 yang menunjukkan perkembangan rasio tenaga medis di Kota Dumai.

Tabel 2. 50 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tenaga Medis	766	808	806	1076	1082	1109	1236	1370
Jumlah penduduk	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	2.858	2.948	2.877	3.762	3.706	3.726	4.075	3.870

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)



Gambar 2.31 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain di Provinsi Riau seperti dari Bengkalis,

dan Rokan Hilir. Pada tahun 2019 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.370 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 39 orang, dokter umum sebanyak 100 orang dan dokter gigi sebanyak 22 orang. Jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 134 orang dari tahun 2018. Dengan demikian pada tahun 2019 rasio dokter spesialis sebesar 22 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 57 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 13 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.51 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai

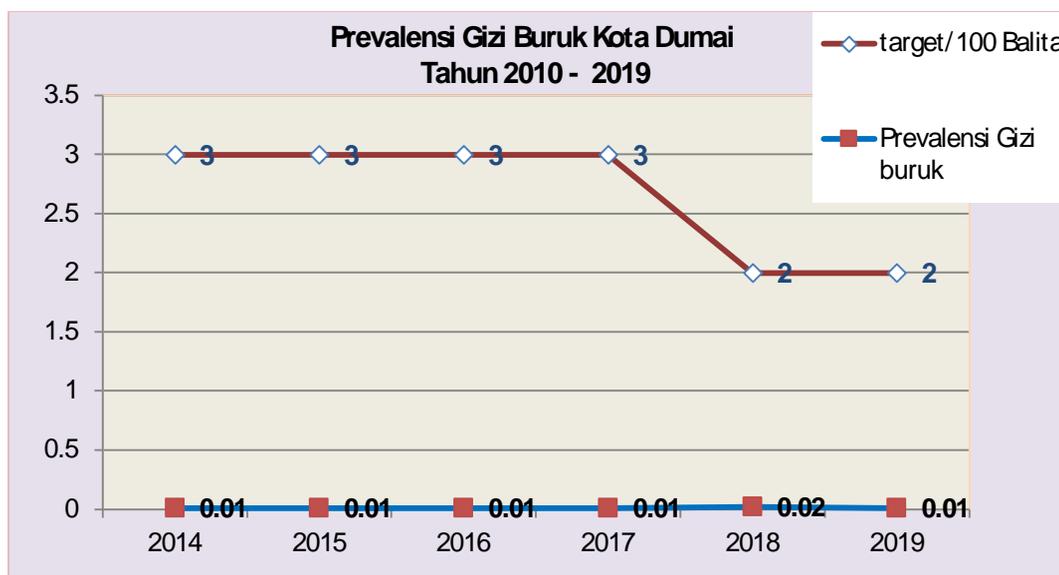
Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Dokter Spesialis	36	32	39
Dokter Umum	72	80	86
Dokter Gigi	23	21	19
Perawat	435	485	481
Bidan	331	336	365
Apoteker	38	21	19
Asisten Apoteker	19	37	43
Gizi	25	25	28
Sanitasi	10	9	10
Kesehatan. Masyarakat	52	67	60
Teknisi Medis	68	67	78

(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2020)

Permasalahan penduduk pendatang atau ilegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau ilegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2019 kasus balita dengan gizi buruk meningkat menjadi 7 kasus di Kota

Dumai, sehingga prevalensi balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0,01%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2019 ditemukan 7 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Bukit Timah 1 kasus, 1 kasus di Jaya Mukti, 1 kasus di Bukit Kayu Kapur, 2 kasus di puskesmas Purnama, 1 kasus di puskesmas sungai sembilan. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 6 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2019 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang (ilegal) tersebut. Para penduduk pendatang (ilegal) pada umumnya jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang ilegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP.



Gambar 2.32. Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2019
(Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020)

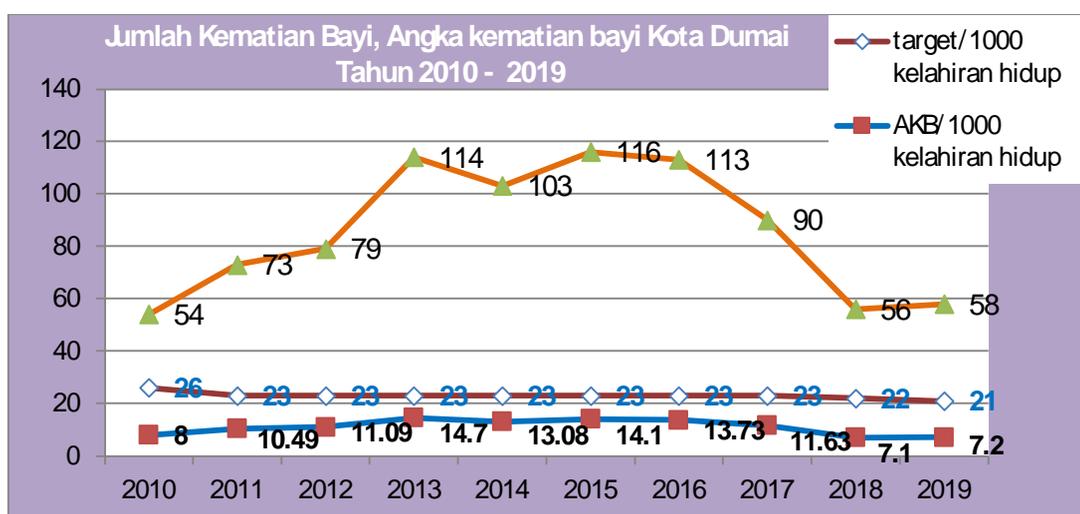
Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap

bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

4. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2010 – 2018 realisasi capaian Angka Kematian Bayi adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2019 pada Gambar 2.33. Pada tahun 2019 angka kematian bayi mengalami meningkat dari tahun 2018, dari 7,1% menjadi 7,2%.

Adapun Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia 16 kasus, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 4 kasus. Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi di kota Dumai ada 58 kematian dengan angka kematian bayi 7,2/1000 kelahiran hidup.



Gambar 2.33 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2019

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan

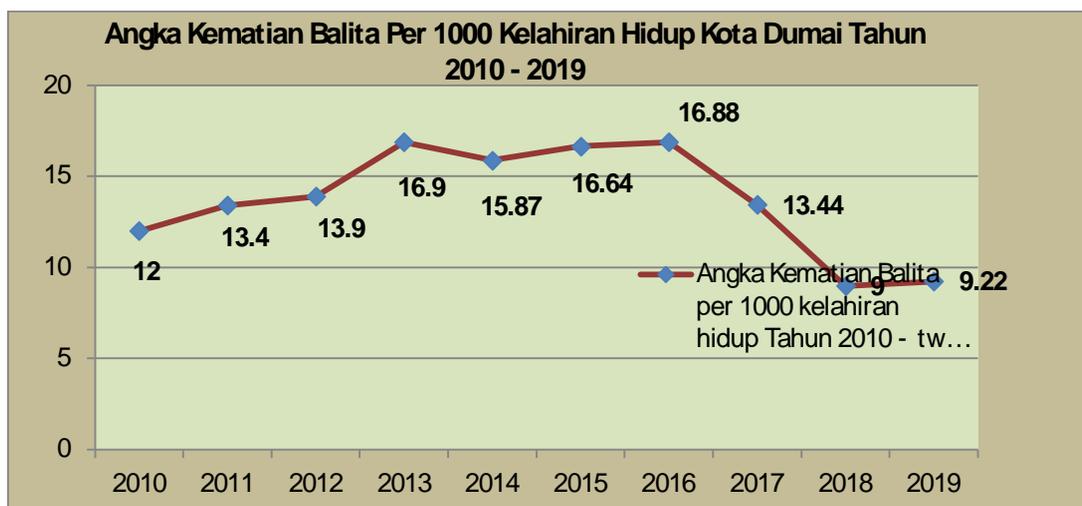
kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

5. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 56 kasus dari 7.886 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kehidupan bayi di Kota Dumai sebesar 7.886 jiwa.

6. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 9 / 1000 kelahiran hidup di tahun 2018 menjadi 9,2/1000 kelahiran hidup di tahun 2019. Tahun 2019 balita yang meninggal di kota Dumai ada 74 kematian dengan angka kematian balita sebesar 9,22/1000 kelahiran hidup dari target 28/1000 kelahiran hidup seperti yang tersaji pada Gambar 2.34



Gambar 2.34 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2010-2019
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

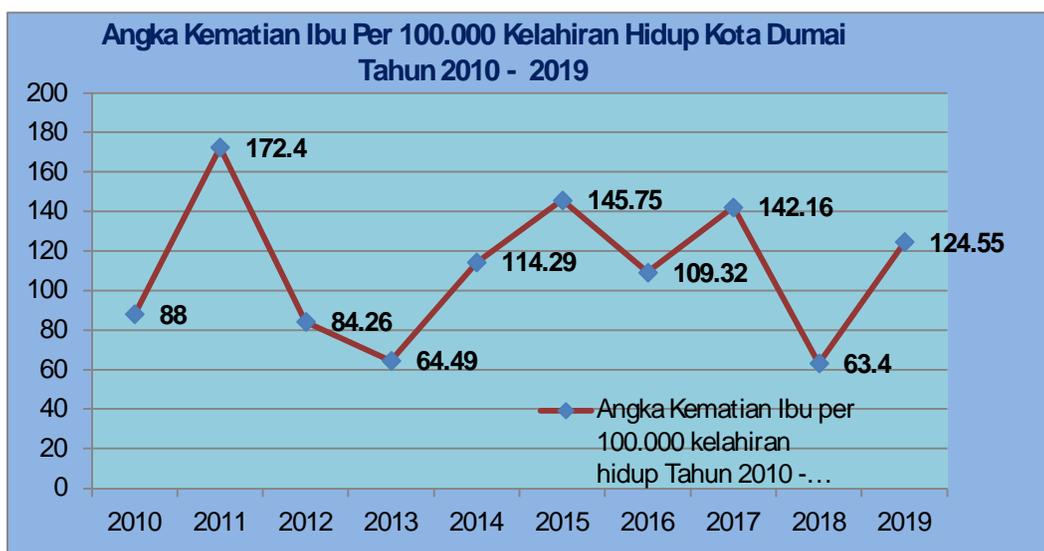
7. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklamsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklamsi/pre eklamsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.35, adapun angka kematian ibu melahirkan tahun 2019 adalah sebanyak 10 kematian ibu, sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup dari target 110/100.000 kelahiran hidup, hal ini menunjukkan pada tahun 2019 angka kematian ibu telah melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun penyebab kematian ibu didominasi oleh kasus

perdarahan ada 7 kasus, gangguan system peredaran darah 2 kasus dan hipertensi dalam kehamilan 1 kasus.



Gambar 2.35 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2019

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada kedua indikator tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di kota Dumai.

8. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

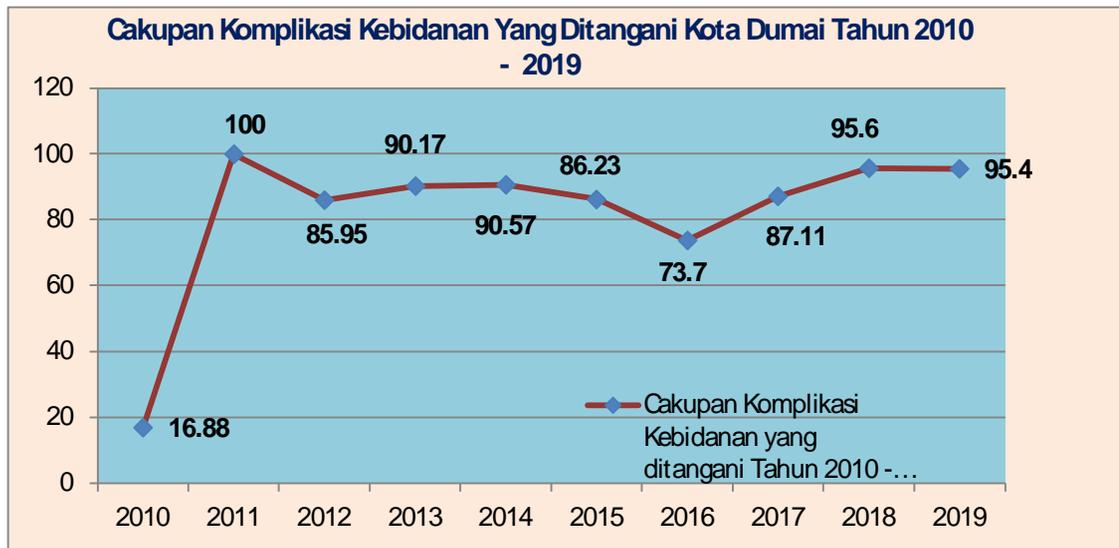
Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2010 hingga 2019 telah mencapai target indikator kinerja tahun 2019 dengan cakupan 95,4% dari target 90%.

9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2010 sampai 2019 cenderung meningkat. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.

Gambar 2.36 di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2010 sampai 2019. Pada tahun 2010 angka cakupan tersebut sebesar 16,88%, dan pada tahun 2019 naik menjadi 95,4%.



Gambar 2.36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2011 sampai 2019 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Untuk cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Pada tahun 2012 sampai dengan 2019, cakupan kelurahan UCI telah mencapai 100%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dari 33 kelurahan di kota Dumai diharapkan mencapai UCI Universal Child Immunization hanya 31 kelurahan yang mencapai UCI (93,93%). Target UCI

yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini tabel cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2010 – 2019.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi di desa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai , dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak.

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi

berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan.

Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di kota Dumai tersaji pada tabel sebagai berikut :

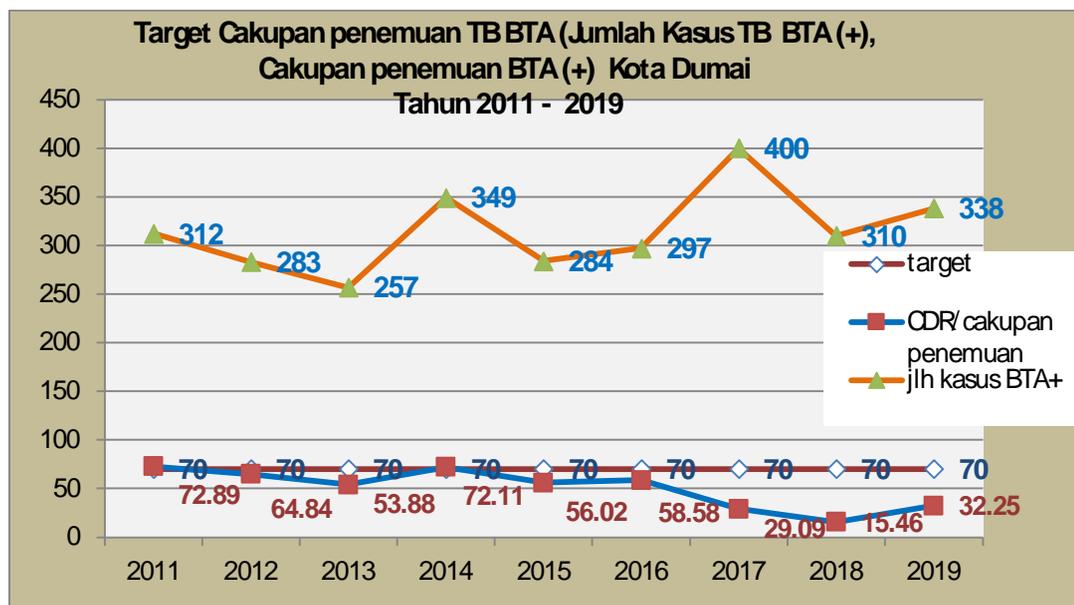
Tabel 2. 52 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2019

No	Jenis Imunisasi	Tahun
		2019
1	BCG	73,00
2	Campak	97,3
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	97,8
4	Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4	96,6
5	Hepatitis B1, Hepatitis B2 dan Hepatitis B3	102,2

(Sumber: Dumai dalam angka tahun 2019)

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di kota Dumai berfluktuasi selama kurun waktu 2011-2019. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Permenkes No 4 tahun 2019, yang menargetkan cakupan sebesar 100% pada tahun 2019, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Dumai belum mencapai target nasional. Berikut ini cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang disajikan dalam gambar 2.37 di bawah ini:



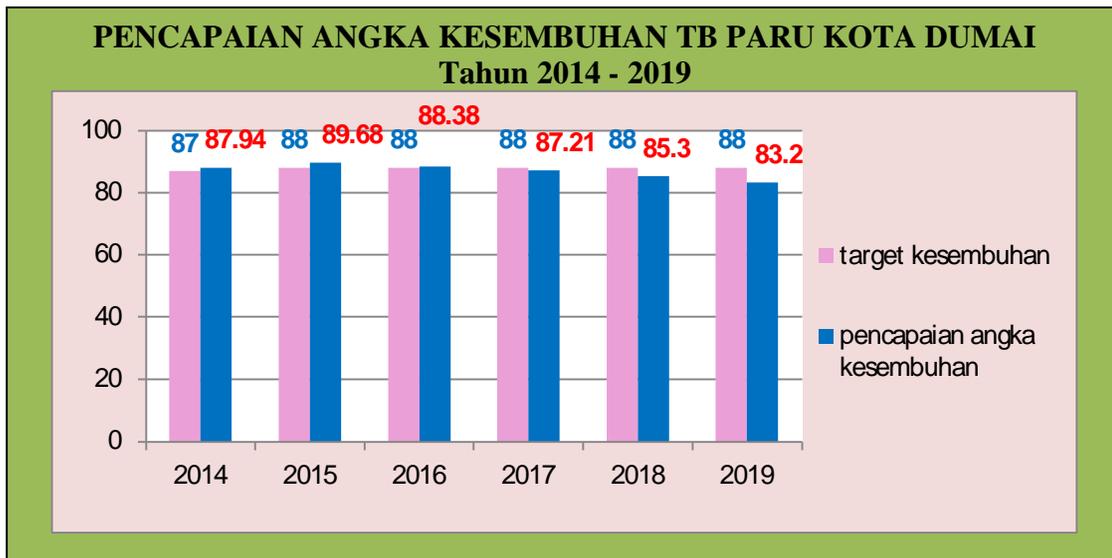
Gambar 2.37 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2020)

Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Penanganan kasus TBC ini perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Karena penderita harus minum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus.

Faktor kebosanan dan kejenuhan akan timbul. Untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin minum obatnya.

Pada tahun 2019 cakupan penemuan TB Paru BTA positif yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan bakteriologis ditemukan 338 penderita BTA positif dari 1.048 kasus yang diperkirakan ada di kota Dumai, jadi hanya ditemukan 32,25%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kinerja cakupan penemuan penderita TB Paru BTA positif dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya. Pada tahun 2019 dari total 310 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 83,2%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 85,3%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Apabila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2019 belum mencapai target. Pencapaian angka

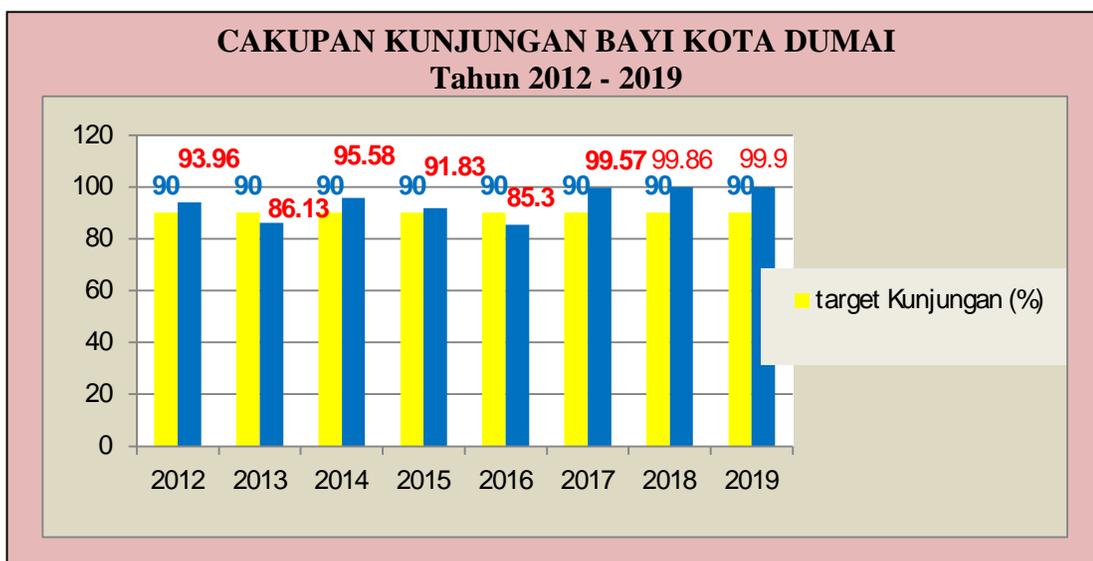
kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.



Gambar 2.38 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2019
(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2020)

12. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi sebesar 93,96% dan pada tahun 2019 sebesar 99,9%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.



Gambar 2.39 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

13. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum

memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.53 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2019

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	12
	5. Bukit kayu Kapur			
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	9
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	14
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	10. Bukit Timah	√		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2019 telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.53. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.53. Sedangkan untuk kondisi puskesmas keliling dan ambulans yang ada di puskesmas se Kota Dumai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53 Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah puskesmas	9	9	10	10	10	10	10	10
Jumlah seluruh kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.54 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2011	259.913	9	3,46
2012	268.022	9	3,36
2013	274.089	9	3,28
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.55 Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2019

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
1	Dumai Kota	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulan mitsubishi	1 unit	2005	Kondisi rusak berat
		Pusling/Toyota Kijang	1 unit	1995/APBD Kab Bengkalis	Kondisi rusak berat
		Ambulan PSC Toyota Hiace	1 unit	2017	Baik
		Ambulan PSC APV	1 unit	2017	Baik
2	Bumi Ayu	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
3	Dumai Barat	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
4	Bukit Timah	Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak sedang
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
5	Bukit Kapur	Pusling/Toyota Kijang LGX	1 unit	2002/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak berat
		Pusling/Isuzu	1 unit	2003/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak berat
		Ambulance/Isuzu ELV	1 unit	Hibah CSR Pertamina 2011	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulan PSC Inova	1 unit	2017	Baik
6	Sungai Sembilan	Pusling/Toyota Kijang	1 unit	2002/APBD Kota Dumai	Kondisi rusak berat
		Pusling/Isuzu	1 unit	2006/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Duma	Baik

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulan PSC Inova	1 unit	2017	Baik
		Ambulan Hiluck Pick UP	1 unit	2018	Baik
7	Medang Kampai	Pusling/KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
8	Jaya Mukti	Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Dumai	Rusak berat
		Ambulance Toyota Hilux	1 unit	2018	Baik
9	Purnama	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
10	Bukit Kayu Kapur	Ambulance/Suzuki APV	1 unit	2012/APBN-P (Hibah Pusat)	Baik
		Ambulance/Mitsubishi	1 unit	2015 (Hibah Setda)	Baik

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

14. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.56 Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. Parit Pisang Mas
Dumai Kota	2. Rimba Sekampung
Bukit Kapur	3. Gurun Panjang
	4. Kayu Kapur
	5. Simpang Murini
Sungai Sembilan	6. Suka Damai
	7. Basilam Baru
	8. Simpang Pulai
	9. Kampung Sejati
	10. Sungai
	11. Sungai Teras
	12. Bulu Hala
Medang Kampai	13. Pelintung

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2012 sampai tahun 2019 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap, tetapi Kota Dumai mengalami pemekaran menjadi 33 kelurahan di Tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 2.57 berikut.

**Tabel 2.57 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai
Tahun 2012-2019**

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah puskesmas pembantu	13	13	13	13	13	13	13	
Jumlah seluruh kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	
Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

15. Akses Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu : puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana , kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki $\pm 45\%$ dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hamper miskin tahun 2019 sebesar 5.728 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkungannya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh Indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

16. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0,70%) ,Tahun 2017 (0,96%) dan pada tahun 2018 jumlah kasus HIV di kota Dumai secara kumulatif ada 260 kasus dengan prevalensi rate 0,79% terhadap penduduk beresiko HIV di kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di kota Dumai sejak tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa, 540 jiwa dan 18.305 jiwa . pada tahun 2019 prevalensi HIV di kota Dumai 1,27% dengan jumlah kasus HIV 298 penderita dari estimasi 23.433 penduduk yang beresiko. (sumber : profil Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2019).

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria kota Dumai Tahun 2017 s/d 2019 cenderung statis 0,01 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 3 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering

menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2019 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 992 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 321,2/100.000. dan jumlah kematian ada 3 kasus dengan CFR Case Fatality Rate sebesar 0,3%. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 992 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2019 Kasus penemuan TB di kota Dumai masih berkisar 32,2% yaitu ada 338 kasus dari 1048 kasus yang harus ditemukan di kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di kota Dumai. Pada tahun 2019 angka kesembuhan TB Paru sebesar 83,3% dari target 88%, dari 310 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 258 kasus.

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2019 sebanyak 8.338 penderita atau IR IR 270/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular.Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2019 Hipertensi tercatat 22.478 Penderita (33,6 %) dan Diabetes malitus tercatat 3.135 Penderita (89,1%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2019 kota Dumai melakukan

pelayanan kesehatan jiwa 404 (87,3%). Screening , pemeriksaan leher rahim pada tahun 2019 dilaksanakan pada 2.220 (4,5%) dari sasaran 49.589 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 137 kasus (6,2%) dan terdapat tumor 5 kasus (0,2%).

17. Indikator SPM Kesehatan

Tabel 2.58 Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

No	Indikator SPM	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	8.552
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.037
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.018
4	Pelayanan Kesehatan Balita	41.036
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.902
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	158.671
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.615
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.478
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3.135
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	404
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	2.852
12	Warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	636

(Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal, adapun realisasi persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 adalah sebesar 79,09%.

2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

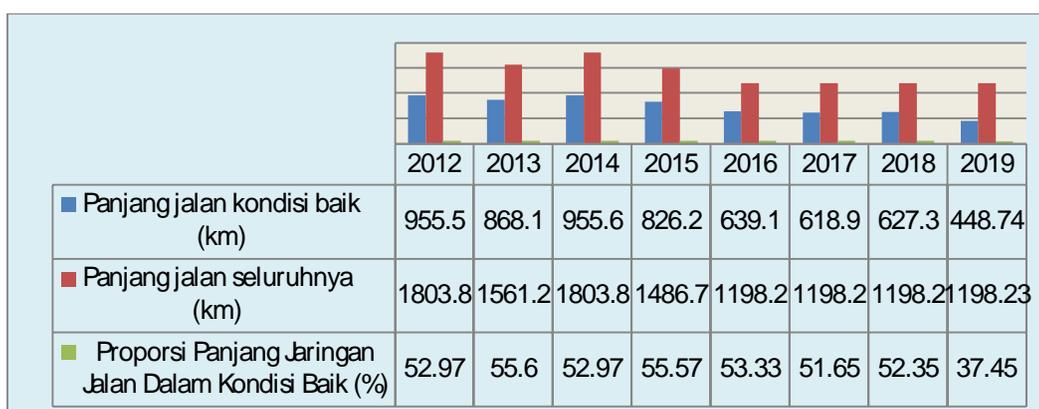
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.59 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan kondisi baik (km)	955,5	868,1	955,6	826,2	639,1	618,9	627,3	448,74
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.803,8	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,23
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	52,97%	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	51,65%	52,35%	37,45%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Tahun 2020 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu. Pada tahun 2014 turun menjadi 52,97%, kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 55,57%. Kembali mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 37,45% dan 52,35%. Di tahun 2018 kondisi ini menurun dikarena kesalahan dalam pengolahan data survey datda dasar jalan. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.40 Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.60 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2018 dan 2019. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik. Pada tahun 2019 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik terjadi penurunan dari 88,70% di tahun 2018 menjadi 60,04% pada tahun 2019. Begitu pula sebaliknya, pada tahun 2018 terjadi pengurangan panjang ruas jalan, baik dalam kondisi sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65.

Tabel 2.60 Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2018 dan 2019 per Kecamatan

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Bukit Kapur	171,67	77,57	51,06	51,03	38,86	26,17	1,954	16,89	79,79
Dumai Barat	180,58	92,08	78,02	21,52	30,06	32,50	4,163	33,48	68,63
Dumai Kota	61,26	51,10	47,25	5,04	9,843	2,95	3,088	2,18	1,28
Dumai Selatan	132,42	99,67	90,65	11,62	18,92	9,70	1,14	11,41	21,68
Dumai Timur	142,31	95,92	93,41	26,62	31,59	9,79	3,70	10,08	13,60
Medang Kampai	291,86	142,1	33,46	87,86	21,73	40,37	16,05	21,50	220,606
Sungai Sembilan	218,14	62,48	26,44	39,14	10,23	58,85	5,66	57,52	174,74

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020)

3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

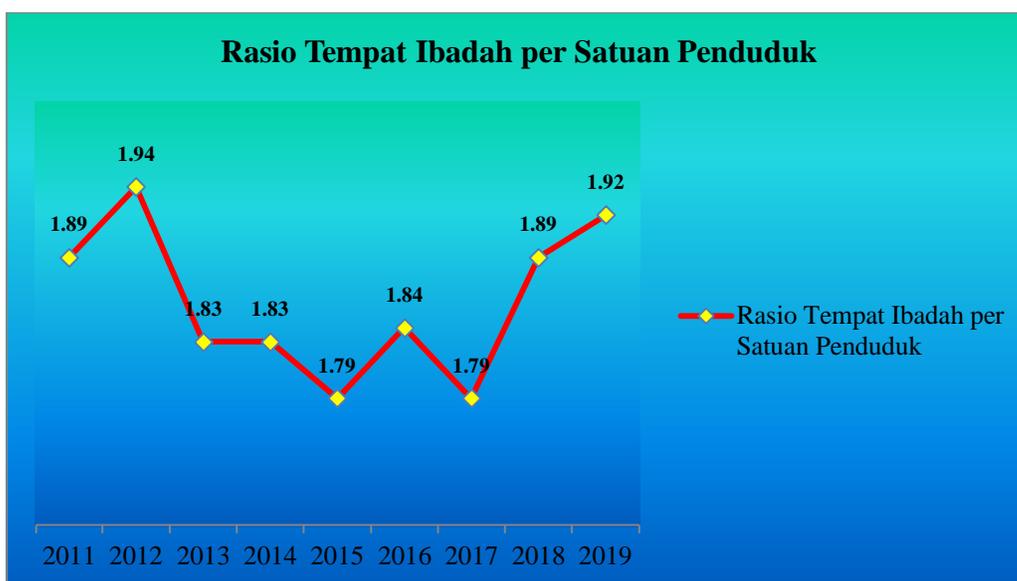
Tabel 2.61 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 - 2019

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,89	1,94	1,83	1,83	1,79	1,84	1,79	1,89	1,92
Masjid	206	211	196	196	216	216	217	225	221
Mushola	217	219	217	217	216	216	210	242	231
Gereja Kristen	52	71	73	73	74	80	81	81	81
Gereja Katolik	4	6	6	6	8	6	6	6	6
Pura	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Klenteng	1	12	12	12	12	10	10	10	47

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif seperti yang

ditunjukkan dalam Gambar 2.41 Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.41 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Hingga tahun 2019 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,92. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

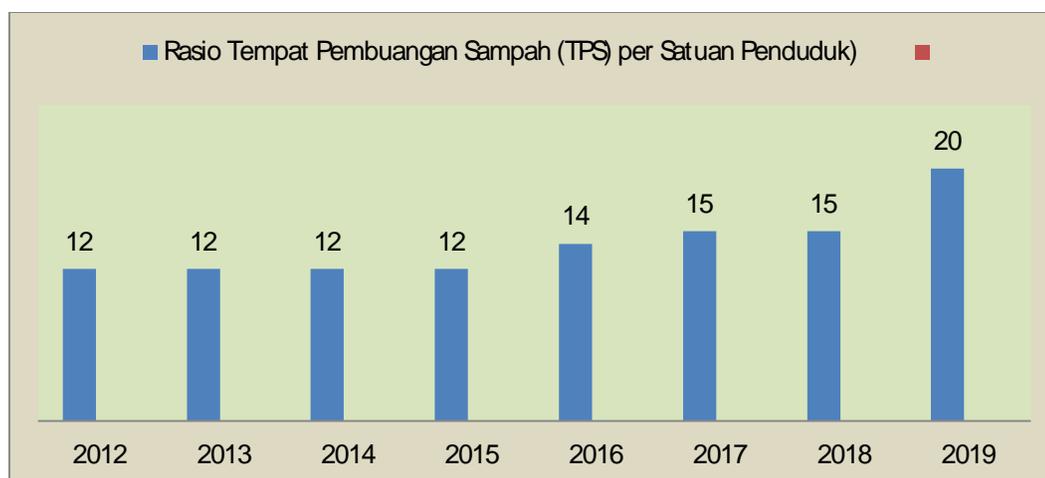
Dalam rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2019 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami

peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel 2.62 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS	20 TPS

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)



Gambar 2.42 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

5. Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

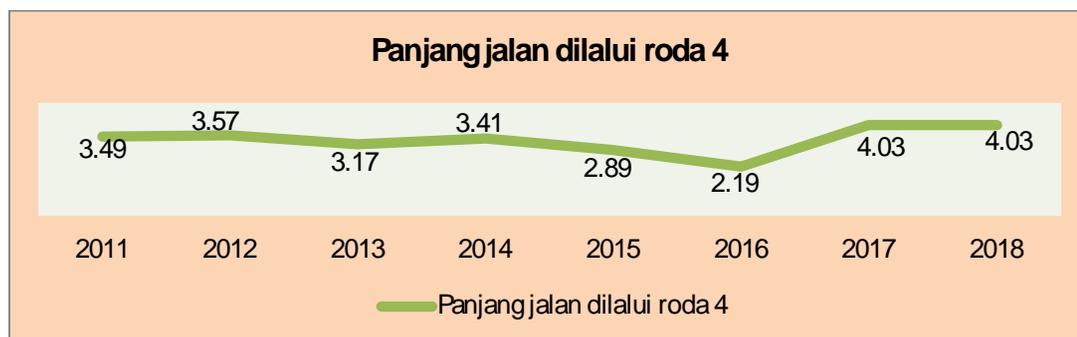
Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.63 Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan seluruhnya (km)	907,19	955,53	868,07	955,550	826,19	639,05	1.198,23	1.198,23
Jumlah Penduduk	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303 292
Panjang jalan dilalui roda 4	3,49	3,57	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03	4,03

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 3,49 pada tahun 2011 menjadi 4,03 di tahun 2018. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan Gambar maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai pada Gambar 2.42 seperti dibawah ini.



Gambar 2.43 Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2011-2018

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2019, diolah)

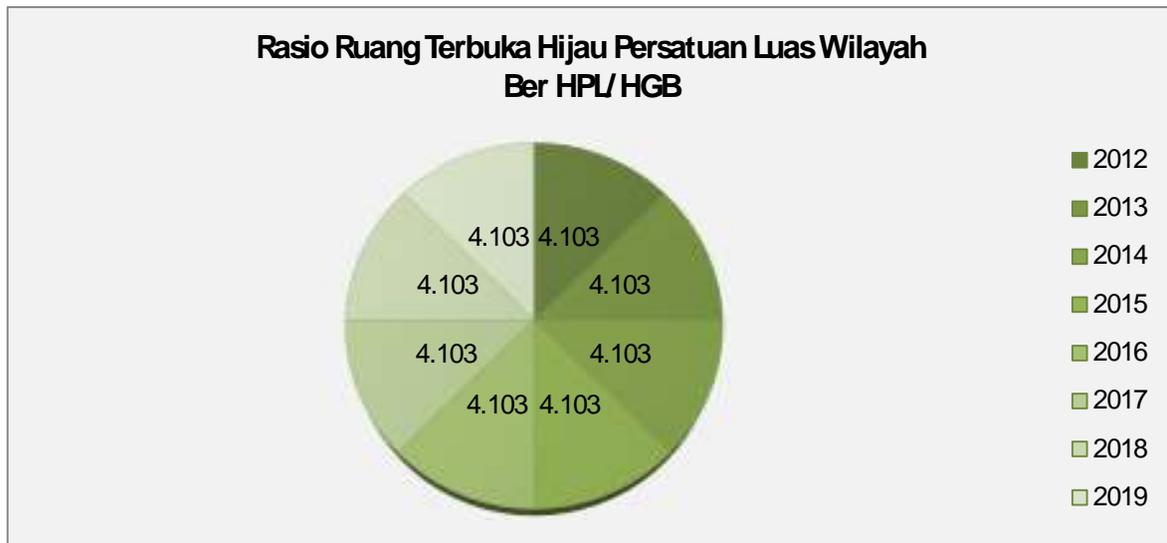
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai.

Tabel 2.64 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)



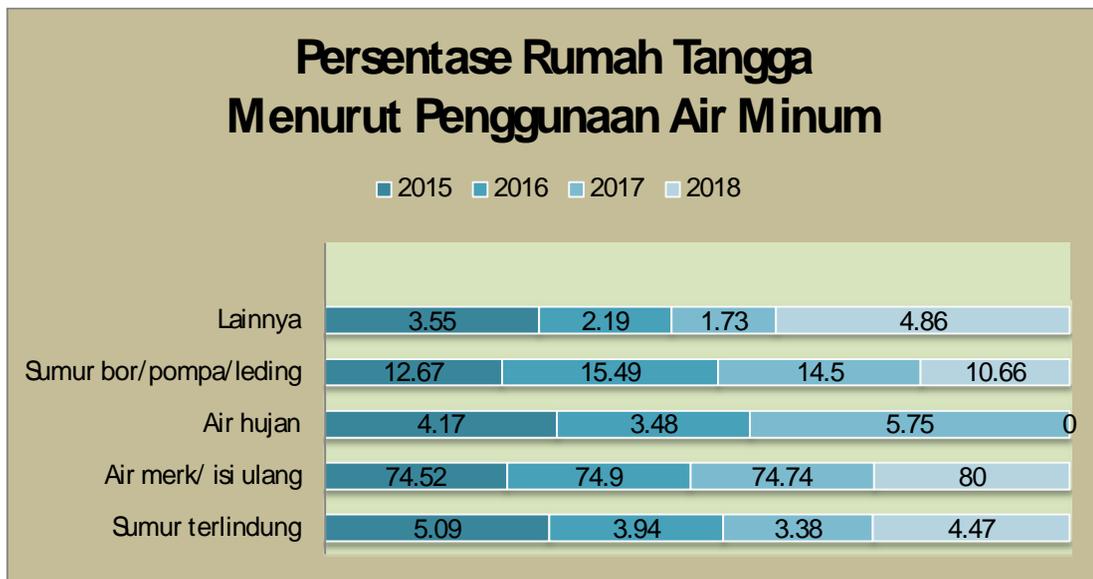
Gambar 2.44 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar diatas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,103 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019.

- D. Perumahan dan Pemukiman
 - 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Adapun perkembangan penggunaan sumber air tersebut dari tahun 2015-2018 tersaji pada Gambar 2.45.

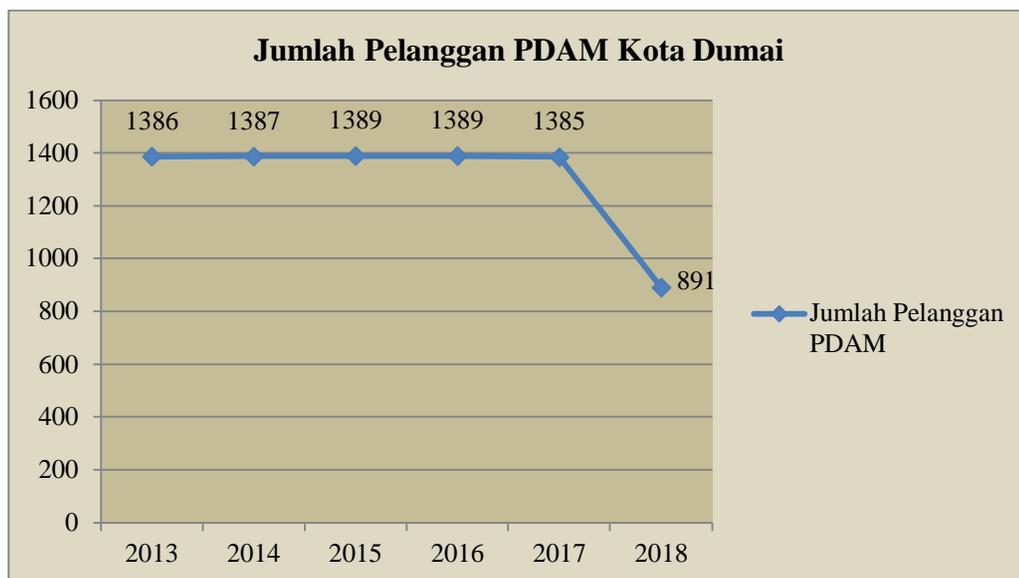


Gambar 2.45 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2015-2018

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari Gambar 2.45 diatas terlihat bahwa persentase penggunaan air merk/isi ulang sebagai sumber utama air minum cenderung mengalami peningkatan dari 74,74% pada tahun 2017 menjadi 80% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Gambar 2.46. Lebih dari 59% pelanggan PDAM di tahun 2018 merupakan pelanggan non niaga. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kota Dumai belum belum menjangkau seluruh penduduk kota.



Gambar 2.46 Jumlah Pelanggan Kota Dumai
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	54.873	59.766	64.162	68.432	94.761	101.245
Jumlah rumah tangga	68.522	70.027	71.492	72.977	83.863	89.558
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	80,08	85,35	89,75	93,77	88,50	88,46

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.62 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2018 sebanyak 88,46% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

3. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Data yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan draft rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga

dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,6 Ha kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.66 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Laksamana Rimbas	Dumai Kota	Laksamana	21,55
		Rimba Sekampung	
Dumai Kota	Dumai Kota	Dumai Kota	6,32
Bukit Bintan Jadi	Dumai Kota dan Dumai Selatan	Bukit Datuk	21,46
		Bintan Sukajadi	
STDI Rimbas	Dumai Barat dan Dumai Kota	Simpang Tetap Darul Ihsan	13,97
		Rimba Sekampung	
Pangkalan	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	11,30
Buluh Kasap	Dumai Timur	Buluh Kasap	7,15
Mukti Palas	Dumai Ttimur	Jaya Mukti	21,00
		Tanjung Palas	
Teluk Binjai	Dumai Timur	Teluk Binjai	9,16
Bumi Ayu	Dumai Selatan	Bumi Ayu	5,61
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	10,08
Total			127,60

(sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020)

Dari tabel diatas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung persentase lingkungan permukiman kumuh kota Dumai tahun 2018 yaitu 0,03 %. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2018 yaitu 47, 67 %.

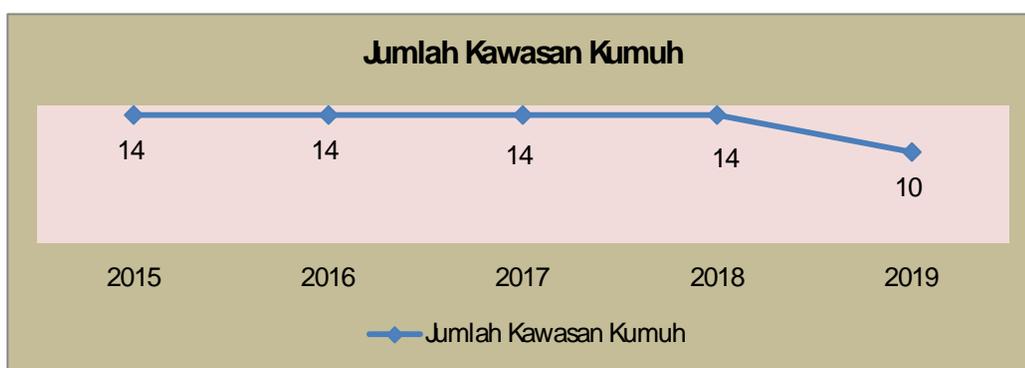
4. Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, terdapat penurunan jumlah kawasan kumuh dari tahun sebelumnya dari 14 kawasan kumuh pada tahun 2018 menjadi 10 kawasan kumuh pada tahun 2019 dan rumah tidak layak huni berjumlah 1.412 unit pada tahun 2019, yang tersaji pada Tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kawasan Kumuh	14	14	14	14	10
Rumah Tidak Layak Huni	NA	NA	2.432	1.884	1.412

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2020)



Gambar 2.47 Jumlah Kawasan Kumuh

(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2020)



Gambar 2.48 Rumah Layak Huni

(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2020)

5. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

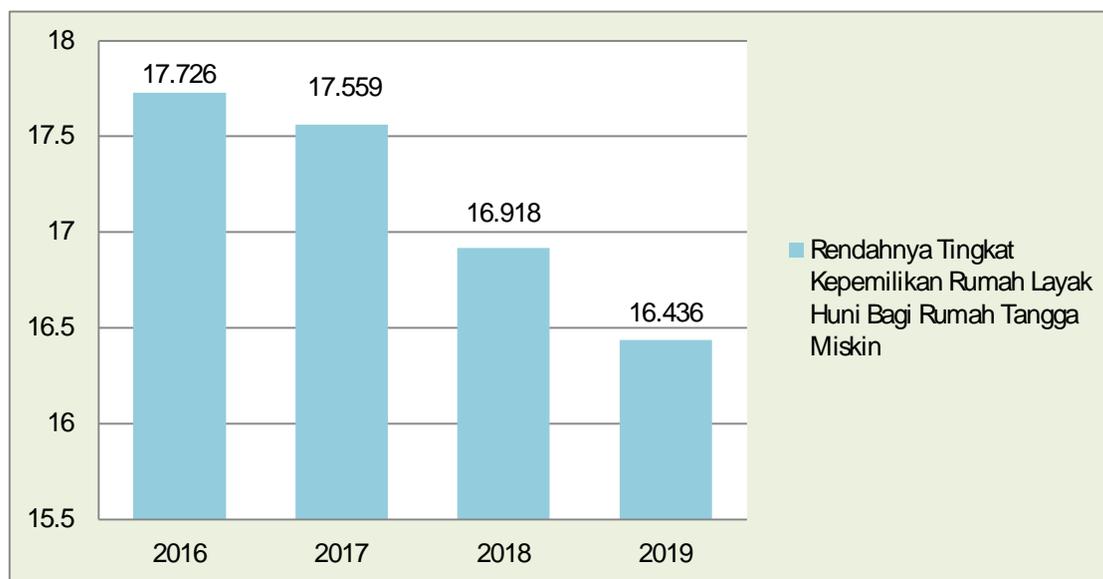
Berdasarkan data dari Dumai dalam angka tahun 2019 Jumlah kepala keluarga kota Dumai tahun 2018 yaitu 94.965 kk dimana dapat diasumsikan satu kk sama dengan satu rumah, pada tahun 2019 kepemilikan rendahnya

kepemilikan rumah layak huni yaitu 16.436 kk terlampir pada tabel 2.68 sebagai berikut:

Tabel 2.68 Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	17.726	17.559	16.918	16.436

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2020)



Gambar 2.49 Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2020)

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.69 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Polisi Pamong Praja	99	91	86	90	98	96	94	89
Jumlah penduduk per 10.000*	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,06
Rasio jumlah pamong praja	3,69	3,32	3,07	3,15	3,36	3,23	3,1	2,96

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin naik terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

2. Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Dumai.

Tabel 2.70 Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Linmas	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.590
Jumlah penduduk per 10.000*	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	28,02	28,70	28,70
Rasio linmas	59,10	58,01	56,87	55,92	54,78	56,74	55,40	55,40

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang cakupan petu di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten/kota. adapun reliasai cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan

social kemasyarakatan. Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota merupakan perbandingan antara Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dengan Luas wilayah kabupaten/kota. adapun realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota adalah sebesar 3,50%.

5. Persentase Penegakan PERDA

Persentase Penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah pelanggaran PERDA pada tahun 2019 adalah sebesar 100%. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dengan target Pengawasan sebesar 200 pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

6. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah kelurahan.

Tabel 2.71 Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pos Siskamling	173	173	173	173	173	173	173	173
Jumlah kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33
Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan jumlah siskamling disetiap kelurahan di Kota Dumai selama kurun waktu 2012-2019.

7. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	92%	90%	95%	96%	75%	81%	92%	90%

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

Pada tahun 2019 terdapat 90% persentase cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dalam penertiban PKL.

8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran k3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP. adapun reliasasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah sebesar 60%.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2012 ada sebanyak 231 kasus dan pada tahun 2019 kasus pelanggaran K3 di kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 166 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	231	236	235	238	238	155	156	166

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai,petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.584 dan tahun 2019 menjadi 1.590. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.74 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.590

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

10. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2019 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	25	23	29	19	8	8

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020)

11. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2012 hingga 2019 berjumlah 1 (satu) kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan pembinaan politik daerah	-	1 Keg	-	1 Keg	1 Keg.	1 Keg.	-	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020)

12. Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman telah terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 25 unit rumah yang terbakar yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kejadian kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 66 unit dan 26 unit. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banyak kejadian kebakaran rumah penduduk	34 unit	38 unit	66 unit	26 unit	10 unit	25 unit

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

F. Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarjinalkan di Kota Dumai. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2013-2019 tersaji pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	TAHUN							SAT
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial								
Penduduk rawan Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	35	35	8	8	4	4	12	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	106	106	27	27	12	12	93	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	9,423	15.882	17.998		KK
4). Bayi Terlantar	18	18	32	32	334	307		Jiwa
5). Anak Terlantar	87	87	151	151	2292	2132		Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	191	760	760	595	571	55	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	392	122	122	423	424		Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda								Jiwa
9). Tuna Susila	96	96	356	356				Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	61	38	38				Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159	159					Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	23	30	30	196	196		Jiwa
Jumlah Panti Asuhan								
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	12	11	11	11		Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja			1					Buah
3). Panti Sosial Tresna Wirda				1	1	1		Buah
Rumah singgah		1	1	1	1	1		Buah
Jumlah PMKS	182,074	183,963		182,009	19.738	21.644		Buah
1). PMKS Yang Tertangani	60,194	61,124		60,453	127	87	264	Orang
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	61,686	61,715		61,103	19.738	21.644		Buah
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan	60,194	61,124		60,453	12.389	14.430		KK
4). Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	97.58 %	99.04 %		98.99 %	62.77 %	66.67 %		
5) Persentase	33.06 %	33.23 %		33.21 %	643.43	401.96	90.92	

Uraian	TAHUN							SAT
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PMKS yang tertangani					%	%	%	
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	64	64	66	66	66	66	66	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	30	30	30	34	32	52	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	12	12	12	12	11	11	LKS
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	5	5	5	6	14	30	31	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	Lembag a
8). Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	-	-	Buah
9). Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	5	5	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	8	8	8	8	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	Orang
12). Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-	-	Buah

(Sumber: Dinas Sosial Tahun 2020)

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Target dari indikator sasaran ini yaitu 50% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2019 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Persentase PMKS yang tertangani

Target dari indikator sasaran ini yaitu 27% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2019 yaitu 24,55% dengan capaian 90,92%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal.

Adapun kegiatan ini adalah memberikan pelatihan terhadap anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal sebanyak 12 orang. Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun kegiatan ini pada tahun 2019 telah melakukan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau sebanyak 68 orang. Kegiatan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan. Adapun kegiatan pada tahun ini Jumlah PMKS yang dilayani sebanyak 1 orang yaitu Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) yang ditangani langsung oleh Pekerja Sosial RPTC sedangkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 12 orang, Anak Korban Tindak Kekerasan sebanyak 2 orang, Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 50 orang , anak terlantar sebanyak 20 orang yang penanganan dan pendampingannya langsung dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial mulai dari tingkat Kelurahan, Polres dan Kejaksaan. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. Adapun kegiatan ini mengirimkan pecandu narkoba keanti rehabilitasi sebanyak 6 orang. Kegiatan Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. Adapun kegiatan ini mengembalikan Gepeng dan Penyakit lainnya ketempat asalnya sebanyak 93 orang.

- b. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 82% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2019 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE). Adapun kegiatan ini Kota Dumai memiliki target 70 kelompok usaha bersama (KUBE) dengan realisasi anggaran Rp. 59.498.200 atau 99.41% Kegiatan ini merupakan program Kementerian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

c. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 100% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 100% dengan capaian 100%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangku tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Adapun kegiatan ini pada tahun 2019 yaitu Penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Pada tahun 2019 Korban bencana yang telah menerima bantuan sosial di Kota Dumai melalui Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 54 KK.

2. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 6% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2019 yaitu 5,52% dengan capaian 69%.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) merupakan perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatat. adapun realisasi besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kinerja bersama (PB) pada tahun 2019 adalah sebesar 40%.

2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar. dan realisasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2019 adalah sebesar 40%.

3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Adapun realisasi dari besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019 adalah sebesar 75%.

4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,14	65,26	66,94		65,53	64,17	
PHK	101		19	18	32	46	28
Kasus PHK	101	11	19	18	32	26	17
Orang Terkena PHK	101	124		65 orang	75 orang	46	28
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Minimum	2.057.011	2.087.791	2.576.207	Berdasarkan PP 78 Tahun 2105 tantang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2105 tantang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2105 tantang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	
Rata-Rata Upah Minimum	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.372,50	2.886.655,44	3.118.453,87
Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha							
L. Usaha Angkutan, Penggundangan dan Komunikasi	6	9	11	16	Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kot		
L. Usaha Bangunan	102	35	39	41			
L. Usaha Industri Pengolahan	12	52	2	14			
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan	8	3	-	3			
Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	24	8	11	16			
L. Usaha Listrik, Gas dan Air	-	17	140	137			
L. Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dari Hotel	31	11	15	27			
L. Usaha Pertambangan dan Penggalian	1	15	5	7			
L. Usaha Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan	2	12	6	11			

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020)

5. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	1098	1308	315	1200	1210	2112	1020

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020)

6. Jumlah Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laki-laki	2,502	3,174	3,461	3,511	8,288	4.869	5.513
Perempuan	2,359	1,378	1,757	1,656	3,846	3.346	4.210
Jumlah	4,861	4,552	5,218	5,167	12,134	8.215	9.723

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 0,43 persen dari 8.215 di tahun 2018 menjadi 9.723 di tahun 2019. Berikut tabel sebagai berikut :

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2018 dan 2019

Uraian	2018	2019
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	64,17	69,28
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	6,04	6,47

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu 76 dan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sampai tahun 2019 yaitu 83,82 atau sebesar 107,46% Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, Kegiatan Sosialisasi pelayanan terpadu, Kegiatan Peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan,

Kegiatan Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Survey penerbitan perizinan.

**Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Dumai Tahun 2020**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (dalam %)
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp. 5.904,03,-	Rp. 5.937,39,-	100,57
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	83,82	107,46

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020)

7. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut.

**Tabel 2.84 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai
Tahun 2013- 2019**

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Keselamatan dan Perlindungan	195	151	165	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2019 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2019 tidak pernah disampaikan ke kabupaten/kota.

8. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota

Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun kota Dumai pada tahun 2019 yaitu sebanyak 36 pekerja. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	30	19	39	12	14	55	36

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020)

Data perusahaan wajib lapor sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		LK	PR	LK	PR
2011	121	1986	201	-	-
2012	125	5837	527	20	-
2013	186	8210	1113	114	1
2014	155	8912	1030	23	-
2015	232	10384	1075	11	-
2016	272	13923	1564	66	1

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2019 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR merupakan perbandingan antara jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Adapun realisasi proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 4 orang adalah sebesar 13,33%.

2. Rasio KDRT

Rasio KDRT merupakan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Adapun realisasi rasio KDRT sebesar 0,007%. dimana jumlah KDRT sebesar 7 kasus.

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja

perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2.986 dan pada tahun 2019 naik menjadi 5.273.

Tabel 2.87 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	5.202	5.201	5.273

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020)

4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 2.359 pada naik menjadi 45.315 pada tahun 2019. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan kota Dumai tahun 2011-2018.

Tabel 2.88 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi angkatan kerja perempuan	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	10.442	10.442	45.315

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020)

5. Pengarus Utamaan Gender

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Sampai tahun 2016 di Kota Dumai terdapat beberapa permasalahan terkait pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya:

- 1) Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Dumai, masih ada OPD yang belum melaksanakan/menyusun anggaran pembangunan

berdasarkan analisis gender pada program/kegiatan di OPD yang bersangkutan dengan rincian:

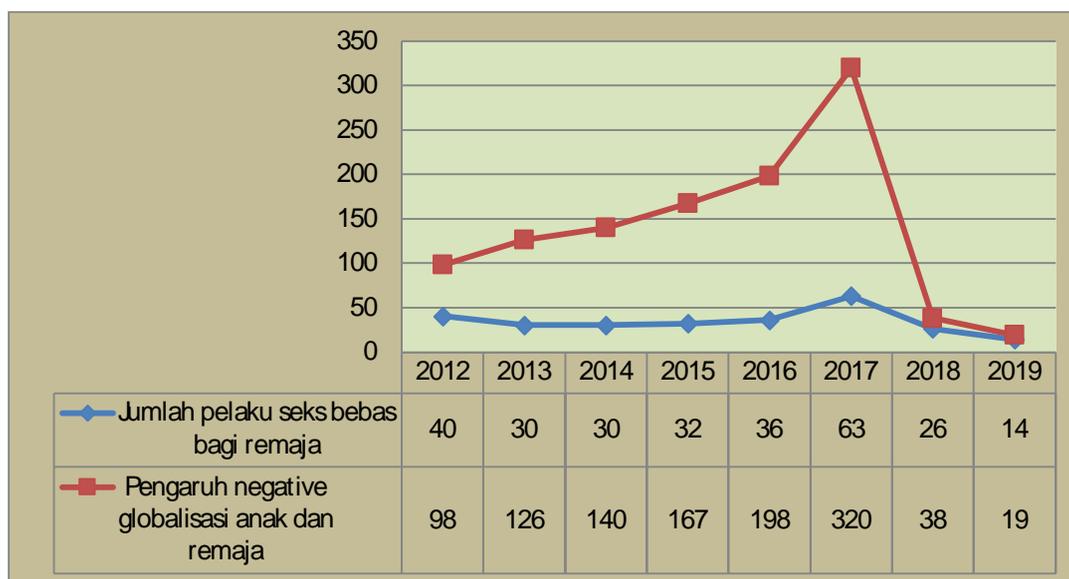
- a. dari 34 OPD yang ada, baru 2 OPD yang responsif gender;
 - b. dari total 33 kantor kelurahan di Kota Dumai, seluruhnya belum responsif gender;
 - c. dari 10 Puskesmas yang ada, baru 7 Puskesmas yang responsif gender.
- 2) Sarana dan prasarana belum memenuhi setiap kalangan. Dari 152 sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Dumai, baru 5 sekolah yang responsif gender.
 - 3) Fasilitas umum belum menyediakan tempat-tempat privasi/khusus seperti ruang laktasi, toilet untuk penyandang disabilitas, dll.
 - a. Dari 2 pelabuhan penumpang yang ada, baru 1 pelabuhan penumpang yang sudah responsif gender;
 - b. Dari 1 terminal penumpang yang ada, belum responsif gender;
 - c. Dari 1 bandara yang ada, belum responsif gender;
 - d. Dari 4 taman wisata milik pemerintah yang ada, belum responsif gender.
 - 4) Belum semua SDM aparatur perencanaan paham tentang perencanaan dan penganggaran terkait program/kegiatan responsive gender.
 - 5) Masih kurangnya ketersediaan SDM aparatur yang memahami, mampu mengadvokasikan dan melakukan sosialisasi serta pendampingan terkait penyusunan GAP dan GBS.
6. Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 40 pelaku hingga kurun waktu 2019 menurun menjadi 14 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 98 pada tahun 2012 dan menurun menjadi 19 pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada Tabel 2.89 dan Gambar 2.50 dibawah ini:

Tabel 2.89 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	40	30	30	32	36	63	26	14
Pengaruh negative globalisasi anak dan remaja	98	126	140	167	198	320	38	19

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2020)



Gambar 2.50 Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2020)

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2012 sampai tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	36,84	26,50	41,36	35,54	38,08	15,18	66,13	34,85

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

*Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2019 kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi

pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 2.90. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tabel 2.91 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2019

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan
1	Beras	5.712,00	28.596,88	(22.884,88)
2	Jagung	121,00	537,31	(416,31)
3	Kedelai	-	2.039,09	2.039,09)
4	Kacang Tanah	2,40	457,85	(455,45)
5	kacang Hijau	-	149,00	(149,00)
6	Ubi Jalar	-	671,87	(671,87)
7	Ubi Kayu	3.841,27	997,87	2.843,40
8	Sagu	-	137,2	(137,2)
9	Buah-Buahan	708,00	7.035,0	(6.327,00)
10	Sayuran	203,00	11.413,6	(11.210,6)
11	Daging Sapi	444,00	516,7	(72,7)

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (28.596 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun. Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganeekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya.

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Luas lahan pertanian di Kota Dumai semakin sedikit, sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan mayoritas lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian di Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin

berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai :

Tabel 2.92 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir 2021	Capaian s/d 2019 terhadap RPJMD 2021 (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	81,70	82,10	82,09	82,10	100 %	83,74	98,04
Rata-rata Capaian Kinerja									

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2020)

2. Jumlah Alih Fungsi Lahan

Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2011 berjumlah 4.139 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian menjadi non pertanian	4.139	3.586	3.045	2.804	2.614	3.038	2.774,30

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2020)



Gambar 2.51 Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

D. Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain :

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu :
 - 1. PT. SUNTARA GAJA PATI di Sungai Sembilan
 - 2. PT RUAS UTAMA JAYA di Sungai Sembilan
 - 3. PT. DIAMOND RAYA TIMBER di Sungai Sembilan
 - 4. PT. ARARA ABADI DI Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu :

- 1. PT. SUNTARA GAJA PATI Di Kecamatan Sungai Sembilan
- 2. PT RUAS UTAMA JAYA Di Kecamatan Sungai Sembilan
- 3. PT. DIAMOND JAYA TIMBERS Di Kecamatan Sungai Sembilan
- 4. PT. PERTAMINA PERSERO Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
- 5. PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
- 6. PT. ARARA ABADI di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah dan progress penyelesaian. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN																									
1.	Tanah Bekas Hak Pakai PT. CPI	<p>a. Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persil = 4.361 - Luas penguasaan tanah seluas : 3.283.084,06 M <p>b. Saat ini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi konprehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan membandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>c. Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p> <p>d. Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara, maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposal permintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>e. Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang di atasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>f. PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>g. Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p> <p>h. Permohonan hibah atas 44 bidang tanah sebagaimana huruf e dikabulkan tidak dengan hibah, tetapi dengan Pinjam Pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dari 44 bidang yang diajukan hanya 39 bidang yang disetujui, sementara 5 bidang lagi merupakan tanah kosong belum dapat disetujui dan masih dalam proses.</p> <p>i. Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang berasal dari KKKS PT. CPI antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan pada hari Rabu 21 Nopember 2018 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara KEMENKEU kepada Walikota Dumai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor :PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BKPAD/2018 Tanggal 21 November 2018.</p>	<p>Rincian 4.361 persil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tinggal 3.867 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Swasta) 6 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Fasilitas Pemerintah 25 unit - Usaha Pribadi 184 unit - Perusahaan swasta 3 unit - Fasilitas Umum/Sosial 14 unit - Rumah Ibadah 33 unit - Lainnya 221 <p>Kondisi Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Permanen 2.356 unit - Bangunan Semi Permanen 1.728 unit - Bangunan Terbengkalai 193 unit - Lahan Kosong 3 persil - Lainnya 217 <p>Dengan dikabulkannya pinjam pakai atas tanah yang di atasnya telah berdiri aset Pemko Dumai maka permasalahan tanah hak pakai PT. CPI dpt terselesaikan. Dan untuk perpanjangan pinjam pakai 5 tahun kedepan akan diajukan permohonan hibah atas obyek tanah tsb.</p> <p>Sedangkan untuk tanah fasilitas sosial dan perkantoran vertikal diajukan PSP nya oleh yang bersangkutan dan sdh berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>DJKN berjanji akan menyelesaikan penyusunan PERPRES tersebut dalam waktu 6 bulan.</p>																									
2.	Tanah yang berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai	<p>Hasilnya :</p> <p>Hasil pendataan tahun 2013 :</p> <table border="1" data-bbox="641 2155 1203 2222"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th rowspan="2">Luas Total (M²)</th> <th colspan="2">Luas (M²) yang masuk</th> <th colspan="2">Jumlah Pemilik</th> </tr> <tr> <th>TWA</th> <th>Lainnya</th> <th>Kelompok</th> <th>hg/instansi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Grn Panjang</td> <td>6.173.576</td> <td>4.695.215</td> <td>4</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Bukit Timah</td> <td>3.885.903</td> <td>3.675.767</td> <td>2</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas (M ²) yang masuk		Jumlah Pemilik		TWA	Lainnya	Kelompok	hg/instansi	1	Kel. Grn Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13		2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21		<p>Kewenangan penyelesaian permasalahan ini berada di kementerian</p>
No	Lokasi	Luas Total (M ²)				Luas (M ²) yang masuk		Jumlah Pemilik																				
			TWA	Lainnya	Kelompok	hg/instansi																						
1	Kel. Grn Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13																							
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21																							

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN																														
		<table border="1" data-bbox="641 276 1208 361"> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Bumi Ayu</td> <td>3.613.765</td> <td>2.206.002</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kel. Bukit Batrem</td> <td>80.468</td> <td>41.090</td> <td>-</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kel. Tanjung Palas</td> <td>13.248.608</td> <td>11.910.033</td> <td>5</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kel. Mundam</td> <td>3.828.432</td> <td>955.102</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> </tr> </table> <p data-bbox="732 363 943 388">Penggunaan Lahan</p> <ol data-bbox="662 391 1198 662" style="list-style-type: none"> 1. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar 2. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar 3. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar 4. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun 5. Sawit diatas umur 3 tahun, Kebun, Hutan, Belukar 6. Sawit diatas umur 3 tahun, kebun, Hutan, Belukar <ol data-bbox="641 687 1208 912" style="list-style-type: none"> 1. Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebut belum terbentuk 2. BBKSDA Prov. Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementerian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kota Dumai dalam rangka membahas pembentukan tim tersebut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan <p data-bbox="641 936 1198 1061">Hasil Pendataan : Luas areal yang di data : 69.112 M Jumlah pemilik lahan : 83 KK Peruntukan lahan : Pemukiman masyarakat, kebun dan lain-lain.</p> <p data-bbox="641 1086 1198 1186">Hasil pendataan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian LHK sebagai laporan untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah, terkhusus di depan bandara Pinang Kampai.</p>	3	Kel. Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2	4	Kel. Bukit Batrem	80.468	41.090	-	11	5	Kel. Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49	6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2	Total						<p data-bbox="1230 276 1468 625">LHK tepatnya di Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Riau dan Balai Penegakan Hukum LHK. Pemko Dumai hanya melakukan upaya permohonan penyelesaian permasalahan ini dengan melampirkan data-data terkait kondisi TWA tersebut.</p>
3	Kel. Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2																												
4	Kel. Bukit Batrem	80.468	41.090	-	11																												
5	Kel. Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49																												
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2																												
Total																																	
3.	Tanah bangunan SDN 002 Bagan Besar Bkt Kapur	<ol data-bbox="641 1193 1208 2207" style="list-style-type: none"> 1. Telah terdengar penjelasan keberatan dari ahli waris tsb, dengan alasan merasa tersinggung karena selama ini pihak sekolah tidak menyelesaikan urusan peningkatan surat tanahnya padahal alm. Sudah pernah memperingatinya. 2. Keberatan juga karena ketua yayasan menyerahkan sebagian tanah tersebut pada Dinas P & K Bengkalis padahal dalam surat penyerahan oleh orangtua mereka tanah tersebut hanya untuk panti asuhan. 3. Ahli waris menuntut ganti rugi. 4. Telah diberi pandangan dari berbagai pihak yang hadir kepada ahli waris bahwa sebaiknya tidak menuntut ganti rugi karena orangtua mereka menyerahkan tanah tsbt dalam keadaan masih hidup, maka terputuslah hak ahli waris utk tanah tsbt. Walaupun keberatan sebaiknya diarahkan kepada Ketua yayasan yang menyerahkan tanah tsbt kepada Dinas P % K Bengkalis, bukan kpd Pemko Dumai. 5. Tidak ditemukan dokumen asli baik penyerahan daro alm. H.A. Bakar kpd yayasan maupun penyerahan dari yayasan kpd Dinas P & K Bengkalis serta surat induk berupa sertifikat, yg ada hny fotocopi saja. 6. Pihak ahli waris mencerugai terjadi transaksi jual beli tanah tsb saat itu. 7. Rapat merekomendasikan agar bag.pertanahan dan DISDIK melakukan penelusuran keberadaan dok.asli dan penelusuran kronologis perolehan atas tanah tsb ke Dinas P & K Bengkalis dan Dinas Sosial Bengkalis krn pd fotocopi sertifikat tsb a.n. Departemen Sosial Kab. Bengkalis diatas tanah tsb jg terdapat bangunanperumahan Dinas Sosial. 8. Rapat pertemuan akan dilakukan setelah menerima hasil dari penelusuran ke Bengkalis. 9. Rapat 2 mei 2019 menyampaikan penawaran masalah sbb: - Meminta kpd ahli waris utk mengikhlaskan 	<p data-bbox="1230 1193 1451 1260">Selesai dimediaasi, dengan rekomendasi ke pengadilan</p>																														

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
		<p>atas apa yg telah dihibahkan oleh alm. H.A. Abu Bakar agar menjadi amal ibadah bagi alm. Didlm kubur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris keberatan dan tetap meminta gantirugi kpd Pemko Dumai. - Disarankan agar ahli waris mengajukan gugatan hokum ke pengadilan sbg solusi dan mjd dasar bagi Pemko Dumai utk mengganti rugi. - Pihak ahli waris menyatakan setuju. 	
4.	Permasalahan tanah kelompok masyarakat Kel. Mekar Sari antara kelompok bapak M. Rais dgn kelompok ibu Sarmiyah	<p>Dari kesimpulan rapat pertama disepakati utk melakukan kunjungan lapangan guna melaksanakan inventarisasi dan klarifikasi lapangan thd objek permasalahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat terakhir pada tanggal 20 Agustus 2019 kembali dihadirkan para pihak yang bersengketa dlam rangka mencari solusi penyelesaian dari permasalahan. 2. Tidak terdapat kesepakatan damai antara kedua belah pihak meskipun telah ditawarkan beberapa solusi, namun masing2 pihak bertahan dgn kemauannya. 3. Kesimpulan terakhir, disarankan kpd kedua belah pihak agar menyelesaikan kasus ini melalui ketentuan hokum melalui pengadilan. 4. Kedua belah pihak menyetujui. 	Proses fasilitasi penyelesaian masalah ini telah selesai.
5.	Permasalahan tanah Barang Milik Negara (DAMUA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan April 2019, meminta BPN dan Pemko Dumai utk melakukan Konsultasi ke Dirjen Kekayaan Negara selaku pihak yang mencatat asset guna mencari solusi atas permasalahan tsb. 2. Pertemuan Movember 2019, pelaksanaan penambahan luas lahan tol merekomendasikan agar thd tanah-tanah BMN/ masyarakat yang terkena gantirugi jalan tol spy tetapdilakukan pengukuran luas tanah dan dinilai harganya oleh tim aprasial, kemudian diumumkan dgn menampilkan tanah si A atau si B/BMN, dan melalui mekanisme pengadilan siapa yg berhak atas tanah tsb. 3. Untuk yg tdk terkena jalan tol Dumai-Pekanbaru, diusulkan utk dibahas dlm rapat terbatas dgn Presiden. 	<p>Rekomendasi poin 1 sdh dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DJKN berpendapat SK Gubernurlah bias merevisinya, dan disarankan agar melakukan pertemuan dgn Gubernur. <p>Rekomendasi poin 3 sampai saat ini blm dilaksanakan.</p>
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini. 2. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN atau dianggarkan dalam APBN murni 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikhawatirkan terjadi gejolak Masyarakat atas tidak jelasnya status ganti rugi ini 2. Sampai saat ini belum Jelas kelanjutannya.
7.	Permasalahan tanah yang berada dalam kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 30 November 2019, Gubernur Riau membuat rekomendasi hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kota Dumai kpd Menteri KO.Perekonomian RI di Jakarta. Dalam rekomendasi tsb hny lebih kurang 398,75 Ha yg dinyatakan memenuhi syarat utk dilanjutkan proses pelepasannya kemudian terdapat seluas 350,98 Ha yg tdk masukdlm usulan Walikota Dumai tetapi merupakan kawasan permukiman, fasilitasi social, fasilitasi umum, maka oleh tim merekomendasikan utk dikeluarkan jg dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. 2. Terhadap surat Walikota kpd Kakanwil BPN Provinsi Riau dan Menteri LHK sampai saat ini blm mendapatkan jawaban. 	Rekomendasi yg disampaikan oleh Gubernur Riau, Menteri LHK sedang diproses.

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

Sedangkan permasalahan yang telah diselsaikan pada Tahun 2018 berikut adalah Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan

NO	OBJEK PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2019 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah kota Dumai saat ini.

E. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai.

Tabel 2.96 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penanganan sampah (%)	48	50	50	50	50	50	53	56

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2019, yakni dari 48% di tahun 2012 meningkat menjadi 56% di tahun 2019.

2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya

tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.97 data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.97 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	15 (TPS)	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Selama periode 2012-2019 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2012 meningkat menjadi 20 TPS di tahun 2019.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

3. Peningkatan Suhu Udara dan Kualitas Udara di Kota Dumai

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 22,7 °C – 34,1°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.98 (tanpa data tahun 2012). Rata-rata suhu udara tahun 2011-2015 lebih tinggi dibandingkan dengan

tahun 2016, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 26,4 °C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2011-2018 masih berada dalam kondisi normal. Pada tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Agustus yaitu sebesar 36°C.

Tabel 2.98 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Suhu rata-rata (°C)	28,32	28,32	28,32	28,32	28,20	28,09	26,4

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.99 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dBA) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 (g/Nm³). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

Tabel 2.99 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2019

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	Pb	HC	NH ₃	H ₂ S	TSP	Kebisingan
	(g/Nm ³)	(g/Nm ³)	(g/Nm ³)	(g/Nm ³)	(g/Nm ³)	(g/Nm ³)	ppm	ppm	(g/Nm ³)	dBA
Simpang Polres Dumai	35,31	956,87	17,81	20,30	0,11	24,63	0,05	<0,0014	151,88	68,00
KLK Dumai	29,47	1.025,7	15,18	22,80	0,05	73,64	0,07	<0,0014	133,07	68,00
Bukit Batrem	25,26	1.124,6	13,17	31,70	0,05	46,24	0,56	<0,0014	102,90	55,00
TPA Mekarsari	23,82	863,74	10,42	37,50	0,02	54,88	0,05	<0,0014	60,26	40,00
Kawasan Industri Dumai (KID)	39,29	1.136,5	7,02	25,70	<0,00069	71,25	0,06	<0,0014	78,00	57,00
Depan Gedung BKD	24,98	865,50	16,24	22,70	0,11	36,36	0,06	<0,0014	105,58	52,00
PT. IBP Industri Lubuk Gaung	27,93	869,40	17,30	27,50	0,15	52,55	0,04	<0,0014	118,32	57,00
Jl. Dermaga ke Purnama	23,82	893,40	10,90	31,30	0,04	34,55	0,05	<0,0014	76,46	65,00

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.100. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.100 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2018-2019

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	pH		Kekeruhan (NTU)		Warna (PtCo)		Besi (mg/L)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Air Sumur Kel. Tanjung Palas								
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	3,84		7,70		25		0,13	0,13
Air Sumur Kel. Bukit Kapur								
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	6,80		0,87		10		0,0228	0,0228
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,99		10,9		121		0,744	0,744
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan								
Air Sumur Kec. Dumai Kota	3,04		2,85		12		0,863	0,863
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	Besi (mg/L)		Kadmium (mg/L)		Nitrat (mg/L)		KMnO ₄ (mg/L)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Air Sumur Kel. Tanjung Palas								
Air Sumur Kel. Teluk Makmur			<0,003		12,7		16,12	
Air Sumur Kel. Bukit Kapur								
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,0228		<0,003		12		2,212	
Air Sumur Kel. Dumai Barat	0,7444	0,732	<0,003	0,003	0,7	0,017	12,51	2,844
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan								
Air Sumur Kec. Dumai Kota	0,8630		<0,003		0,5		8,287	

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101 Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5 - 9
Kekeruhan	NTU	25
Warna	PtCo	50
Besi	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10
KMNO ₄	mg/L	10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2018-2019 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam,

hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

5. Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

6. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai

pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2018-2019

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter			
	pH		TSS (mg/L)	
	2018	2019	2018	2019
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,80	7,75	144	80
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,85	-	112	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,81	-	108	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,85	7,87	116	102
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,85	7,89	116	80
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,85	-	108	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,87	7,86	104	80
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung		-		-
Air Dermaga PT. CPI	7,88	7,85	108	80
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,85	7,88	122	80

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di 5 (lima) titik pengujian sampel.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.103 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.103 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	12	Mangan	mg/L	0,1
COD	mg/L	100	Klorida	mg/L	600
P	mg/L	5	Flourida	mg/L	1,5
pH		6 - 9	Sulfat	mg/L	400
DO	mg/L	3	Belerang	mg/L	0,002
NO ₃	mg/L	20	NH ₃	mg/L	0,5
Nitrit	mg/L	0,06	Besi	mg/L	0,3

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.104 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2018-2019

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter													
	BOD (mg/L)		COD (mg/L)		Posfat (mg/L)		pH		DO (mg/L)		NO ₃ (mg/L)		Nitrit (mg/L)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sungai Bulu Hala														
Sungai Teras	5,936		67,49		0,054		3,49		3,88		3,9		0,030	
Sungai Mampu	5,589	6,25	64,69	69,08	0,096	0,358	3,38	3,72	4,34	4,77	3,3	2,4	0,023	0,022
Sungai Nerbit Kecil	6,927	7,19	73,11	82,31	0,055	0,347	3,12	3,72	4,54	4,73	3,2	2,5	0,034	0,032
Sungai Nerbit Besar	6,333		66,08		0,022		3,29		4,10		3,2		0,027	
Sungai Rimbun Jaya	6,779		71,70		0,018		3,43		3,93		3,4		0,039	
Sungai Parit Kitang	5,341	6,10	63,27	72,40	<0,010	0,179	3,39	3,81	4,43	4,65	3,3	2,6	0,031	0,037
Sungai Masjid		7,24		84,91		0,088		6,73		3,53		1,1		0,013
Sungai Dumai	4,796	6,54	60,46	77,71	0,033	0,082	5,64	6,73	3,49	3,88	2,8	1,4	0,024	0,015
Sungai Selinsing	5,936	5,25	63,27	57,92	<0,010	0,080	3,45	3,97	3,48	3,82	4,8	3,0	0,042	0,041
Sungai Kepala Beruang	4,548	6,20	60,46	74,30	0,025	0,041	3,52	3,83	4,81	4,17	4,8	3,3	0,047	0,040
Sungai Pelintung	5,391		63,27		<0,010		3,36		3,86		2,3		0,022	
Sungai Guntung	5,292	5,70	60,45	66,57	<0,010	0,086	3,29	3,65	4,12	4,19	3,8	2,9	0,039	0,053
Sungai Kemeli (Muara)	5,887		66,08		<0,010		3,02		4,08		2,8		0,017	
Sungai Puak	6,333	5,85	70,29	66,72	0,013	0,065	3,33	3,70	5,10	3,80	2,9	3,4	0,050	0,046
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter													
	NH ₃ (mg/L)		Besi (mg/L)		Mangan (mg/L)		Klorida (mg/L)		Flourida (mg/L)		Sulfat (mg/L)		Belerang (mg/L)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sungai Bulu Hala														
Sungai Teras	0,885		0,8776		0,0559		6,055		0,915		41,65		0,011	
Sungai Mampu	1,884	0,75	0,0606		0,0441		4,070		<0,181		35,45		0,012	
Sungai Nerbit Kecil	1,024		12742		0,0952		164,5		<0,181		96,95		0,012	
Sungai Nerbit Besar	0,0687		0,7379		0,0294		15,24		<0,181		39,02		0,012	
Sungai Rimbun Jaya	0,964		0,9930		0,1524		512,2		<0,181		63,50		0,014	
Sungai Parit Kitang	0,351		0,6525		0,0608		74,79		<0,181		24,81		0,016	
Sungai Masjid														
Sungai Dumai	3,809		0,7330		0,0486		38,07		<0,181		3,602		<0,010	
Sungai Selinsing	0,539		0,4242		0,0314		499,3		<0,181		37,57		0,039	
Sungai Kepala Beruang	1,542		0,6420		0,324		264,64		<0,181		36,17		0,032	
Sungai Pelintung	1,587		0,9036		0,1800		902,2		<0,181		29,06		<0,010	
Sungai Guntung	1,565		1,0337		0,0633		5,807		<0,181		53,48		0,015	
Sungai Kemeli (Muara)	0,0531		0,8565		0,2080		8,820		<0,181		168,9		<0,010	
Sungai Puak	0,576		1,0044		0,1417		46,26		<0,181		41,78		<0,010	

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020)

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan untuk Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2012 hingga tahun 2019 (tanpa data tahun 2016) persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2012 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 61,52%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 96%.

Tabel 2.105 Kepemilikan KTP Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015*	2017	2018	2019
Kepemilikan KTP	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	94,82%	96%

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020)

2. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota

Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.106 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.106 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020)

3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai sejak tahun 2005.

Tabel 2.107 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020)

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu 2012-2019 terdapat 41 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 99%. Jumlah posyandu selama kurun waktu 2012-2019 adalah sebanyak 196. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2012-2019 adalah 100%. Sedangkan persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2019 adalah sebesar 100%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Satuan	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	41	41	41
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241	196
Persentase Posyandu Aktif	%	98	98	99	100	100	100	100	100
Persentase LPM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90	90	100

Indikator	Satuan	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	97	97	100

(Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, dari tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah peserta KB aktif terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 jumlah pesertanya turun menjadi 29.287 peserta dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali jumlah peserta KB aktif yaitu sebesar 30.571 peserta.

Tabel 2.109 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2013-2018

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan peserta KB aktif	35.597	45.344	55.628	29.287	33.059	30 571

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.110.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;

- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.110 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Keluarga	55.051	55.051	55.051	63.527	78.809	82.478	82.478	54.982
Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	4.118	2.871	2.871	2.871	6.369
Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	11.138	4.503	4.503	4.503	30.071

(Sumber: Dallap DPPKB Tahun 2020)

I. Urusan Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

1. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.111 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.111 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TERMINAL	BERANGKAT	120.225	106.390	105.890	102.670	9.834	114.702
	DATANG	120.401	108.116	108.008	105.532	9.549	137.437
PELABUHAN	BERANGKAT	233.365	123.971	130.789	129.135	249.341	129.545
	DATANG	211.070	103.876	100.342	102.586	214.347	110.471
BANDARA	BERANGKAT	10.625		12.465	11.856	60.090	55.484
	DATANG	10.876		11.782	10.354	58.470	55.768
	TRANSIT	1.385					

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Dari Tabel 2.111 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2014 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (palabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai.

Terlihat sejak tahun data (2014–2019) jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan (kapal) lebih besar apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	4.075	3395	9.334

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2019 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.112 Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya.

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Tabel 2.113 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Dari tabel 2.113 diatas diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut

masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.114 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.114 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	10.020	8.473	9.344

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2019.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	28 Menit					

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 29.000,-. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga saat ini (tahun 2019), berikut apabila ditunjukkan dengan Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

7. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak menyebutkan sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan pada formula pemasangan rambu-rambu. Data yang didapatkan hanyalah data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n, dimana pada tahun 2015 terpasang rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 952 unit, dan rambu cantilever type F sebanyak 389 unit, RPPJ sebanyak 87 unit, serta RPPJ portal bentang sebanyak 4 unit.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2019

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) - ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Perlatan Kesehatan) - SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal dan Informasi Daerah Binaan	- SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) - SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SiPERI) - SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secar Elektronik) - OSS (Online Single Submission)	DPMPPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan) - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyerurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
II Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
IV Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.118 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

K. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2011-2019 tiap tahunnya berfluktuatif sesuai Tabel 2.119 dibawah ini.

Tabel 2.119 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019
Persentase Koperasi Aktif	71	55	83	83	54	81	82,71	84

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2019.

2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan.

Tabel 2.120 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro dan Kecil	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672	14.874	16.134

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai sampai dengan Tahun 2019 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan 1 kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1 : 2.319. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.121 berikut:

Tabel 2.121 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pendamping UKM	7	7	8	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2020)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2019 perkecamatan tersaji pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2017 - 2019

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Dumai Barat	2.402	2.657	2.837
2	Dumai Timur	2.738	3.051	3.231

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
3	Bukit Kapur	1.708	2.002	2.182
4	Medang Kampai	1.143	1.476	1.656
5	Dumai Selatan	989	1.317	1.497
6	Dumai Kota	2.178	2.521	2.701
7	Sungai Sembilan	1.514	1.850	2.030
JUMLAH		12.497	12.672	16.234

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2020)

Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2017 - 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2017 terdapat 12.497 UMKM, dan pada tahun 2019 jumlah UMKM di kota dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 3.562 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2012-2019, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perusahaan PMDN	47	53	57	60	63	64	24	42
Jumlah Perusahaan PMA	52	56	62	66	69	76	84	76

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2020)

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi PMA dan PMDN terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai PMA sebesar 323,45 juta USD dan nilai PMDN sebesar 1,15 triliun Rupiah. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.124. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dumai Dalam Angka Tahun 2017, nilai investasi PMDN di Kota Dumai tahun 2016 adalah sebesar 2,32 triliun Rupiah dan PMA sebesar USD 1.016,34. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2019 sebesar 5,937 triliun.

Tabel 2.124 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PMDN (Milyar Rp)	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	2.007,20		
PMA (juta \$)	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12		
Nilai Ivestasi PMA dan PMDN						2.007,31	5.937,39

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2020)

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2016 dan tahun 2017 berturut-turut sebanyak 2.833/54 orang dan 2.101/48 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2016-2017 berturut-turut sebanyak 476/8 orang dan 224/8 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 24,25 dan 16,09.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.125. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2017 meningkat hingga mencapai 103,81 %. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.125 Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Nilai Realisasi PMDN	1,95%	24,10 %	0,11%	0,74%	102,21	103,81	31,42	100,57
Persentase Nilai Realisasi PMA	21,46%	9,60%	0,45%	1,27%				

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2020)

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.126 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	55	55	47	47

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2020)

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2019 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga

pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.127 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah organisasi olahraga	25	25	29	29	29	29	29	29

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2020)

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2012 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2019 berjumlah masih tetap 2 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.128 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	3	2	1	2	2	2

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2020)

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebanyak 984 orang.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2012 adalah 8 kegiatan dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Tabel 2.129 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kegiatan olahraga	8	4	4	4	5	3	6	3

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2020)

5. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2015 berjumlah 1 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

N. Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dalam Angka” dan buku “PDRB Kota” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 tersedia keduanya.

Tabel 2.130 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

O. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2012 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 4 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2016 hanya tinggal 2 kegiatan saja. Tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai tahun 2019 menjadi 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2019 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	1	2	2	2	5	5	5

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

P. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 relatif mengalami penambahan. Pada tahun 2012 jumlah perpustakaan adalah 12 unit, dan pada tahun 2019 jumlah perpustakaan naik menjadi 15. Berikut Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2019



Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2019
(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020)

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2012 hingga tahun 2019 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,45 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,50, namun terus terjadi penurunan karena penambahan jumlah penduduk. Berikut Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perpustakaan	12	16	15	15	15	15	15	15
Jumlah Penduduk per 10.000	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,33
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,45	0,58	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019, diolah)

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2012 hingga 2019 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.130. Pada tahun 2012 rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun sebesar 356,50, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 naik menjadi 1.242,11.

Tabel 2.133 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	9.555	12.846	15.704	23.985	24.902	28.242	29.370	37.643
Jumlah Penduduk per 10.000	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,33
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	948,99	968,37	1.242,11

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020)

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



Gambar 2.53 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2011-2019

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020)

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2014 memiliki tren perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2011 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 14.224 eksemplar, dan pada tahun 2014 meningkat

menjadi 48.447 eksemplar seperti yang tersaji Pada Gambar 2.50. Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan buku, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku keperpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain keperpustakaan kelurahan maupun keperpustakaan rutan. Pada tahun 2019 jumlah buku menjadi 53.557 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 51.707 eksemplar.

Q. Kearsipan

Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2013	102
2014	1.006
2015	748
2016	1.590
2017	1.791
2018	1.824
2019	1.710

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020)

2.1.3.3. FOKUS URUSAN LAYANAN PILIHAN

A. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.135. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di kota Dumai yaitu sebesar 122.627 orang.

Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan Wisata (org)	67.060	90.723	71.274	122.627	52.020	45.340	46.590	29.881

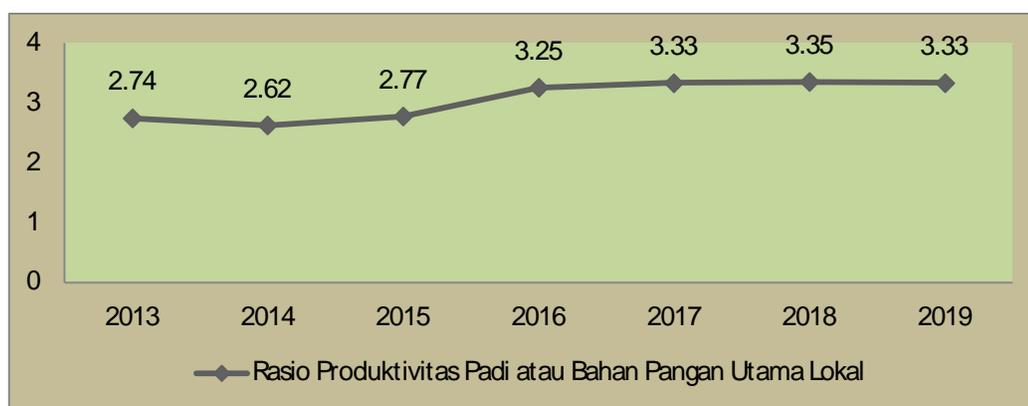
(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2020)

B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.54. Pada tahun 2018 produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai sebesar Rp.3,35 ton/ha, dan Untuk tahun 2019 produktifitas padi sebesar 3,33 ton/ha.



Gambar 2.54 Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2013-2019

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

Adapun jumlah kelompok tani perkecamatan pada saat ini adalah sebagai berikut Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok

No	Kecamatan	Jumlah kelompok tani (poktan)	Jumlah kelas kelompok			
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Bukit Kapur	95	80	14	1	0
2	Dumai Barat	32	32	0	0	0
3	Dumai Kota	8	8	0	0	0
4	Dumai Selatan	33	30	3	0	0
5	Dumai Timur	35	34	1	0	0
6	Medang Kampai	50	47	3	0	0
7	Sungai Sembilan	118	91	27	0	0
Total		371	322	48	1	0

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian. Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017 tersaji pada table 2.137. Dari Tabel 2.137 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2017 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 52,8% dari seluruh kelompok tani yang ada.

Jumlah kelompok tani yang telah diberi bantuan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada table 2.137. Pada Tahun 2019 jumlah kelompok tani yang diberi bantuan sebanyak 140 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Tabel 2.137 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	130	33	33	88	140

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

2. Luas Areal Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di setiap kecamatan di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.138. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.138 Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019

Kecamatan	Jenis Tanaman				
	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Pinang	Kakao
Bukit Kapur	12.959,0	1.251,0	84,0	7,0	1,0
Dumai Barat	116,0	-	214,5	14,0	2,0
Dumai Kota	-	-	-	-	-
Dumai Selatan	350,5	7,0	46,0	12,0	3,5
Dumai Timur	98,0	-	26,5	6,0	-
Medang Kampai	3.922,5	724,0	145,0	11,0	4,0
Sungai Sembilan	21.123,0	467,0	979,0	75,0	15,0
Jumlah	38.569,0	2.449,0	1.495,0	125,0	25,5

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, pinang, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3. Populasi Ternak Unggulan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, jumlah ternak unggulan sampai tahun 2015 adalah sebanyak 5.235 satuan ternak. Jumlah ternak unggulan ini terus bertambah sampai tahun 2018 dengan jumlah berturut-turut 5.463 satuan ternak di tahun 2016 dan 5775 satuan ternak di tahun 2017 serta sejumlah 6.253 satuan ternak pada tahun 2018, tahun 2019 7.013 Satuan Ternak.

Sedangkan untuk jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis, kondisi di tahun 2015 terdapat 35 kasus. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan target jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus. Pada tahun 2019 target penurunan kasus hewan menular zoonosis menjadi 17 kasus

4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,69

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Sektor pengalihan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 berdasarkan data dari BPS tahun 2018 dikarenakan RTRW Kota Dumai yang belum disahkan sehingga terkendala perizinan.

D. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.140 berikut ini.

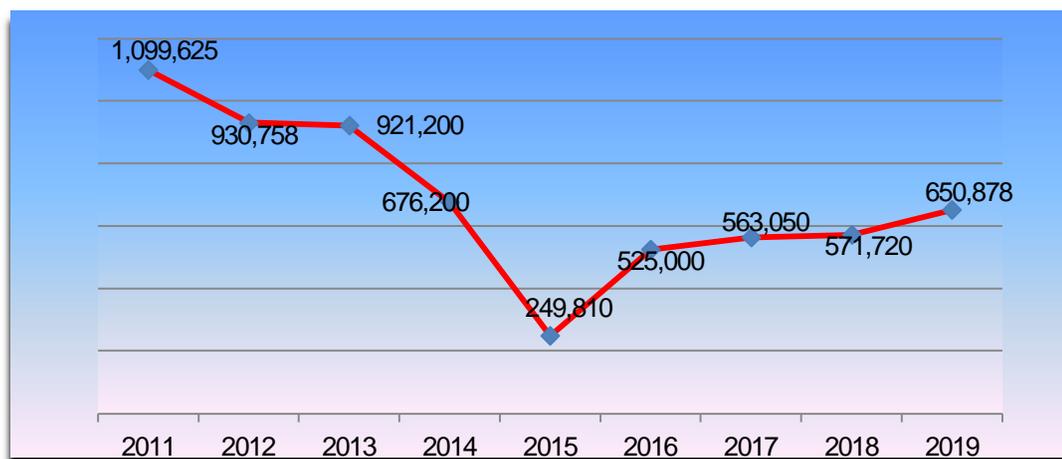
Tabel 2.140 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2012-2019

No	Jenis Ikan	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenggiri	29.641	22.200	17.100	30.300	22.700	69.811	7.728	40.413
2	Parang-parang	25.052	24.800	5.300	12.300	14.200	41.887	6.955	18.676
3	Senangin	20.189	17.100	15.900	24.000	17.700	-	8.500	12.537
4	Kakap hitam/putih	20.338	17.000	12.200	9.700	8.000	-	7.728	8.690
5	Gulama	27.724	21.800	20.600	12.400	-	-	6.955	2.223
7	Lomek	31.149	23.500	17.000	27.200	57.000	125.660	11.591	71.760
8	Biang	32.582	21.600	15.700	-	-	-	13.910	69.878
9	Pari	22.946	14.600	13.000	14.000	-	-	6.182	23.155
10	Bawal	21.271	16.300	13.000	13.210	4.400	52.498	7.728	3.364
11	Mayung	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ikan lainnya	166.164	164.200	159.800	63.700	182.600	49.705	-	128.140
13	Udang lainnya	533.702	578.100	376.600	43.000	151.100	223.489	494.444	272.042
JUMLAH		930.758	921.200	676.200	249.810	525.000	563.050	571.720	650.878

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2020)

Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut

fluktuatif. Pada tahun 2012 produksi perikanan laut mencapai 930.758 Kg. Produksinya terus mengalami penurunan setiap tahunnya dan sampai tahun 2019 menjadi 650.878 Kg. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2012-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.55.



Gambar 2.55 Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2020)

2. Produksi Perikanan Budidaya

Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai. Berikut disajikan Tabel 2.141 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.141 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Jenis Ikan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ikan Mas	80	0	0	0	0	0	0	-
Ikan Nila	2.188	2.710	850	400	1.626	270	2.534	2.760
Gurami	360	1.450	1.350	0	0	1.360	942	1.478
Lele	66.219	106.350	138.297	128.522	174.891	197.110	314.456	219.183
Patin	7.984	41.370	18.848	8.000	8.000	10.300	7.430	10.378
Bawal	246	3.120	3.700	800	0	500	0	-
Bandeng	1.300	6.330	4.950	16.827	4.816	1.240	860	1.585
Udang	895	3.020	2.410	1.689	3.888	7.620	16.136	21.259
Jumlah	79.272	164.350	170.405	156.238	190.221	218.400	342.358	256.643

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2019)

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2011 sampai tahun

2018 mengalami naik-turun, seperti yang tersaji pada Gambar 2.56. Pada Tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 79.272 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2018 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 256.643 Kg.



Gambar 2.56 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

E. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Berikut tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2011-2018.

Tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	16,42

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

2. Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor ini mencapai USD 12.504.032.102,11 pada tahun 2018. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2011-2018

Uraian (USD 000)	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018
	16,485,319,670	16,485,319,670	14,195,672,775	17,746,297,425	10. 889.408.942	12.928.272.127,19	12 504 032 102,11
	1,175,177,629	1,175,177,629	1,064,462,336	778,071,820	597.294.415	498.456.718,00	557 578 482,00
Bersih Perdagangan	15.310.142.041	15.310.142.041	13.131.210.439	16.968.225.605	10.292.114.527	12.429.815.409,19	11.946.453.620,11

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

F. Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusinya pada PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam table 2.144 berikut ini.

Tabel 2.144 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sektor Industri Pengolahan (%)	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	54,75	56,48

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.145 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	2,70	3,78	6,19	2,92	5,71	5,34	7,25

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
	I. INDUSTRI KERAJINAN			
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air mineral	Kel. Purnama
			Tempat Tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat Telur	Kel. Stdi
			Kain Songket	Kel. Laksamana
			Tepak Sirih	Kel. RIMBA SEKAMPUNG
			Tempat Buah	Kel. Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat Telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak Sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat Buah	
			Tempat Tisu	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat Tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat Bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat air mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas kaki	Kel. Mundam
			Hiasan Dinding	Kel. Purnama
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			hiasan Jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	23	Tikar	Kel. Mundam
			Piring	Kel. Kampung Baru
			Tempat buah	Kel. Besilam Baru
			Gedeg	
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastik tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintang
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaian Olah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintang
			Jas	Kel. Purnama
			Baju Kaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	
12	Kerajinan Batik	8	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	
13.	Kerajinan Rotan	5	Kursi, Meja, Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dil	Kel. Besilam Baru
				Kel. Purnama
	II. INDUSTRI PERCETAKAN DAN ADVERTISING			
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetak	Kel. Teluk Binjai

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
				Kl. Rimbasekampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintan
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
JUMLAH PENGRAJIN		212		

(Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pembedayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020)

2.1.3.4. FOKUS URUSAN PENUNJANG

A. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2016-2021 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2018

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

B. Administrasi Pemerintahan

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa "Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis".

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Walikota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Walikota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2011-2017 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

C. Urusan Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2016-2019 tersaji pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2019

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019
Nilai	51,76	54,02	58,46	61,15
Predikat	CC	CC	CC	B

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan

upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil penilaian LPPD Kota Dumai tingkat Provinsi tahun 2019 adalah peringkat 5.

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2019 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 68,03%. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun dan 2017 berturut-turut adalah sebanyak 2 dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan LKPD) dan 3 dokumen (Rencana Kerja Anggaran, LKPD dan Laporan Kinerja), dan pada tahun 2019 sebanyak 10 dokumen.

D. Urusan Keuangan

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAD (Milyar Rp.)	157,47	153,22	162,54	182,35	265,47	279,65	291,59
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	65,84	59,24	64,44	71,85	94,99	127,96	141,14
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	264,48	(10,02)	8,78	11,50	22,95	25,77	9,33
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	35,67	25,67	15,22	29,44	35,86	30,68	31,10
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	(21,02)	(28,04)	(40,71)	93,46	41,93	(16,88)	1,35
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	26,53	29,34	29,23	33,67	50,42	74,44	82,25
Persentase Peningkatan PBB (%)	N/A	10,59	(0,39)	18,61	45,44	32,27	9,49
Belanja Daerah Kota Dumai (Milyar Rp.)	1.212,89	1.291,02	1.044,12	1.259,20	1.203,26	1.142,38	1.230,19
Belanja Pendidikan (Milyar Rp.)	318,88	338,19	382,06	381,54	370,73	228,48	380,27
Persentase Belanja Pendidikan (%)	26,29	26,20	36,59	30,30	32,46	25,86	30,91
Belanja Kesehatan (Milyar Rp.)	173,27	192,67	216,83	260,62	270,31	243,77	126,12
Persentase Belanja Kesehatan (%)	14,29	14,92	20,77	20,70	21,78	21,34	10,25

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dan BPKAD Kota Dumai Tahun 2020)

Dari Tabel 2.148 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2019 meningkat sebanyak 134,12% dari PAD tahun 2013. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2019 adalah sebesar 141,14 Milyar seperti yang tersaji pada Tabel 2.148. Pendapatan yang berasal dari pajak daerah selama periode 2013-2019 fluktuatif, pada tahun 2019 persentase pajak daerah meningkat sebesar 9,33% dari tahun sebelumnya. Kondisi retribusi daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan dengan total penurunan di tahun 2015 cukup tajam yaitu sebesar 40,71%. Sedangkan retribusi daerah tahun 2019 meningkat sebesar 31,10% dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 115 juta Rupiah, namun pada tahun 2016 kinerjanya kian membaik karena terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar 18,61% dari tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,49% dari tahun sebelumnya.

Disisi lain, dari Tabel 2.148 diatas juga terlihat bahwa selama periode 2013-2019 lebih dari 25% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2019 persentase belanja pendidikan sebesar 30,91% naik dari tahun sebelumnya yaitu 25,86%, dan persentase belanja kesehatan pada tahun 2019 sebesar 10,25%.

E. Urusan Kepegawaian

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar; (2) Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi; (3) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja; dan (4) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Untuk mengakses data/informasi kepegawaian secara cepat, lengkap dan benar maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai telah memiliki database Pegawai Negeri Sipil se-Kota Dumai yang akurat dan *up to date* dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Pasca disyahrkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi direvisi menjadi persentase pelanggaran disiplin; dan (2) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja direvisi menjadi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2012-2019 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2012-2019 tersaji pada Tabel 2.149 dan Tabel 2.150.

Tabel 2.149 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	6	18	12	6	6	12	2	1

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.150 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural								
- PIM II	5	-	-	2	-	-	2	5
- PIM III	40	11	2	5	2	-	15	11
- PIM IV	160	80	30	40	-	-	-	20

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2020)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2019 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2017 jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebanyak 1 orang.

Selama periode 2012-2019 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.150. Namun pada tahun 2017 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Kondisi sampai tahun 2017, jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM pada

tahun 2019 dengan rincian yang mengikuti Diklat PIM II sebanyak 5 orang, PIM III sebanyak 11 orang, dan PIM IV sebanyak 20 orang dan jumlah jabatan pimpinan tinggi eselon II berjumlah 29 orang. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2012-2013 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.151 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pejabat Eselon II	25	24	29	24	24	21	31	29

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2020)

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Berdasarkan data tahun 2017, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Dumai adalah sebesar Rp 1.189.815. Besaran pengeluaran untuk makanan dan non makanan terlihat seimbang. Pengeluaran untuk makanan mencapai Rp. 602.559, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 587.256. Berikut Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai

No	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan	
		Rupiah	%
1	Makanan	608 839	47,52
2	Bukan Makanan	672.279	52,48
	Jumlah	1.281.118	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

2.1.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

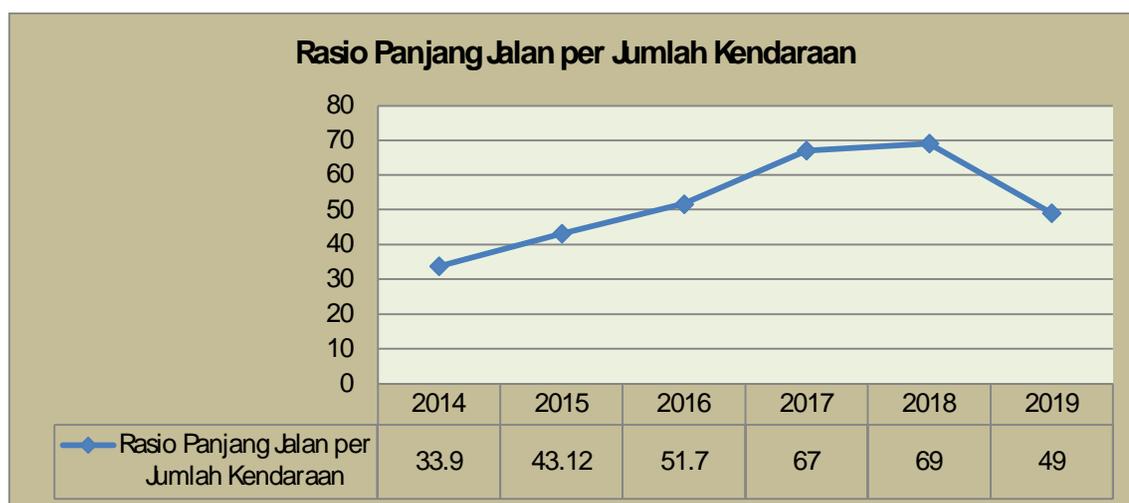
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.153 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.153 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan (km)	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2
Jumlah kendaraan	61.135	64.111	61.900	80.242	82.649	58.861
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 67	1 : 69	1:49

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:6,4 di tahun 2013 menjadi 1:69 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk. Adapun jumlah kendaraan per panjang jalan selama tahun 2014-2019 tersaji pada Gambar 2.57.



Gambar 2.57 Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2014-2019

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang.

Tabel 2.154 Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2014-2019

Prasarana Angkutan	ORANG/	JENIS	2014	2016	2017	2018	2019
	BARANG	PENUMPANG					
PELABUHAN	ORANG	BERANGKAT	233.365	235.200	102.670	9.834	249.341
		DATANG	211.070	196.451	105.532	9.549	214.347
	BARANG	MUAT	22.193.164	18.316.097	129.135	189.043	5.995.149
		BONGKAR	9.134.493	3.687.960	102.586	176.261	2.470.972
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	10.625	30.635	11.856	NA	60.090
		DATANG	10.876	30.858	10.354	NA	58.470
		TRANSIT	1.385	12	NA	NA	-
	BARANG	BONGKAR	9.764	64.663	NA	NA	5.787
		MUAT	1.259	71.713	NA	NA	6.948
	BAGASI	BONGKAR	348.342	161.956	NA	NA	347.572
		MUAT	103.900	171.458	NA	NA	328.676
	POS PAKET	BONGKAR	0	0	NA	NA	NA
MUAT		0	0	NA	NA	NA	
TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	NA	NA	NA	NA	NA
		DATANG	NA	NA	NA	NA	NA

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas (tanpa data tahun 2015), terlihat bahwa jumlah barang yang dimuat/dibongkar melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2019 mendominasi kegiatan pengangkutan di pelabuhan Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor-impor dilakukan melalui pelabuhan.

B. Penataan Ruang

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Luasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutan nomor 314 tahun 2016. 7.716,98 Ha atau 15,2 % dari luas seluruh wilayah budidaya (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016). Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 195.386,2 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

C. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jumlah Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2011, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 21 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan 12 unit hotel. Berikut tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2014-2018

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Bintang satu	1	2	1	1	1
Bintang dua	2	-	3	3	3
Bintang tiga	2	2	2	2	2
Bintang empat	-	-	1	1	2
Akomodasi lainnya	22	24	28	28	28
Jumlah	27	28	35	35	35

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

2.1.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 446. Kondisi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2014 menjadi 861. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas kota Dumai salah satunya diakibatkan karena kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata diatas 50%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kriminalitas	454	642	861	97*	474	665	650	594
% Diselesaikan	67,40	70,72	69,34	NA	NA	74,58	76,46	78,79

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 5 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	5 hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	5 hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
5	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5 hari
6	Izin Lokasi	5 hari
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5 hari
8	Izin Klinik	5 hari
9	Izin Klinik Gigi	5 hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	5 hari
11	Izin Apotik	5 hari
12	Izin Toko Obat	5 hari
13	Izin Laboratorium	5 hari
14	Izin Rumah Bersalin	5 hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	5 hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	5 hari
17	Izin Praktek Bidan	5 hari
18	Izin Dokter Spesialis	5 hari
19	Izin Dokter Umum	5 hari
20	Izin Dokter Gigi	5 hari
21	Izin Praktek Perawat Gigi	5 hari
22	Izin Refraksionis Opician	5 hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	5 hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	5 hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	5 hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	5 hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	5 hari
28	Izin Praktek Apoteker	5 hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	5 hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
39	Izin Masuk Kota	5 hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
45	Izin Usaha Toko Modern	5 hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 hari
47	Izin Usaha Perkebunan	5 hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow	5 hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	5 hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	5 hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	5 hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	5 hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	5 hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	5 hari
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	5 hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	5 hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	5 hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	5 hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	5 hari
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	5 hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	5 hari
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	5 hari
64	Izin Turap	5 hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	5 hari
66	Izin Usaha Peternakan	5 hari
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	5 hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	5 hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	5 hari
71	Izin Reklame/Spanduk	5 hari
72	Izin Warnet	5 hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	5 hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2011 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada table 2.158 berikut ini :

Tabel 2.158 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai

No	Jenis Izin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	934	698	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	1191	1010	1087	1029	1275	591	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	744	839	1038	878	1055	795	711	-
4	TDP PO	212	248	413	313	-	-	-	-
5	TDP CV	416	375	347	338	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	50	60	98	60	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	63	206	145	230	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	51	37	64	23	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	72	21	15	29	-	-	-	-

No	Jenis Izin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt s/d 15 M)	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Izin Lokasi	313	267	58	32	-	-	-	10
15	Izin Lingkungan	87	-	-	-	-	-	-	9
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	-	-	-	-	-	235	-
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	74	-	-	-	-	306
18	Izin Praktek Dokter	2	2	6	5	-	1	74	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	8	-	9	5	-	13	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	13	13	9	10	1	11	-	-
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	-	-	-	1	-	30
22	Izin Penyelenggaraan Optical	5	6	6	9	-	-	1	6
23	Izin Apotik	1	-	-	-	-	-	6	13
24	Izin Toko Obat	-	-	-	-	-	-	9	10
25	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	22	5	20	25	-	57	8	-
27	Izin Klinik	-	-	-	-	-	-	-	7
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1
29	Izin Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Izin Praktek Fisioterapis	115	289	496	515	477	262	-	2
32	Izin Praktek Bidan	-	11	1	17	-	-	36	18
33	Izin Usaha Perikanan	4	18	74	56	-	26	-	-
34	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	35	-	121	-	143	-	-
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	12	-	-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	3	-	-	-	-
37	Izin Racun Api	410	226	80	364	296	166	154	-
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	1	-	-	-	-	-	104
39	Izin Minuman Beralkohol	9	-	-	4	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman Beralkohol Gol B dan C	-	3	-	-	-	-	-	5
41	Izin Reklame	-	-	-	-	-	-	60	42
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	1	-	-	-	-	12	-
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	3	-	-	-	-	-	25
44	Izin Praktek Dokter Umum	-	2	8	22	30	27	-	110
	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	1	-	-	-
45	Izin Panti Pijat	20	5	-	-	-	-	-	-
46	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	6	5	-	-	-	-	211	140
47	Izin Usaha Industri Perkebunan	53	-	-	-	-	-	-	-
48	Izin Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	21	-	-	-
49	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	-	-	35	-	-	4
50	Izin Pengambilan Air	-	-	-	-	1	-	-	-
51	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	1	-	-	-
52	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	-	-	37	17	-	-
53	Sertifikat Laik Operasi	-	-	-	-	1144	890	-	-
54	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	-	-	-	-	4	1	20	-
55	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-	-	4	-	7
56	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	13	-	-

No	Jenis Izin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
57	Surat Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-	2	-	-
58	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	1	-	-
59	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	-	-	-	1	-	9
60	SIUP Cabang	-	-	-	-	-	3	-	-
61	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	-	-	10	-	-
62	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	-	-	-	-	5	-	-
63	Izin Karoke	-	-	-	-	-	12	-	-
64	Izin Salon	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Izin Permainan	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan)	-	-	-	-	-	-	28	-
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)							764	-
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta							2	-
69	Izin Klinik Rawat Jalan							-	-
70	Izin Dokter Gigi							18	-
71	Izin Praktek Dokter Gigi							-	22
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis							-	5
73	Izin Praktek Perawat Gigi							-	1
74	Izin Praktek Perawat Mandiri							-	4
75	Izin Perawat							-	-
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar							-	-
77	Izin Pengobatan Tradisional							-	2
78	Izin Depot Air Isi Ulang							4	1
79	izin Praktek Tukang Gigi							-	15
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)							25	21
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)							9	2
83	Izin Pembuangan Air Limbah							-	-
84	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)							283	-
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)							85	51
86	Pendaftaran Penanaman Modal							24	-
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)							-	7
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)							-	47
89	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		4801	4386	4048	4100	4378	3273	2779	1038

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020)

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami

peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.1.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

A. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 702 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 564. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.159.

**Tabel 2.159 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai
Tahun 2012-2018**

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah lulusan S1/S2/S3	702	817	678	725	705	496	564
Jumlah Penduduk	271.523	280.027	280.109	285.967	291.908	297.638	303 292
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%	0,18%

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019, Diolah)

2. Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,49, yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 0,49 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda penduduk tua. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 rasio ketergantungan sebesar 0,49. Dengan kata lain penduduk usia kerja di Kota Dumai masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Rasio ketergantungan di Kota Dumai sebesar 0,49 pada tahun 2019, rasio ketergantungan kota Dumai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung menurun.

3. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut tabel 2.160 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai.

Tabel 2.160 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk yang bekerja	108.704	114.066	117.280	123.550	127.897	129.421
Jumlah angkatan kerja	120.520	125.545	132.113	135.684	136.112	137.636
Rasio penduduk yang bekerja	0,904	0,909	0,888	0,911	0,940	0,940

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020)

Berdasarkan tabel di atas, pada rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai berfluktuatif diatas 0,904. pada tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,940 tahun 2018-2019 (tanpa data tahun 2016). Berikut tabel 2.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai.

Tabel 2.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	2,69	1,91	4,64	3,33	5,21	5,61	>
1.1.1.2	Laju inflasi	8,53	2,63	3,98	4,78	1,84	1,28	>
1.1.1.3	PDRB per kapita	71,87 juta	71,74 juta	73,55 juta	101,82 juta	108.787,11	117.198,81	>
1.1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	>
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	99,43	99,43	99,43	99,43	99,46	99,46	=
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,54	9,56	9,57	9,58	9,84	9,85	>
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	>100	107,27	107,20	107,79	100	105,0	>
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	>100	89,67	91,58	100,18	78,89	80,07	<
1.2.1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	85,68	73,45	78,36	87,97	86,19		>
1.2.1.6	APM SD	97,70	98,45	96,37	96,54	99,46	108,33	>
1.2.1.7	APM SMP	83,75	83,60	76,99	88,53	87,66	89,16	<
1.2.1.8	APM SMA	84,84	70,41	57,67	69,15	70,35	103,69	>
1.3.	Kesehatan							
1.3.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	14,70	13,08	14,10	13,73	7,2	7,2	>
1.3.2	Angka Kematian Balita	16,9	15,87	16,64	16,88	9,22	9,22	>
1.3.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	64,69	114,29	145,75	109,32	124,55	124,55	<
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai	70,04	70,05	70,25	70,31	70,55	70,82	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.5	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai	0	0	0,01	0,01	0,017	0,01	=
1.3.6	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida					1,13 %		
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	101	107	106	108	107	107	<
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	51	54	53	55	56	55	<
2.1.1.1.3	Rasio Guru/Murid SD	16,14	16,49	16,84	17,47	17,77	18,33	>
2.1.1.1.4	Rasio Guru/Murid SMP	13,54	9,43	12,74	14,54	14,16	19	
2.1.1.1.5	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	94,10	94,22	95,40	95,30	41,99	44,27	<
2.1.1.1.6	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	89,23	89,35	90,05	89,80	24,74	44,78	<
2.1.1.1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013	0,00	>
2.1.1.1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025	0,00	=
2.1.1.1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	>
2.1.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,85	99,94	100,00	99,96	99,98	100,00	>
2.1.1.1.11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,33	88,24	84,76	83,80	97,38	87,73	>
2.1.1.1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	106,87	79,81	108,20	110,58			<
2.1.1.1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	79,45	79,40	85,58	86,22	90,20	86,91	>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011	0,011	0,010	0,010	0,009	0,009	<
2.1.2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	0,456	0,436	0,451	0,480	0,474	0,567	>
2.1.2.3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2.948	2.877	3.763	3.707	3.999	3.870	>
2.1.2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	85,95	90,2	90,57	86,23	95,4	95,4	<
2.1.2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,13	95,58	91,83	93,2	95,4	95,4	<
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	96,67	100	100	>
2.1.2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	53,88	72,11	56,02	23,97	32,25	32,25	>
2.1.2.8	Cakupan kunjungan bayi	86,13	95,58	91,83	85,3	99,9	99,9	>
2.1.2.9	Rasio puskesmas	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86	142,86	=
2.1.2.10	Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.3	Pekerjaan Umum							
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	37,45	37,45	>
2.1.3.2	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,87	1,83	1,86	1,84	1,88	1,92	>
2.1.3.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	20 TPS	20 TPS	>
2.1.3.4	Panjang jalan dilalui roda 4	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03	4,03	>
2.1.4	Perumahan							
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	1396	1384	1386	1387	1387	1387	<
2.1.4.2	Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	1384	1386	1387	1389	891	891	=
2.1.4.3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	80,08	85,35	89,75	93,77	88,46	88,46	>
2.1.5	Penataan Ruang							
2.1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103	=
2.1.6	Perhubungan							
2.1.6.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal							
	BERANGKAT	116.080	120.225	106.390	105.890	114.702	114.702	>
	DATANG	116.025	120.401	108.116	108.008	137.437	137.437	>
2.1.6.2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan							
	BERANGKAT	233.365	123.971	130.789	129.135	129.545	129.545	>
	DATANG	211.070	103.876	100.342	102.586	110.471	110.471	>
	Rasio izin trayek					1 : 20.142		
	Persentase Layanan angkutan Darat					0.0068%		
2.1.6.3.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara							
	BERANGKAT	10.625	NA	12.465	11.856	55.484	55.484	>
	DATANG	10.876	NA	11.782	10.354	55.768	55.768	>
	TRANSIT	1.385	NA	NA	NA	NA		>
2.1.6.4.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	4.762	5.103	4.078	9.344	9.334	>
2.1.6.5.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.523	10.206	9.920	9.344	9.344	>
2.1.6.6.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	=
2.1.6.7.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	=
2.1.7	Lingkungan Hidup							
2.1.7.1.	Persentase penanganan sampah	69	69	69	70	56	56	<
2.1.7.2.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	>
2.1.8	Kependudukan dan catatan Sipil							
2.1.8.1.	Kepemilikan KTP	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	96,00%	96%	>
2.1.8.2.	Ketersediaan database kependudukan skala	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	provinsi							
2.1.8.3.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.9.1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	3.046	3.974	5.273	5.273	>
2.1.9.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	2.359	1.378	3.857	10.442	45.315	45.315	>
2.1.10	Keluarga Berencana							
2.1.10.1.	Cakupan peserta KB aktif	35.597	45.344	55.628	29.287	30 571	30 571	>
2.1.10.2.	Jumlah Keluarga	55.051	55.051	55.051	63.527	54.982	54.982	<
2.1.10.3.	Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	4.118	6.369	6.3.69	>
2.1.10.4.	Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	11.138	30.071	30.071	>
2.1.11	Ketenagakerjaan							
2.1.11.1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Dumai	117.157	122.951	129.027	135.405	135.684	137.636	>
2.1.11.2.	Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	472	1098	1308	315	1020	1020	<
2.1.11.3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	4.861	4.552	5,218	5,167	8,215	9,723	<
2.1.11.4.	Keselamatan dan Perlindungan	86	195	151	165	-		<
2.1.11.5.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	30	19	39	12	36	36	>
2.1.12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.12.1.	Persentase Koperasi Aktif	83	83	54	81	84	84	>
2.1.12.2.	Usaha Mikro dan Kecil	11.232	11.797	11.797	12.497	16.134	16.134	>
2.1.13	Penanaman Modal							
2.1.13.1.	Jumlah Perusahaan PMDN	53	57	60	63	42	42	<
2.1.13.2.	Jumlah Perusahaan PMA	62	66	69	76	76	76	=
2.1.13.3.	Nilai Investasi PMDN (Rp)	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	5.937,39	5.937,39	>
2.1.13.4.	Nilai Investasi PMA (\$)	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12		<
2.1.13.5.	Persentase Nilai Realisasi PMDN	24,10%	0,11%	0,74%	102,21%	100,57		
2.1.13.6.	Persentase Nilai Realisasi PMA	21,46%	9,60%	0,45%	1,27%			>
2.1.14	Kebudayaan							
2.1.14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	1	2	2	5	5	=
2.1.15	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.15.1.	Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	52	47	47	=
2.1.15.2.	Jumlah organisasi olahraga	25	25	29	29	29	29	=
2.1.15.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	3	2	2	2	<
2.1.15.4.	Jumlah kegiatan olahraga	8	4	4	4	3	3	=
2.1.16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.16.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	25	23	29	8	8	<
2.1.16.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	-	1 Keg.	-	1 Keg.	1 Keg.	-	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.16.3.	Rasio jumlah pamong praja	3,65	3,25	3,07	3,21	2,96	2,96	=
2.1.16.4.	Rasio linmas	58,34	56,78	56,87	57,08	55,40	55,40	>
2.1.16.5.	Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	=
2.1.16.6.	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	92%	90%	95%	96%	90%	90%	>
2.1.16.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	231	236	235	238	166	166	<
2.1.16.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1584	1590	1593	1599	1.590jumlah perpustakaan	1590	>
2.1.17	Ketahanan Pangan							
2.1.17.1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	36,84 %	26,50 %	41,36 %	35,54 %	15,18 %	34,85%	<
2.1.18	Statistik							
2.1.18.1.	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.18.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.19	Perpustakaan							
2.1.19.1.	Jumlah perpustakaan	9	12	16	15	15	15	=
	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,48	0,46	0,46	0,46	0,50	0,50	=
	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	468,68	560,64	838,64	853,10	1.242,11	1.242,11	>
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25847	57206	57206	57206	53.557	53.557	>
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Rasio produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Ha)*	2,74	2,62	2,77	3,25	3,33	3,33	>
2.2.1.2	tribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,96	>
2.2.2	Kelautan dan Perikanan							
2.2.2.1	Produksi Perikanan Laut (Kg)	890.300	676.100	236.300	525.000	571.720	650.878	<
2.2.2.2	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	170.405	156.238	190.221	218.400	256.643	256.643	>
2.2.3	Pariwisata							
2.2.4.1.	Kunjungan Wisata (org)	67.060	90.723	71.274	122.627	29.881	29.881	<
2.2.4	Perdagangan							
2.2.6.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	18,91	19,42	18,45	17,89	16,42	16,42	>
2.2.6.2.	Ekspor (\$)	14.195.672,775	17.746.297,425	10.889.408.942	16.485.319,670	7.907.814.272	12.504.032.102,11	<
2.2.6.3.	Impor (\$)	1.064.462,336	778.071.820	597.294.415	1.175.177.629	498.456.718,00	557.578.482,00	<
2.2.6.4.	Bersih Perdagangan (\$)	13.131.210,439	16.968.225,605	10.292.114,527	15.310.142,041	12.429.815,409,19	11.946.453,620,11	>
2.2.5	Perindustrian							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.2.7.1.	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	51,38	52,90	53,17	53,88	80,79	56,48	>
2.2.7.2.	Indeks Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	3,78	6,19	2,69	6,28	17,33	7,25	>
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per Jmlh Kendaraan	1 : 6,4	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 49	1 : 49	<
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk	0,006	0,006	0,005	0,004	0,004		
3.2	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1	Jumlah Penginapan/ Hotel	23	23	28	27	35	35	>
3.3.2	Angka kriminalitas	642	861	97*	474	660	594	<
3.3.3	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,18%	0,18%	<
3.3.4	Rasio penduduk yang bekerja	0,904	0,909	0,888	0,911	0,940	0,940	=

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-4

Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan sampai tahun 2019 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2019

Evaluasi capaian kinerja tahun 2019 merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2019. Tujuan evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2019 adalah untuk menilai/mengidentifikasi pencapaian kinerja serta pecapaian indikator sasaran perubahan RPJMD tahun 2016-2021 terhadap capaian perencanaan pada akhir dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Dengan total 331 program berikut penjelasan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

- 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran pada tahun 2019 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019;**
- 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2019 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019;**
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2019 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019.**
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan**
 - a. Dalam pelaksanaan Capaian Target Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan Program dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD pada pencapaian Target Evaluasi RKPD, sehingga perlu dipandang untuk merevisi guna penyesuaian kembali Indikator dan Target sasaran sesuai dengan pelaksanaan tahun perencanaan kedepan dan target akhir yang dicapai pada RPJMD Tahun 2016-2021;**
 - b. Untuk capaian tahun perencanaan 2019, Sasaran fokus yang sifatnya prioritas pembangunan (Program) yang belum tercapai namun memerlukan kerja keras yang perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan pelaksanaan pada tahun perencanaan kedepannya.**
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.**

Untuk mengetahui implikasi dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Sasaran dibawah ini

Tabel 2.162 Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
Visi Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021					
Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	100,23	96,56	3,67
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	113,51	97,16	16,35
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	100,00	99,37	0,63
Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing				
	Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	100,42	86,46	13,96
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	99,99	93,43	6,57
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	112,19	97,09	2,91
	Sasaran 3. 1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	99,68	89,41	10,59
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	76,78	93,76	6,24
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	0,00	88,74	11,26
Misi 3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan				
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	108,45	76,95	23,05
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	100,22	83,83	16,17
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	142,57	96,59	45,98
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	93,57	89,73	10,27
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan				
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	85,71	88,60	11,40
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,00	85,59	14,41
Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan				
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	127,30	90,38	36,92
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	101,01	88,92	11,08
Misi 6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemeritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah				

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	96,71	88,46	11,54
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	100,57	97,9	2,67
Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu				
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	112,36	90,04	22,32
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	92,38	81,55	18,45

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai)

- a. Jika capaian target sesuai dengan capaian maka proses dalam Perencanaan Smart serta memudahkan kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait visi dan misi yang akan dicapai di akhir masa jabatan kepala daerah. Dari tabel diatas , capaian sasaran kinerja 90%- 100% sebanyak 17 sasaran. Dari 21 sasaran**
- b. Jika Tidak maka target kinerja program akan berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang akan dicapai sehingga pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan (Inkonsistensi).**

Dari tabel diatas sasaran yang belum mencapai target sasaran dan masih dibawah 40% sebanyak 2 sasaran, yaitu sasaran Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan capaian 0%, dan sasaran Meningkatkan investasi di Kota Dumai dengan capaian sebesar 34,66%.

Dimana indikator sasaran dari "Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga" adalah 1). Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA) dengan Target Ranging 5 dan realisasi ranging 10 atau capaian sebesar 0%. Yang didukung oleh 1). Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan pagu Rp. 734.308.300 dan realisasi Rp. 685.623.800 atau capaian sebesar 93,37%, dan 2). Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dengan pagu Rp. 928487650 dan realisasi sebesar Rp. 789.899.850 atau capaian sebesar 85,07%. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran program tersebut sehingga tidak semua cabang olahraga yang dipertandingkan yang tidak bisa diikuti.

Indikator Sasaran dari “Meningkatnya investasi di Kota Dumai” adalah 1). Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target Rp. . 5.904,033,104,282 dan realisasi sebesar Rp. 5.937,39 triliun atau capaian sebesar 100,57%. Yang didukung oleh 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan pagu anggaran Rp. 941.314.800 dan realisasi sebesar Rp. 488.092.788 atau capaian sebesar 51,85%, dan terdapat 2 kegiatan yang menyebabkan realisasi anggaran rendah dan berakibat tidak tercapainya indikator sasaran Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yaitu :

- a) *Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal*. Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya koordinasi terkait dengan kegiatan penanaman modal di kota dumai. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 308.901.900,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini kurang efektif dan maksimal untuk dilaksanakan ada beberapa nomenklatur pada rekening belanja barang dan jasa (Narasumber/tenaga ahli).
- b) *Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*. Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya Laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel selama 12 bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 167.437.900,- terealisasi sebesar Rp. 89.905.000,- atau sebesar 53.69% Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pengawasan dan pembinaan kepada investor/perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Dumai. sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara online (Online Single Submission) terdapat beberapa pemangkasan jenis perizinan maka para pengusaha diharuskan untuk mendaftarkan kembali perizinannya secara Online untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga objek pengawasan jadi berkurang dari target yang telah direncanakan.

1. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Bagi sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan melalui penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan

penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi di tiap OPD kemudian beberapa indikator program perlu menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kedepannya;

- b. Meningkatkan komitmen OPD untuk melaksanakan sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran untuk menjaga konsistensi tersebut.

Untuk tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019, dan realisasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 akan disajikan pada lampiran 1 dokumen RKPD Tahun 2021.

2.2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Membandingkan Capaian kinerja antara kinerja Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional.

Tabel 2.163 Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)

No.	Indikator	Target Kota	Capaian Kota	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan ekonomi	4,42	5,21%	2,34%	5,2
2	PDRB perkapita	107.894	108.787,11	110.826,76	55.986,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,40%	6,04%	5,97	5,28
4	Indeks Gini	0,40	0,34	0,33	0,382
5	Tingkat kemiskinan	<4,5%	3,71%	7,39	9,41
6	IPM	73,96	74,06	72,14	71,39

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2019)

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa indikator Pertumbuhan ekonomi pada kota Dumai melebihi capaian provinsi Riau dan dibawah capaian Nasional. PDRB Perkapita kota dumai dibawah capaian provinsi Riau dan diatas Nasional. Indikator indkes gini kota dumai dan provinsi Riau serta nasional masih termasuk katergori sedang (dimana range kategori sedang antara 0,35 -0,5). Indikator tingkat kemiskinan kota dumai masih lebih baik dari provinsi Riau dan Nasional. Untuk indikator IPM Kota Dumai lebih tinggi

dari provinsi Riau dan Nasional. Indikator Tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai masih lebih Rendah dari Provinsi Riau dan Nasional.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Dumai terus berusaha melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seiring perjalanan waktu dan perkembangan kota, tentu saja kota Dumai selalu dihadapkan oleh problematika pembangunan yang juga semakin kompleks baik yang dipicu oleh isu pembangunan yang berasal dari internal kota Dumai maupun isu yang berasal dari eksternal kota Dumai bahkan global. Isu-isu strategis tersebut terwujud dalam permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus disikapi dengan bijak serta menjadi salah satu rujukan dalam menyusun rencana kerja pembangunan kota Dumai kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, sumberdaya manusia, ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, serta pemerintahan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional Tahun 2016-2019, Kota Dumai diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional dengan fokus sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai *outlet* pemasaran wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan.

Sebagai kawasan perbatasan, kota Dumai diarahkan pada pengembangan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) wilayah Sumatera, dimana pengembangannya diarahkan pada:

- 1) Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.**
- 2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah-rencana detail tata ruang kawasan perbatasan.**

Ditetapkannya kota Dumai sebagai pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan strategis nasional tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peluang pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat. Oleh sebab itu untuk memperkecil hilangnya peluang pembangunan dan untuk memaksimalkan agar hasil penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ini mampu secara komprehensif mengakomodir kebutuhan pembangunan ditahun 2019, maka beberapa isu pembangunan yang telah diidentifikasi berdasarkan problematika yang telah diuraikan diatas maka disimpulkan sebagai berikut:

a. Aspek Geografi dan Demografi

- 1) Kota Dumai Masih Dihadapkan dengan kondisi wilayah rawan bencana terutama asap yang menjadi agenda rutin walaupun sanksi tegas telah ditetapkan namun kondisi ini masih saja terjadi.
- 2) Genangan Air baik yang bersifat curah hujan maupun kondisi pasang laut yang masih terdapat di beberapa titik di kota dumai.
- 3) Ketimpangan kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di tiga kecamatan Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.
- 4) Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Infrastruktur Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan wilayah perkotaan karena memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi fungsi dan pelayanan kota kepada masyarakat baik dari segi fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kota Dumai sehubungan dengan kualitas dan jumlah pelayanan infrastruktur yang tersedia dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air minum yang merata dan berkeadilan;**

- 2) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pemukiman penduduk (sanitasi, persampahan dan drainase);
- 4) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- 5) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;
- 6) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- 7) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul dari Transportasi Daerah;
- 8) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);
- 9) Sistem transportasi wilayah yang kurang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- 10) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal;
- 11) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sektor transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- 12) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;
- 13) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- 14) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang terutama wilayah di pinggiran;
- 15) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak;
- 16) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem paritispatif untuk prinsip 3R;

- 17) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- 18) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- 19) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air limbah, dan persampahan.
- 20) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif dikarenakan penggunaan lahan oleh masyarakat Kota Dumai untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya.

c. Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan isu yang berkembang secara internasional pada dasawarsa terakhir ini. Demikian pula di Indonesia dengan proses demokratisasi yang berjalan pesat, tuntutan untuk mewujudkan *good governance* menjadi komoditas penilaian masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan .

Untuk menuju pemerintahan Kota Dumai yang memenuhi sistim nilai yang berkembang tersebut sudah dilakukan berbagai upaya yang relevan, misalnya pembentukan LPSE, penyusunan berbagai dokumen akuntabilitas (LPPD, ILPPD, LAKIP, dsb), serta peningkatan SDM dan penyelenggaraan berbagai forum demokratisasi. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan lagi dalam artian belum mencukupi untuk mencapai tataran pemerintahan yang diharapkan masyarakat terutama yang secara paripurna berlandaskan ciri pemerintahan yang baik. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum

dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat.

2. Ego sektoral yang masih muncul pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menghambat sinergitas dan efektivitas pembangunan daerah.
3. Belum terwujudnya manajemen dalam penerapan aplikasi yang berbasis kinerja.
4. Struktur organisasi pada Pemerintah Daerah yang belum proporsional, sistem manajemen pekerjaan, tanggungjawab dan beban kerja.
5. Belum terwujudnya E-Government yang transparansi dalam segala lini terkait informasi dan data ke publik serta Pelaksanaan pelayanan publik yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat hal ini ditandai dengan proporsi IKM dari 71,04% tahun 2015 dan 72 % pada tahun 2016.

d. Aspek daya Saing Daerah

1. Bidang Tenaga Kerja

Salah satu pengaruh perkembangan sebuah kota adalah peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Menurut perkiraan BPS, Indonesia akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030. Bonus Demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia non produktif. Kondisi ini akan menjadi masalah dan berujung pada meningkatkan pengangguran terbuka jika tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah ataupun swasta.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, kota Dumai pada tahun 2018 memiliki angkatan kerja usia produktif yaitu 127.897 jiwa dan tingkat pengangguran 8.215 jiwa dengan tingkat pengangguran 6,04%. Hal ini mengindikasikan bahwa kota Dumai sedang menuju proses bonus demografi dan jika tidak diantisipasi dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat, maka jumlah pengangguran kota Dumai kemungkinan akan sulit untuk dikurangi.

Hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah kondisi pasar kerja yang dibutuhkan sudah mengarah pada jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu. Hal ini mengakibatkan pasar kerja yang terserap hanyalah dari angkatan kerja yang sudah memenuhi kriteria dari segi jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu yaitu angkatan kerja yang memiliki

kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan dari pasar kerja yang tersedia tersebut.

Bertambahnya lapangan pekerjaan baru yang ada di Kota Dumai, nyatanya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap terserapnya angkatan kerja lokal dari peluang ketersediaan lapangan kerja baru tersebut. Kemampuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan dari peluang lapangan kerja tersebut nyatanya belum mampu dipenuhi dari angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai. Hal ini menyebabkan peluang pengisian lapangan kerja baru tersebut dipenuhi oleh angkatan kerja yang berasal dari luar Kota Dumai yang memenuhi kualifikasi kerja serta memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang memenuhi kriteria pasar kerja tersebut, sehingga peluang pemenuhan pasar kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh angkatan kerja yang tersedia di Kota Dumai.

Namun, perlu dicatat bahwa untuk mendukung perkembangan Kota Dumai yang cukup pesat sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan diperlukan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di sekitarnya. Penduduk kota ini diharapkan dapat menjadi tenaga kerja berkualitas. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan ketrampilan dan penguasaan teknologi. Melalui penguasaan teknologi serta ketrampilan yang memadai diharapkan penduduk kota ini dapat mengambil peluang dan manfaat dari Kota Dumai yang akan semakin berkembang pesat terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain itu dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kota Dumai diarahkan sebagai pelabuhan barang bagi daratan daerah belakangnya (*hinterland*) yang terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera yang menghubungkan berbagai Pusat Ekonomi Nasional bahkan dapat terhubung hingga ke Pulau Jawa. Kota Dumai memiliki fungsi dan peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut *hinterland* lainnya, termasuk Pekanbaru. Tantangan yang datang dari pesatnya perkembangan lapangan kerja di Kota Dumai adalah datangnya pekerja migran yang secara langsung menjadi saingan tenaga kerja asal Dumai untuk berkompetisi dalam merebut lapangan pekerjaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja di Kota Dumai adalah Kemampuan dan

Keterampilan Angkatan Kerja belum kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Pasar Kerja. Sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Dumai harus mampu mempersiapkan angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai agar memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada maupun yang akan tersedia.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja yang dihadapi kota Dumai :

- 1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja melalui pelatihan padat karya.**
- 2. Belum meratanya komposisi tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan.**
- 3. Kurangnya rekrutmen tenaga kerja melalui bursa-bursa pekerjaan.**
- 4. Perlunya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal ini terkait dengan penyesuaian UMK tenaga kerja.**

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

2. Bidang Ekonomi dan Iklim Berinvestasi

Pembangunan dibidang ekonomi kota Dumai secara umum dapat dilihat dari pencapaian kontribusi setiap sektor usaha pada PDRB, pergerakan inflasi, tingkat kemiskinan dan investasi modal dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Dumai di Bidang Ekonomi :

- 1. Masih Rendahnya kontribusi Sektor pertanian (5 sub sektor) dalam perekonomian sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang tersebut.**
- 2. Inflasi kota Dumai masih bersifat “fully driven by issues” sehingga harga masih mudah berfluktuasi akibatnya sangat mudah terjadi inflasi meskipun masih dalam tingkat yang wajar.**
- 3. Perlunya optimalisasi strategi pengurangan tingkat kemiskinan di kota Dumai.**
- 4. Adanya kecenderungan berkurangnya investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga berpengaruh terhadap peluang kerja yang ada di Kota Dumai.**
- 5. Memudahkan proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.**

6. Perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan dalam rangka mempermudah akses permodalan UMKM dan penyerapan tenaga kerja local.

3. Bidang Sosial Budaya

Sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Khususnya saat ini, ketika setiap wilayah dihadapkan pada persaingan global, SDM memiliki peran kunci dalam pengembangan sebuah wilayah. Dalam era persaingan global diperlukan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu potensi untuk pengembangan wilayah kota ini. Angka melek huruf pada tahun 2018 berkisar pada angka 99,46%, bahkan selama empat tahun terakhir angka melek huruf mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh penduduk Kota Dumai sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jika seluruh penduduk sudah melek huruf akan lebih mudah untuk menerima pengetahuan, inovasi maupun teknologi baru yang berkembang cepat di era globalisasi ini. Pengetahuan merupakan kunci keberhasilan atau kemajuan manusia. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baru akan memudahkan dan mempercepat perkembangan bagi sebuah wilayah, oleh karena penguasaan pengetahuan dan ketrampilan baru akan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk mengolah potensi dan sumber daya lokal yang tersedia. Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dibutuhkan pendidikan, ketrampilan dan kreativitas penduduk yang cukup memadai untuk mampu menangkap peluang dan kesempatan yang tersedia.

Dari aspek Pendidikan, Dilihat dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Dumai seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan pembangunan daerah Kota Dumai di bidang pendidikan dapat di katakan cukup baik, namun terdapat beberapa isu yang menjadi penting yakni

1. Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah dilihat per kecamatan, disitu terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah kecamatan yang berada di wilayah pusat kota, jauh lebih baik dari rasio kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah fasilitas dan akses pelayanan pendidikan yang ada di Kota Dumai belum tersebar secara merata dan banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Masih kurangnya jumlah fasilitas dan pelayanan pendidikan di wilayah kecamatan terluar Kota Dumai terlihat dari perbedaan nilai angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yang mana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai yang jauh lebih baik dengan perbedaan yang cukup signifikan daripada kecamatan yang berada di luar wilayah pusat Kota Dumai.

1. Belum tersedianya Gedung kesenian, yang mana selama ini untuk Gedung Lam Dumai dan Bukit Gelandang menjadi tempat berkesenian.
2. Sanggar seni dan budaya yang dibina pada tahun 2017 realisasinya adalah sebanyak 40 sanggar yang dibina. Pada tahun 2018, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih pada jumlah yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 40 sanggar. Capaian ini masih konstan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Fokus kesehatan, berikut beberapa indikator menjadi dasar pelayanan dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 58 kasus. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 7,2 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 11,63 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2019 mengalami jauh mengalami penurunan.
2. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 74 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 9,00 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita.

3. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 10 kasus. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, di mana angka kematian ibu sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 dari total 310 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 83,2%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 85,39%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +.
5. Pada tahun 2019 ditemukan 7 kasus balita dengan gizi buruk, dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,01%.
6. Jumlah dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukkan nilai yang lebih baik untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dibanding kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Fokus pariwisata, sebagai salah satu pintu masuk dari luar negeri, kota dumai sangat rentan untuk dipengaruhi oleh dari segala asepek kehidupan. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam nilai, sikap, dan mental pemuda khususnya dan masyarakat Kota Dumai umumnya yang sangat erat dengan budaya daerah, sehingga jati diri masyarakat yang berbudaya daerah secara cepat akan hilang. Keadaan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapan pun. Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan kepemudaan, pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerah secara global dan menjadi .

Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 12.755 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2019 terjadi peingkatan kunjungan wisatawan menjadi 12.908 wisatawan dengan rincian kunjungan domestik sebanyak 81.202 orang,

kunjungan mancanegara sebanyak 12.908 orang. Penurunan perkembangan sektor pariwisata dalam jangka panjang dapat menghilangkan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk Kota Dumai. Hal ini disebabkan sektor pariwisata mempunyai efek pengganda terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi lain melalui pembelanjaan yang akan dilakukan oleh wisatawan. Selain itu berkembangnya sektor pariwisata juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan Sosial budaya yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat
2. Perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan
3. Belum meratanya rasio ketersediaan sekolah diluar dilihat per kecamatan.
4. Belum tersedianya Gedung kesenian dan kurangnya pembinaan terhadap grup kesenian.
5. Perlunya pengawasan terhadap kosmetik, obat dan makan/minuman yang beredar di masyarakat.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

e. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Isu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini antara lain meliputi bagaimana melibatkan (*Involving*) mereka dalam berbagai forum perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan pembangunan. Komitmen Pemerintah Kota Dumai terhadap isu *good governance* dalam agenda pencapaian SDG's sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi hal yang mutlak untuk diwujudkan yakni empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dapat tercapai. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.58 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs).



Gambar 2.58 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs)

Untuk itu pemerintah kota Dumai berdasarkan Rancangan RAD SDGs telah menetapkan empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum yang dibagi kedalam 17 tujuan sebagai berikut :

1. Pilar Pembangunan Sosial

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Sosial terdiri dari 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun; 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia serta 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.164 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun , tabel 2.165 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, tabel 2.166 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, tabel 2.167 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia, tabel 2.185 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.

Tabel 2.164 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,5	<4,5	<4,5
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengganggu, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	51.87%	66.00%		
	1.3.1 (a) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25%	8%	10%	12%
	1.3.1(c) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	82%	85%	90%
	1.3.1(d) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15%	50%	52%	53%
	1.3.1 (e) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan	-	40%	45%	50%
	1.3.1 (f) Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	20%	40%	45%	50%
	Rasio lulusan S1				
	1.3.1 (g) Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.3.1(h) Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	-	30%	40%	50%	
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa	1.41 Persentase penduduk berakses air minum	20,67 %	34,80%	35,00%	53,76%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.4.1(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	87.10	95	95	
	1.4.1(b). Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94.20%	95.00%	95.00%	
	1.4.1 (d) Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5 Ha	5.5Ha	6 Ha	6,5 Ha
	1.4.1 (e) Panjang Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	2,00%	3,48%	3,50%	3,55%
	1.4.1 (f) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	7%	7%
	1.4.1 (g) Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,00%	2,83%	2,85%	2,90%
	1.4.1 (h) Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	356	416	437	457
	1.4.1 (i)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	99,75%	99,92%	100%
	1.4.1 (j)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	85,26%	95,76%	99,26	100
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	1.5.1 (a) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90%	100%	100%	100%
	1.5.1 (c)Persentase PMKS yang tertangani	25%	27%	28%	30%

(Sumber : Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.165 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.41	5%	5%	3%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level I Yang harus diberikan sarana kesehatan				
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.00	25	20	
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta		25	20	
	2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	0.00	5	5	
	Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak		95,90 %		
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	74.00	80	85	
2.3 Pada tahun 2030, Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.3.1 Angka Kecukupan Protein	50 (gram/kapita/tahun)	50 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)
2.4 Pada tahun 2030, Meningkatnya Produksi Pertanian	2.4.1 Produksi komoditi pertanian	20.154 TON	20.596 TON	20.818 TON	21.041 TON
	2.4.2 Produksi komoditi perkebunan	82.080 TON	84.256 TON	84.756 TON	85.256 TON
	2.4.3 Populasi Ternak	5.253 Satuan Ternak	5.883 Satuan Ternak	6.093 Satuan Ternak	6.303 Satuan Ternak
2.5 Pada tahun 2030, Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis serta menurunnya kasus cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	2.5.1. Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	35 Kasus	23 Kasus	17 Kasus	11 Kasus
	2.5.2 Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	35 Kasus	25 Kasus	20 Kasus	15 Kasus
	2.5.3. Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	17 Kasus	12 Kasus	17 Kasus	11 Kasus

Tabel 2.166 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) yang terdata (terlaporkan).	109.32	110	102	102
	3.1.2* Persentase kunjungan kehamilan (ANC) yang memenuhi standar minimal 4 kali (K4)	91.72	85	90	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	3.1.2(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	81.00	75	80	
	Cakupan pelayanan nifas		97,30 %		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		99,80 %		
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	16.88	28	26	25
	3.2.1* Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	13.73	21	19	18
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	9.84	6	5	6,1
	3.2.3* Rasio posyandu per Satuan Balita		7.90		
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		4,00		
	3.2.4* Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.83		
	3.2.5 Cakupan Pnemumonia		85,50 %		
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	36	62	68	
	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.71	0,81	1	< 1
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	58.58	70	70	
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.06	1	1	1
	3.3.4 Tingkat kematian karena malaria		1		
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	17	<30	<30	
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk			5,27	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk		2,004 %		
	3.3.5.(a) eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	sudah melaksanakan TAS I,II ,III dan mendapat sertifikat eliminasi			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	18.75	19.05		
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		5.8	5.6	
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	49.02	25	23	
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	7.13	16	14	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.4.1.(b) Unmeet need pelayanan kesehatan				
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	44.68	75.00	100.00	100.00
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3 Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekecualian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1 Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	2.57	3.00	3.20	3.20

Tabel 2.167 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	> 100 %	100 %	100 %	100 %
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLPT/MTs/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	100%
	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	83,23 %	88,23 %	93,23%	96,73%
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan	4.2.3 (a) Indikator (PAUD) Usia 0-4 Tahun yang berpartisipasi pendidikan PAUD.		90,73	93,23	96,73%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar					
	4.6.1 Persentase masyarakat melek huruf	99,43 %	99,46 %	99,47%	99,48%
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.c.1 Guru yang memenuhikualifikasi S1/ D-IV, mendapatkan Sertifikasi, memenuhi Sertifikasi, Sekolah yang mengimplementasikan MBS, dan Pendidik tentang pemahaman Kurikulum		94,58%	97,58%	100%
4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS					

Tabel 2.168 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.2 (a) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	75%	85%	90%	91%
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	13,33%	0%	16,67%	17%
	5.5.2 Rasio PNS Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai	51,8%	52,8%	53,0%	6,0%

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Ekonomi terdiri dari 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi; 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.169 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi , tabel 2.170 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi, tabel 2.171 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara.

Tabel 2.169 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara berkembang.	8.1.1* Pertumbuhan ekonomi	4.64	4.32	4,37	4,42
	8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)	93,003 juta rupiah	107,894 juta rupiah	113,370 juta rupiah	119,123 juta rupiah
	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita	74.705.000	48.242.000	48.242.000	121.044,95
	8.1.1.(a) PDB per kapita	5%	5%	5%	5%
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25	30	30	30
	8.9.1. (a) Kunjungan wisata	42,42	43	45	48

Tabel 2.170 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a) Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (%)	55,57 %	57,59 %	56,85%	58,35%

Tabel 2.171 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,57	<4,5	<4,5
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 (A)Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan	425 Perusahaan

3. Pilar Lingkungan Hidup

Untuk pencapaian target pilar Lingkungan Hidup terdiri dari 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.172.

Tabel 2.172 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Target (1B9:G21)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan..	11.1.1.(a) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	7%	7%
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	4 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah

4. Pilar Pembangunan Hukum

Untuk pencapaian target pilar Pembangunan Hukum terdiri dari 1. Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.173

Tabel 2.173 Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. RAD Anti Korupsi	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	WDP(2016)	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA		1,99 %		

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	Bagi hasil Kota		25,54 %		
	16.6.1.(b) Tersusunnya LAKIP Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	13,33% (2014-2019)	16,67%	16,67%	16,67%
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0%	0,09%		
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(b) Kepemilikan Akta Kelahiran	80,2 %	90%	93%	95%
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(d) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12 kasus	48 kasus	60 Kasus	72 Kasus
	16.10.2.(e) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan	425 Perusahaan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) **Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP;**
- b) **Belum meratanya sebaran guru yang masih terpusat di daerah kota sehingga daerah-daerah terpencil masih kekurangan guru untuk Perluasan Akses Pendidikan;**
- c) **Masih adanya tenaga pendidik/tenaga kependidikan/Kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditentukan;**
- d) **Terbatasnya dan masih belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan pada level dasar dan menengah yang berkompeten untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan;**

- e) **Manajemen pengelolaan pendidikan belum efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan;**
- f) **Belum meratanya penyediaan dan/atau pengembangan system pembelajaran, data dan informasi pendidikan berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah;**
- g) **Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;**
- h) **Kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pengembangan sector pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan murah/terjangkau;**
- i) **Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai;**

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) **akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai;**
- b) **Masih kurangnya akses, mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, serta masih terbatasnya pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis teknologi;**
- c) **Belum tibanya system administrasi kependudukan, system pelaporan dan pencatatan sipil serta lemahnya pengawasan oleh dinas terkait;**
- d) **Penyakit Demam Berdarah (DBD) dan Malaria masih merupakan penyakit endemis di Kota Dumai. Kasus malaria dan DBD masih cukup signifikan;**
- e) **Ketersediaan peralatan kesehatan termasuk yang ada masih kurang dan tidak layak termasuk alat transportasi darat penunjangpelayanankesehatan;**

- f) Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar;
- g) Sistem layanan kesehatan pada beberapa lokasi masih menanggung beban lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya, termasuk mekanisme pengelolaannya;
- h) Kapasitas pelayanan puskesmas dan RSUD yang belum optimal (sarana dan prasarana);
- i) Masih rendahnya kompetensi tenaga kesehatan/paramedic terutama bagi Puskesmas di daerah terpencil dan/atau jauh dari perkotaan;
- j) Kurangnya sarana dan prasarana informasi yang berbasis teknologi tentang arti pentingnya kesehatan ibu dan anak setelah persalinan (proses melahirkan ditolong oleh tenaga medis);
- k) Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga kebijakan strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan;
- l) Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer;

- b) **Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;**
- c) **Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);**
- d) **Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;**
- e) **Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;**
- f) **Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;**
- g) **Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak; Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya;**
- h) **Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah;**

4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) **Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;**
- b) **Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar sanitasi pemukiman penduduk (limbah, persampahan dan drainase);**
- c) **Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;**

5. **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) **Belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana;**

- b) Belum optimalnya skill Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Dumai;**
- c) Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;**
- d) Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah;**
- e) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas;**
- f) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;**
- g) Penegakan hukum (*law enforcement*) belum dapat berjalan sebagaimana mestinya;**
- h) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berkenaan dengan karakteristik perkotaan dan masyarakat yang heterogen.**

6. Urusan sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka;**
- b) Keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK;**
- c) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;**
- d) Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas;**
- e) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat;**
- f) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;**
- a. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan.**
- b. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.**
- c. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).**

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat pengangguran terbuka masih diatas 6,47%;**
- b) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja atau belum adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang ditandai oleh masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;**
- c) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;**
- d) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;**
- e) Terbatasnya system informasi pasar kerja dan pengawasan terhadap penduduk pendatang (pencari kerja);**
- f) Belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan dengan dunia usaha;**

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih belum optimal dan belum terpadunya pendidikan tentang bahaya seks bebas bagi remaja;**
- b) Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;**
- c) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;**
- d) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;**
- e) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang;**
- f) Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan.**

3. Urusan Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;**

- b) Tingginya ketergantungan impor pangan;**
- c) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;**
- d) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;**
- e) Kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai, serta belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;**
- f) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;**
- g) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;**

4. Urusan lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara ambien;**
- b) Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;**
- c) Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk mandi dan cuci;**
- d) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;**
- e) Pencemaran sungai yang mengalir kota Dumai. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi tempat pembuangan sampah;**
- f) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem partisipatif untuk prinsip 3R;**
- g) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;**
- h) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;**

- i) Bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana tahunan;**
 - j) Perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi;**
 - k) Degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut;**
 - l) Daerah aliran sungai (DAS) dikuasai masyarakat untuk bertempat tinggal;**
 - m) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai;**
5. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
- a) Rendahnya kesadaran penduduk terhadap administrasi kependudukan;**
 - b) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk;**
 - c) Administrasi penduduk yang belum terdokumentasikan secara baik melalui e-KTP dan susahnya mengakses data kependudukan; sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya;**
 - d) Belum terigrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan;**
6. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat**
Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
- a) Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP;**
 - b) Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;**
 - c) Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang;**
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah;**
 - e) Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat;**

f) Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan;

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Pemahaman terhadap pendidikan alat reproduksi bagi remaja masih dianggap tabu bagi orang tua;

b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana;

c) Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk;

d) Kualitas pelayanan KB belum maksimal;

e) Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk;

f) Belum optimalnya ketahanan keluarga;

8. Urusan Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;

b) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul Transportasi Daerah;

c) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);

d) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;

e) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sector transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;

f) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;

g) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan;

h) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;

- i) Masih tingginya *overloading* angkutan barang berakibat pada tingginya kerusakan jalan;
 - j) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal serta rendahnya pemanfaatan pelabuhan udara Pinang Kampai;
9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
- a) Belum optimalnya pengelolaan koperasi;
 - b) Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi;
 - c) Terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa;
 - d) Kurangnya promosi hasil produksi UMKM;
 - e) Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk umumnya belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah;
 - f) Permasalahan kemiskinan di daerah Hinterland dan Provinsi tetangga dapat berimbas meningkatnya urbanisasi di Kota Dumai;
 - g) Program pengentasan kemiskinan belum terpadu antar OPD;
 - h) Belum optimalnya Pengembangan instrumen pembiayaan non-konvensional untuk UMKM;
 - i) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
 - j) Rendahnya kemampuan managerial pengelola;
 - k) Rendahnya kapasitas SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan;
 - l) Daya saing produk koperasi, usaha kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk daerah lain;
 - m) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk;
 - n) Belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan koperasi oleh *stakeholders* terkait.

10. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum terbitnya peraturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga hal ini berdampak pada penerbitan izin

yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin di Bidang Penanaman Modal;

- b) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
- c) Belum optimalnya Pengembangan sistem insentif terhadap investasi;
- d) Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait;

11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Prasarana Kepemudaan (gedung) yang ada di Kota Dumai belum memadai;
- b) Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi para pemuda yang telah mengikuti pelatihan;
- c) Masih tingginya penggunaan Narkoba dikalangan pemuda;
- d) Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda;
- e) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang mengakibatkan rendahnya kualitas atlit;
- f) Pembinaan olah raga belum optimal;
- g) Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan kegiatannya;
- h) Rendah pembinaan manajemen OKP.

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika :

- a) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
- b) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik;
- c) Belum semua OPD memiliki website resmi dan sebagian besar website yang terdapat pada OPD belum memuat data perkembangan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi OPD tersebut sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah

- sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum dimanfaatkannya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya;
 - e) Belum ada data terkait dengan OPD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat;

13. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman masyarakat tentang nilai - nilai budaya masih rendah;
- b) Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata kota Dumai;
- c) Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya;
- d) Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah;
- e) Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah;
- f) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- g) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- h) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;

14. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- b) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;
- c) Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas;
- d) Kerjasama perpustakaan daerah dengan perpustakaan yang memiliki referensi buku yang lengkap baik nasional dan internasional serta perguruan tinggi yang belum terjalin dengan baik (terkoneksi);
- e) Kurangnya minat baca masyarakat;

15. Urusan Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD masih belum optimal sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b) Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis;

C. Urusan Pilihan

1. Urusan pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Lapangan usaha pertanian belum mampu menjadi sektor basis dan tidak memiliki keunggulan kompetitif sehingga belum mampu menjadi sektor yang mampu memicu penambahan pendapatan penduduk;
- b) Terbatasnya kemampuan petani dalam teknologi pasca panen;
- c) Harga sarana dan prasarana pertanian yang tinggi;
- d) Harga produk pertanian yang cukup fluktuatif;
- e) Rendahnya produksi komoditas pertanian;
- f) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian masih rendah;
- g) Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- h) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;

- i) **Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain;**
- j) **Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;**
- k) **Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen;**

2. **Urusan Kelautan dan perikanan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. **Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut;**
- b. **Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan;**
- c. **Ketrampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan;**
- d. **Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha peternakan dan perikanan;**
- e. **Rendahnya produktivitas perikanan;**
- f. **Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum;**
- g. **Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;**
- h. **Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan;**
- i. **Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah;**
- j. **Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur;**

3. **Urusan Perindustrian dan Perdagangan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sektor industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran merupakan 2 sektor dari beberapa sektor yang menjadi sektor basis dan prospektif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif;
- b) Belum terciptanya sistim pembinaan yang efektif dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil menengah (UDKM) sehingga pembinaan yang dilaksanakan terkesan tidak efisien;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dari produk-produk Industri Kecil dan Menengah sehingga pemasaran produk IKM Kota Dumai masih bersifat lokal dan sulit berkembang;
- d) Sering terjadi gangguan terhadap kelancaran arus barang khususnya bahan pokok masyarakat termasuk BBM dan gas elpiji sehingga mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga dipasaran;
- e) Belum optimalnya akses permodalan bagi IKM;
- f) Sarana dan Prasarana Penujang kebersihan pasar belum lengkap;
- g) Belum maksimalnya penataan pedagang kaki lima dan keterbatasan lahan untuk merelokasi PKL;
- l) Sektor informal (PKL) di Kota Dumai yang berkembang sangat cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif (efek samping akibat suatu kegiatan ekonomi) bagi kegiatan lainnya;
- m) Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun, supermarket dan toserba pada skala retail yang mengakibatkan turunnya daya saing pasar tradisional secara langsung;
- n) Belum optimalnya Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional untuk membiayai PKL;
- o) kelompok penduduk yang tergolong MBR sangat rawan terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok;

4. Urusan Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- b) Rendahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Dumai;
- c) Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata;
- d) Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan;
- e) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
- f) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana;
- g) Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan;
- h) Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai;

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal;
- b) Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- c) Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan;
- d) Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- e) Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah;
- f) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah;
- g) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;

- h) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;**
- i) Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi tentang regulasi jasa konstruksi;**

2. **Urusan Pengawasan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);**
- b) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input terhadap manajemen pemerintahan daerah;**
- c) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;**
- d) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;**
- e) Penegakan supremasi hukum masih lemah;**

3. **Urusan Perencanaan Pembangunan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;**
- b) Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;**
- c) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;**
- d) Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;**
- e) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;**
- f) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;**
- g) Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan**

pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;

- h) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;**
- i) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;**
- j) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;**

4. Urusan Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan Potensi keuangan daerah belum tergalai secara optimal;**
- b) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum tergarap secara optimal akibat data potensi usaha yang menjadi obyek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik;**
- c) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.**
- d) Kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya belum sebagaimana yang kita harapkan.**
- j) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah belum optimal;**
- k) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;**
- l) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Serta Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas;**

5. Urusan Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;**

- b) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;**
- c) Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal;**



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional Yang Terkait Dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2021 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional untuk tahun 2021 untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain :

1. Meningkatkan Pertumbuhan potensial Indonesia yang meliputi :
 - a. Transformasi structural untuk peningkatan kesejahteraan seperti revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan dan transformasi sektor jasa.
 - b. Penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional, Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal, dan menjaga keberlanjutan fiscal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
2. Menjaga stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang meliputi :
 - a. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkatan pendapatan
 - b. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan
 - c. Memperluas akses dan kesempatan
 - d. Mempertahankan keseimbangan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa Dumai telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pada sistem perkotaan nasional. Sebagai PKN, Kota Dumai akan dilakukan percepatan pengembangan sebagai kota- kota utama kawasan perbatasan dalam bentuk pengembangan/peningkat fungsi kota. Sedangkan sebagai PKSN, Kota Dumai akan dilakukan revitalisasi dan percepatan pengembangan sebagai kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam bentuk pengembangan/peningkatan fungsi. Sedangkan berdasarkan

struktur ruang nasional, kota Dumai akan akan dilalui oleh 2 (dua) jaringan jalan bebas hambatan antar kota yang masih dalam tahap pengembangan yaitu :

1. Rute Pekanbaru-Kandis-Dumai
2. Rute Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.

Adapun dari sisi kepelabuhanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pelabuhan Kota Dumai ditetapkan sebagai pelabuhan utama dimana direncanakan Pelabuhan Kota Dumai akan dikembangkan untuk pemantapan pelabuhan utama dan untuk pemantapan pelabuhan angkutan penyeberangan. Sedangkan dari sisi energy, Pemeirntah pusat telah menetapkan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik kota Dumai masuk dalam tahapan pengembangan untuk peningkatan kapasitas pembangkitan tenaga listrik. Terkait sektor unggulan, Kota Dumai telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan andalan Duri-Dumai dan sekitarnya. Adapun Kawasan Andalan Duri-Dumai dan sekitarnya masuk dalam tahapan pengembangan:

1. Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan
2. Pengembangan kawasan andalan untuk perkebunan
3. Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan
4. Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian
5. Pengembangan kawasan andalan untuk minyak dan gas bumi.

Berkenaan dengan Wabah COVID-19, Pemerintah Pusat melalui Bappenas melakukan reformulasi proyeksi target makro nasional yang merupakan perkiraan kemungkinan kondisi yang akan terjadi. Pengaruh COVID-19 menambah jumlah penduduk dan jumlah penganggur (jumlah PHK + Jumlah Angkatan kerja yang baru. Sedangkan untuk gini diperkirakan akan terdampak pada kelompok-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Adapun perkiraan penyesuaian target RKP 2020 dan dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah :

Indikator	Outlook 2020 ¹⁾		2021 ¹⁾
	Sebelum Covid-19	Covid-19	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	2,3	4,5 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%)	5,0	7,3	6,9 – 7,3
Tingkat Kemiskinan (%)	8,68	9,39	8,7 – 9,2
Rasio GINI	0,378	0,379	0,377 – 0,385
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	72,30	73,19 – 73,26

Sumber : Bappenas, 2020

3.2. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam visi dan misi dalam menyusun RKPD Kota Dumai tahun 2021. Adapun rancangan misi pemerintah provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi.

Disamping menelaah rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer

3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkaran kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Terminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota Dumai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang Kampai sebagai pengumpul skala tersier.
13. Rencana pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai

18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2021 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2021. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2021).

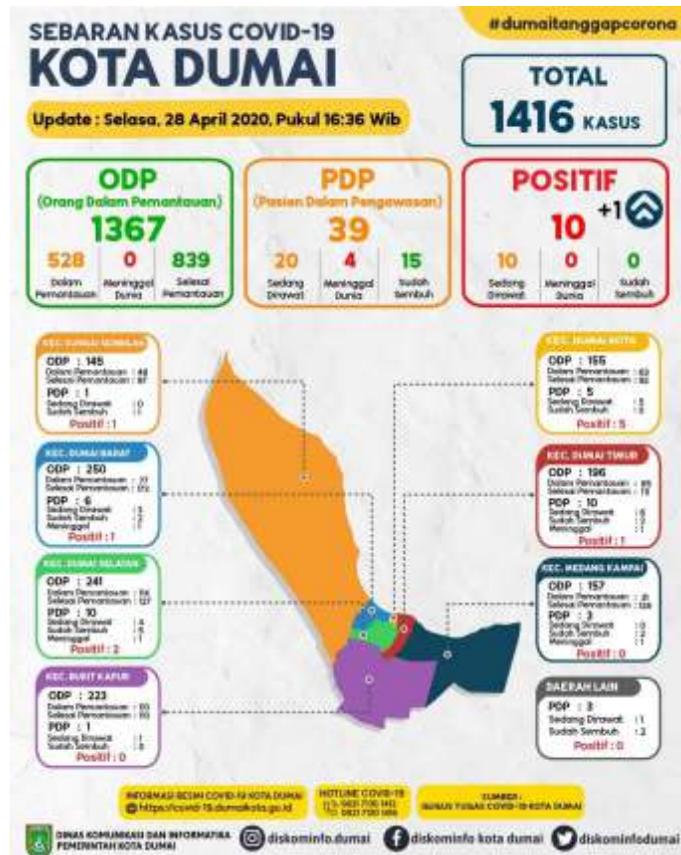
Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Namun fakta Penyebaran Covid-19 yang telah menjangkau lebih banyak negara, termasuk Indonesia telah mempengaruhi perekonomian secara global. Pada Maret 2020, penambahan kasus baru di Tiongkok sebagai negara sumber pandemi, sudah pada level yang sangat rendah dan mulai menjalankan aktivitas perekonomian. Di sisi lain, peningkatan kasus yang begitu cepat terjadi di negara-negara lainnya. Kasus tertinggi hingga akhir Maret berada di Amerika Serikat, lalu Italia. Beberapa negara memberlakukan lockdown selama pandemi untuk mengurangi penyebaran yang lebih luas. Total kasus positif di seluruh dunia per 31 Maret 2020 telah mencapai 857 ribu kasus. Sementara itu, di Indonesia sendiri, sampai akhir april terdata 9.771 kasus terkonfirmasi positif (<https://covid19.go.id/peta-sebaran> tanggal akses 30 April 2020). Pemerintah menginstruksikan pengurangan aktivitas dan pembatasan sosial untuk menekan laju penyebaran virus.

Di Kota Dumai pun sudah terkonfirmasi 10 kasus positif, 40 orang total pasien dalam pemantauan (PDP) dan 1.404 total orang dalam pemantauan (ODP) . Sedangkan untuk provinsi hinterland seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara lebih tinggi lagi kasus wabah covid ini



Gambar 3.1 Peta Sebaran Kasus COVID-19 Kota Dumai (Sumber: Dinas Kominfo Kota Dumai, 2020)

Mengingat besarnya perkembangan jumlah kasus dan yang meninggal akibat penyakit COVID-19 ini, maka diperlukan berbagai upaya yang cepat dan kuat untuk memutus mata rantai penularan COVID 19 di Kota Dumai. Mengingat di Kota Dumai saat ini masih merupakan Kota Transit dan kota industri serta memiliki banyak jalur masuk yang belum bisa ditutup. Bahkan Pelabuhan Internasional Kota Dumai telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia kembali ke Indonesia. Tentu saja hal ini akan menambah tantangan dan beban bagi Pemerintah Kota Dumai dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Dumai.

Hal tersebut berdampak pada proses produksi di beberapa perusahaan dan turunnya aktivitas industri. Pandemi Covid-19 dan kebijakan karantina wilayah oleh beberapa negara berpengaruh sangat besar pada sektor industri dan pariwisata. Secara umum, terjadi penurunan wisman dari sebagian besar negara asal. Melihat perkembangan kondisi global, kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret akan jauh lebih kecil. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian yang mendorong

berbagai negara mengeluarkan stimulus fiskal maupun moneter untuk menyelamatkan perekonomian.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret 2020 surplus USD 0,7 miliar. Kondisi ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih positif di tengah kenaikan nilai impor. Kinerja ini tidak berbeda jauh dengan kinerja pada bulan Maret 2019 yang surplus USD0,7 miliar.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tumbuh 0,5 persen di tengah ancaman resesi global. Prediksi tersebut, merupakan pertumbuhan terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Dalam outlook yang dirilis IMF, ekonomi dunia diprediksi berkontraksi hingga 3 persen tahun 2020, terburuk sejak depresi besar tahun 1929. Perlambatan perekonomian diprediksi terjadi pada triwulan kedua di berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 secara keseluruhan diprediksi berkontraksi 0,6 persen. Malaysia dan Thailand diprediksi mengalami kontraksi. Sementara Vietnam, Filipina, dan Indonesia diprediksi masih tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi akan membaik pada tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memperkirakan terjadi peningkatan risiko resesi pada triwulan II dan III tahun 2020, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan komoditas dan terhambatnya proses produksi. Hal tersebut dapat menurunkan laju investasi. Selain itu, pembatasan aktivitas akan menurunkan pendapatan masyarakat yang kemudian menekan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kinerja ekspor dan impor Indonesia juga akan turun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan harga komoditas yang rendah.

Data ekspor impor periode Januari - Maret 2020 masih menunjukkan kinerja yang positif. Total ekspor Januari hingga Maret, masih meningkat 2,9 persen (YoY) menjadi sebesar USD41,8 miliar. Industri pengolahan dan pertanian masih meningkat sementara ekspor migas dan hasil pertambangan berkontraksi. Sementara itu, kinerja impor turun 3,7 persen (YoY) menjadi sebesar USD39,2 miliar. Neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I surplus USD2,6 miliar. Lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang terjadi defisit USD0,1 miliar.

Adapun khusus untuk indikator makro pada bab ini akan disajikan pada 2 kondisi berbeda. Penyajian 2 kondisi berbeda ini karena pada saat COVID 19 belum mewabah pemerintah kota Dumai telah menyelesaikan proses/tahapan perencanaan teknokratik, top-down dan partisipatif mulai

dari penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penelaahan rancangan awal Provinsi Riau Tahun 2021, RPJMN tahun 2020-2024 dan Proses musrenbang dari mulai rembug RT, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang RKPD di kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Dumai dan telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021. Kondisi lainnya adalah kondisi pada saat mewabahnya COVID 19 yang telah merubah perkiraan-perkiraan ekonomi Global.

3.3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2021

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Mulai Tahun 2015 perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini dikarenakan Selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

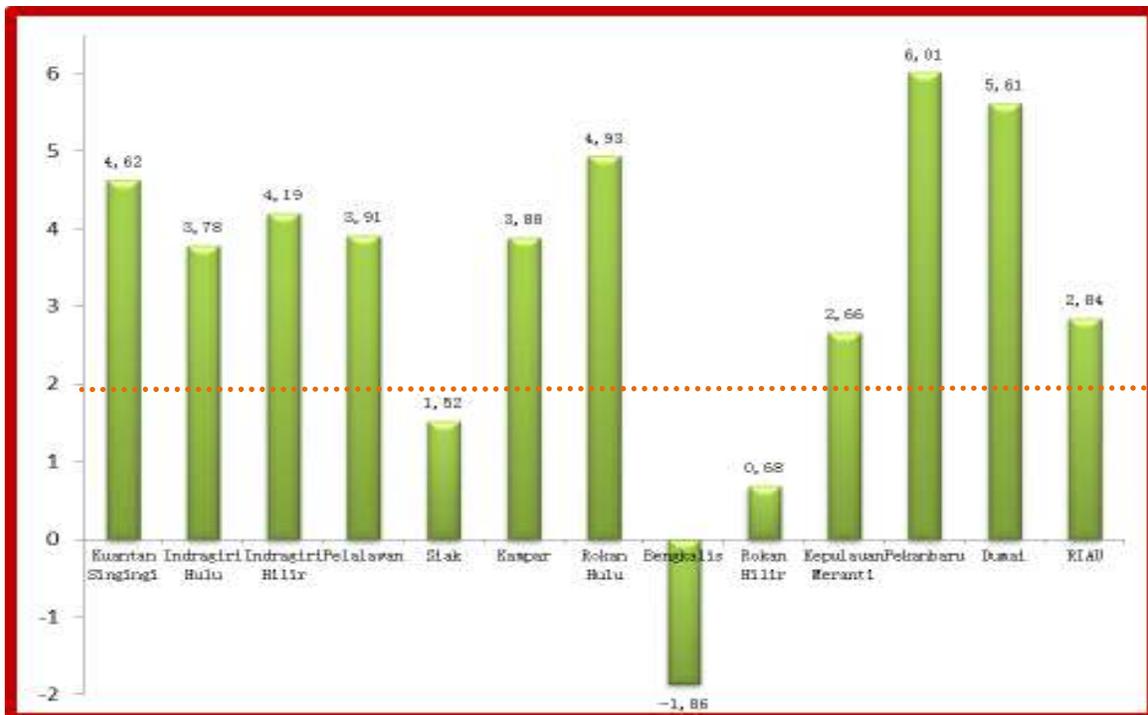
SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB adalah :

- 1) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Sedangkan pengaruh akibat adanya perubahan tahun dasar terhadap perhitungan PDRB adalah:

- 1) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok
- 2) pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- 3) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan
- 4) Saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 5) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Tingkat perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2015-2019 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan. Perekonomian Dumai pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Riau tahun 2019 sebesar 2,84 persen terdapat Kenaikan 0,47 poin dari 2018 yaitu 2,37 persen sedangkan Laju pertumbuhan PDRB Kota Dumai tahun 2019 mencapai 5,61persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,35 persen dan menempati posisi ke-2 se- Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Industri pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Riau pada Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

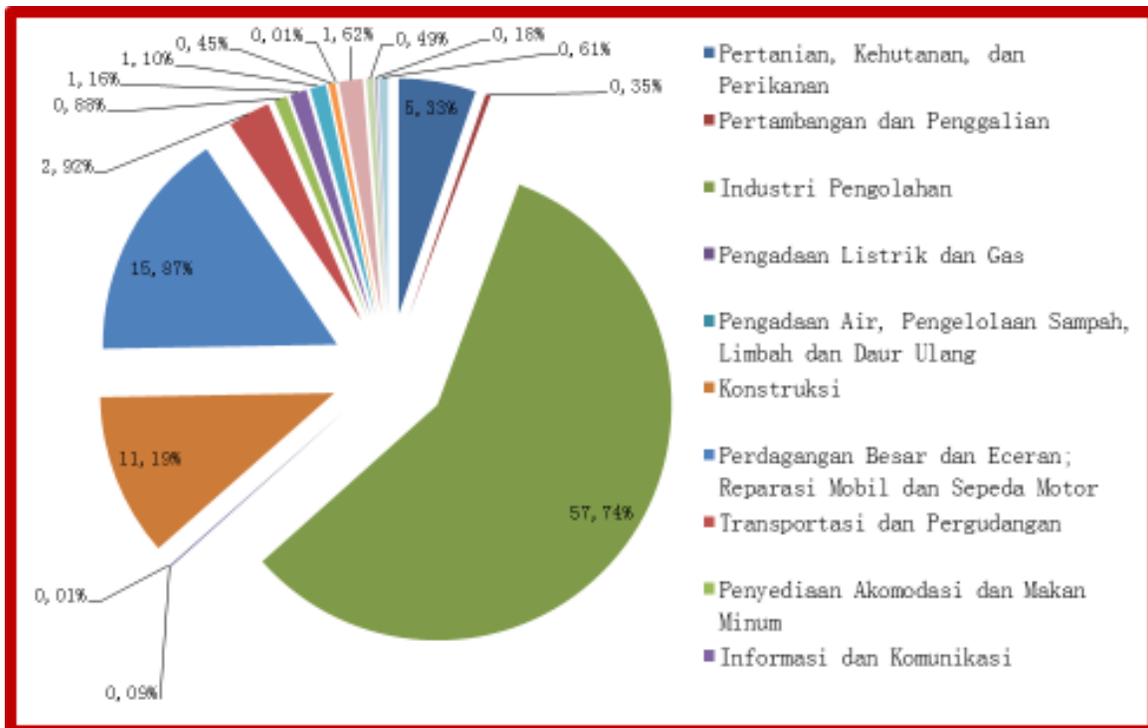


Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Kota Dumai
(Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2019, diolah)

PDRB Perkapita kota Dumai pada tahun 2019 sebesar 117,198 juta atau naik 8,411 juta dibandingkan tahun 2018 sebesar 108,787 juta. Jika dilihat Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB perkapita, maka menurut teori klassen, maka pada tahun 2019 kota Dumai masuk dalam kategori wilayah maju dan cepat tumbuh. Adapun perkiraan (proyeksi) pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2021 berdasarkan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 adalah 4,42 persen.

Namun dengan melihat kondisi perekonomian global terpengaruh oleh wabah COVID-19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi kota Dumai untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar 3,82%

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2019 yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta Bangunan. Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Grafik berikut menggambarkan distribusi PDRB Kota Dumai Tahun 2019.



Gambar 3.3 Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2019
(Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2019, diolah)

Berdasarkan gambar 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kota Dumai dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi. Distribusi atau kontribusi lapangan usaha juga dapat menggambarkan peran setiap sektor yang ada di Kota Dumai terhadap struktur ekonomi kota Dumai. Jika dilihat dari persentase kontribusi per sektor dan berdasarkan kriteria United Nations For Industrial Development Organization (UNIDO) maka kota Dumai masuk dalam kategori wilayah Industri.

Adapun besaran PDRB perkapita Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini mengambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan dengan arti lain secara makro pembangunan di perekonomian di kota Dumai tepat sasaran. Tabel dibawah memperlihatkan perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai serta klasifikasi kota Dumai berdasarkan tipologi klassen.

Tabel. 3.1 Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2014-2018 dan tipologi wilayah

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	89,008.77	95,836.36	101,816.17	108.787,11	117.198.820
PDRB ADHB perkapita	102.8878105	104.952091	105.9909922		109.757.070

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Riau (juta Rp.)				110.826,76	
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	1,91	4,64	4,45	5,35	5,61
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	0,22	2,23	2,71	2,34	2,84
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	wilayah maju dan cepat tumbuh

Adapun besaran pendapatan perkapita pada Tahun 2021 sesuai dengan target RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah sebesar Rp. 121.044.995. Sedangkan proyeksi berdasarkan kondisi dengan adanya wabah COVID-19 ini diperkirakan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.96.835.996

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai, Pada April 2020, Dumai mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,49. Inflasi Tahun Kalender (April 2020 - Desember 2019) sebesar 0,51 persen dan Inflasi Year on Year (April 2020 terhadap April 2019) sebesar 1,94 persen.

Inflasi di Dumai terjadi karena adanya penurunan indeks harga di 3 (tiga) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,83 persen diikuti kelompok transportasi sebesar 0,47 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen. Sedangkan 2 (dua) kelompok mengalami peningkatan indeks harga yaitu pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,26 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen. Sementara 6 (enam) kelompok relatif stabil antara lain, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kelompok pendidikan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok kesehatan dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga

Beberapa komoditas yang memberikan andil terjadinya deflasi di Dumai antara lain : cabe merah, daging ayam ras, angkutan udara, cabai rawit, telur ayam ras, bawang putih, tomat dan lain-lain.

Tabel 3.2 IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai
Bulan April 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun
Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2019	IHK Des 2019	IHK April 2020	Tingkat Inflasi/April 2020 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi April 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	101.52	102.97	103.49	-0.19	0.51	1.94	-0.19
Makanan, Minuman dan Tembakau	101.75	103.22	104.04	-0.63	0.79	2.25	-0.26
Pakaian dan Alas Kaki	101.74	105.12	105.23	-0.01	0.10	3.43	0.00
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	99.81	99.81	99.91	0.00	0.10	0.10	0.00
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101.82	102.73	102.90	0.00	0.17	1.05	0.00
Kesehatan	101.92	102.99	105.55	0.00	2.49	3.56	0.00
Transportasi	102.44	104.57	103.95	-0.47	-0.59	1.47	-0.07
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101.57	102.13	102.53	0.36	0.39	0.95	0.02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101.45	102.32	102.56	0.00	0.23	1.09	0.00
Pendidikan	100.57	104.15	104.15	0.00	0.00	3.56	0.00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	103.05	104.07	104.51	0.00	0.42	1.42	0.00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	101.60	105.72	109.71	2.26	3.77	7.98	0.12

1) Kolom (6) Persentase perubahan IHK April 2020 terhadap IHK Desember 2019

2) Kolom (7) Persentase perubahan IHK April 2020 terhadap IHK Desember 2019

3) Kolom (8) Persentase perubahan IHK April 2020 terhadap IHK April 2019

(Sumber: BPS, 2020)

Pada April 2020 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, 2 (dua) kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,26 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,07 persen. Sedangkan 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yang dapat memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sementara 2 (dua) kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

- a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
- 2) Aspek Program
- a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
- a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
 - b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2011-2019 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2019 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46 ; 74,06 ; 74,64 Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 2.3 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019.

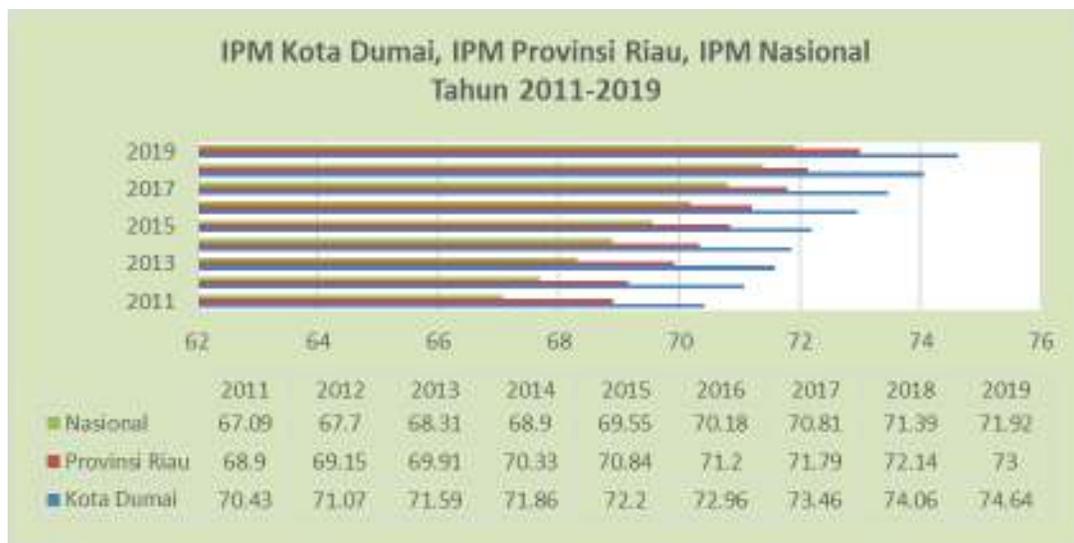
Tabel 3.3 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64
Provinsi Riau	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,14	73,00

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

(Sumber: BPS, 2020)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2011-2019, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 dibawah. Pada tahun 2019, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 di atas. Pada tahun 2018 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 74,64 ; 73,00 ; 71,92, Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4 dan tabel 3.3 dibawah ini :



Gambar 3.4 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2011-2019
(Sumber: BPS, 2020)

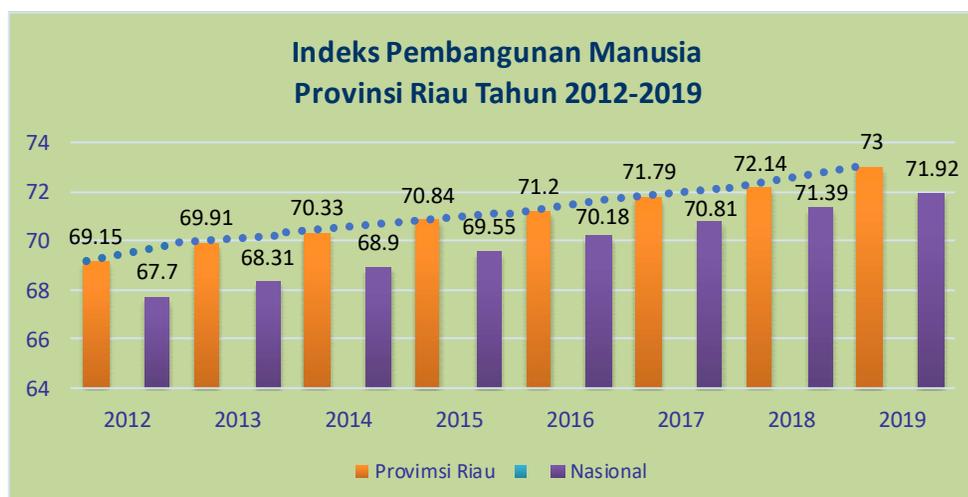
Tabel 3.3 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2019

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78
Indragiri Hulu	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66	70,05
Indragiri Hilir	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84
Pelalawan	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85
Siak	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07
Kampar	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15
Rokan Hulu	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36	69,93
Bengkalis	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44
Rokan Hilir	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40
Kepulauan Meranti	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pekanbaru	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66	81,35
Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64

(Sumber: BPS, 2020)

Sedangkan untuk melihat kondisi IPM secara keseluruhan berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

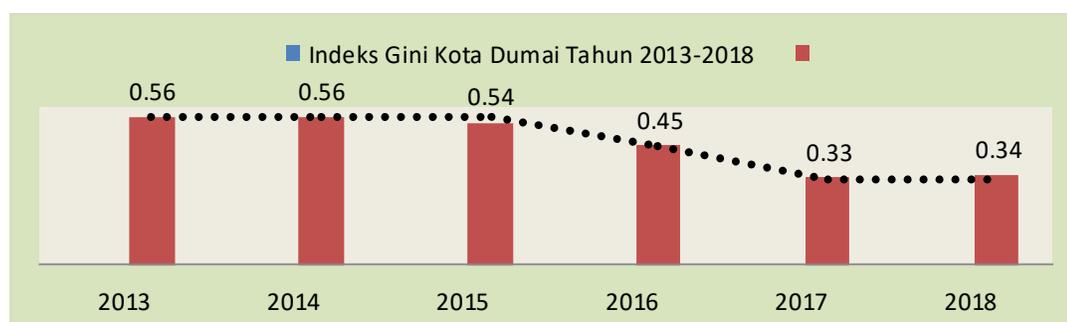


Gambar 3.5 Perkembangan IPM kota dumai berdasarkan AHH, HLS dan Pengeluaran Perkapita
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sesuai dengan RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah 74,798. Sedangkan dengan adanya wabah COVID-19 maka IPM Kota Dumai Tahun 2021 dipekirakan 74,436

d. Indeks Gini

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2013-2018, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/ kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang.



Gambar 3.6 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- a) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- b) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- c) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan rendah

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 15,51% dari keseluruhan pengeluaran.



Gambar 3.7. Perbandingan indeks Gini Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2014-2018.

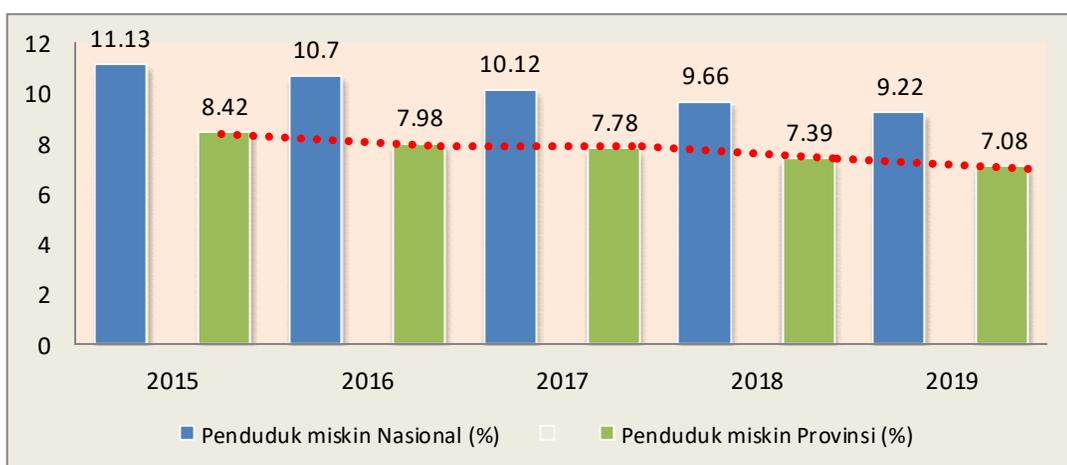
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Gini Rasio (IGR) kota Dumai Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dan akibat wabah COVID-19 adalah 0,4.

e. **Kemiskinan**

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan

menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Untuk penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada bab II. Secara umum perbandingan kondisi tingkat kemiskinan nasional dan propinsi dapat dilihat pada tabel Gambar dibawah ini :



Gambar 3.8 Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2015-2019
(Sumber: Badan Pusat Statistkik (BPS), diolah)

Sedangkan untuk kondisi kota dumai pada tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

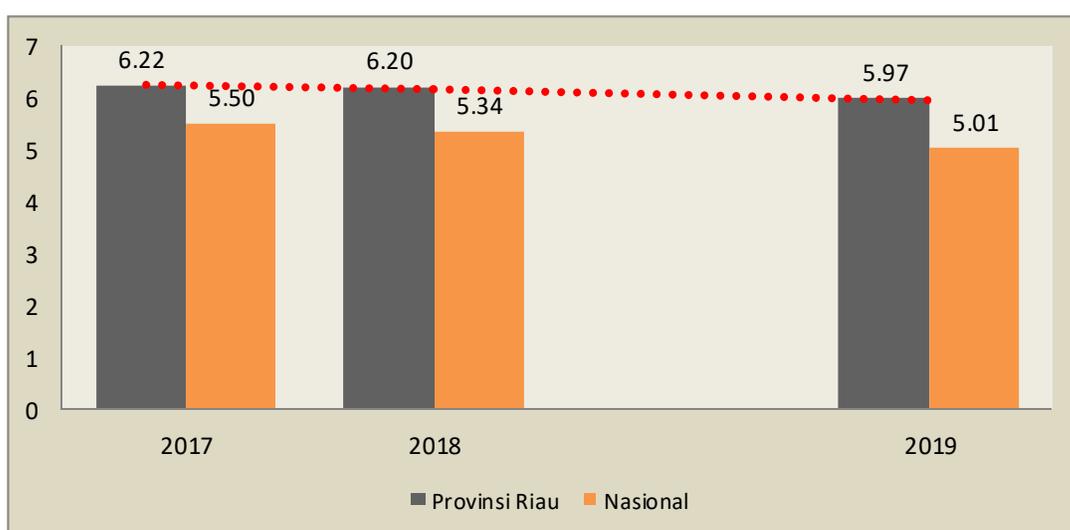


Gambar 3.9 Kondisi perbandingan Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2015-2019
(Sumber: Badan Pusat Statistkik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Kemiskinan kota Dumai Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah 4,34% dan akibat wabah COIVD-19 adalah 3,82%.

f. Pengangguran

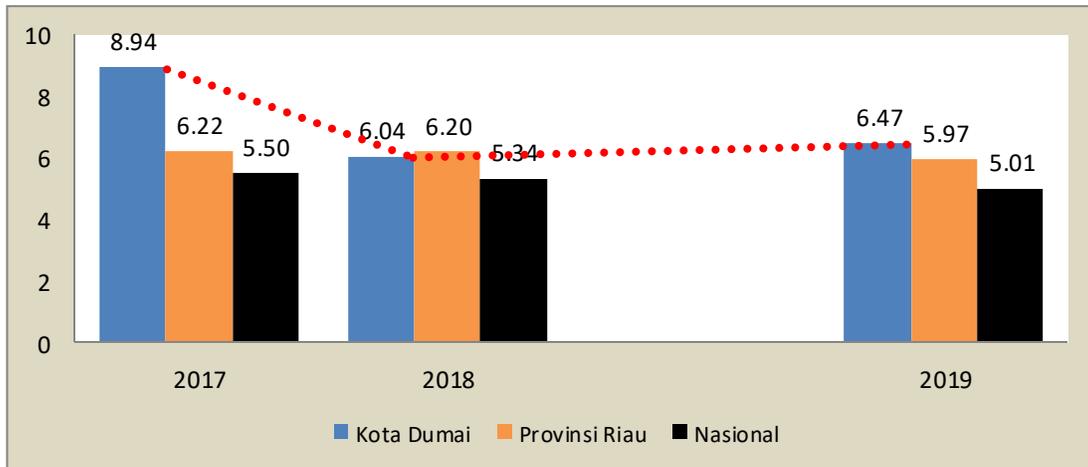
Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kondisi tingkat pengangguran nasional dan propinsi riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 3.10 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional dan Propinsi Riau Tahun 2017-2019
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Sedangkan kondisi kota dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.11 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2019



(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Dumai Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah 6,98% dan akibat wabah COIVD-19 adalah 9,44%

3.3.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Dumai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing kota dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
3. Masih kurangnya kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia masyarakat Kota Dumai dalam menghadapi tantangan pembangunan global setelah diberlakukannya kebijakan pasar bebas Asean seperti Masyarakat Ekonomi Asean dan persaingan tenaga kerja lokal dari daerah lain di Indonesia.
4. Melambatnya perekonomian Kota Dumai serta masih tingginya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang bisa meningkatkan jumlah masyarakat miskin.
5. Belum optimal kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan transparan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.

6. Belum Optimalnya pembangunan dibidang pertanian, industri, perdagangan dan Jasa serta investasi yang memiliki banyak peluang setelah penetapan kota Dumai menjadi beberapa pusat kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi.
7. Perlunya peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu dalam rangka menghadapi tantangan budaya global

3.3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam kota Dumai dan faktor yang berasal dari luar kota Dumai. Faktor yang berasal dari dalam kota Dumai adalah kondisi belum jelasnya status rencana tata ruang kota Dumai yang mempengaruhi rencana pemanfaatan ruang dalam rangka ketersediaan infrastruktur kota dan dasar masyarakat dan perizinan dikota Dumai. Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (small and medium enterprises) juga turut mempengaruhi kontribusi barang/jasa dan jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB kota Dumai sehingga ketika usaha kecil dan menengah ini mengalami stagnasi, maka akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat termasuk jumlah tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perekonomian kota Dumai Tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain adalah Adanya kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran yang digunakan untuk pencegahan dan mengatasi bencana kemanusiaan dengan adanya penyebaran penyakit menular yaitu virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, Provinsi Riau Maupun perekonomian Kota Dumai hal ini tentunya akan menjadi salah satu tantangan perekonomian yang harus dihadapi karena dengan adanya covid dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sector lainnya. adanya kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak yang mengikuti trend harga pasar dunia sehingga harga bahan bakar bisa berubah setiap saat.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang menjadi acuan perdagangan internasional diperkirakan juga mempengaruhi nilai perdagangan kota Dumai yang berakibat pada inflasi. Situasi dan stabilitas keamanan pusat dan daerah juga turut memberi andil terhadap prospek pembangunan kota Dumai. Di tahun mendatang, kemungkinan kondisi pembangunan ekonomi Kota Dumai masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan akan difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas yang selama ini masih berorientasi pada wilayah pemukiman. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
4. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor

diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.

5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
6. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

3.4.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2017 sampai proyeksi tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 s.d 2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Pendapatan Tahun 2020	Proyeksi/Target Pendapatan 2021
	Realisasi	Realisasi		
PENDAPATAN DAERAH	1.185.013.276.651,81	1.187.808.492.264,08	1.396.018.821.279,00	1.673.725.508.964,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	265.472.760.817,81	278.226.720.607,85	297.107.268.627,00	303.819.251.047,20
Pendapatan Pajak Daerah	94.993.765.288,91	128.067.850.613,00	144.966.900.000,00	136.818.502.081,00
Pendapatan Retribusi Daerah	35.859.444.250,00	30.708.924.601,00	42.455.514.004,00	44.901.652.187,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.626.568.826,00	2.189.648.098,00	2.600.830.961,00	7.621.702.693,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.992.982.452,90	117.260.297.295,85	107.084.023.662,00	114.477.394.086,00
DANA PERIMBANGAN	755.592.886.590,00	810.190.491.050,00	975.875.552.652,00	1.114.283.684.377,75
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.924.641.373,00	58.145.053.156,00	295.941.458.000,00	90.045.417.928,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	141.483.331.564,00	158.526.075.439,00	-	197.743.175.657,03
Dana Alokasi Umum (DAU)	408.643.780.000,00	427.188.089.000,00	468.136.464.000,00	483.264.864.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	162.541.133.653,00	166.331.273.455,00	175.388.823.652,00	343.230.226.792,72
Dana Insentif Daerah	-	-	36.407.807.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	163.947.629.244,00	99.391.280.606,23	123.037.000.000,00	255.622.573.539,05
Pendapatan Hibah	-	-	36.037.000.000,00	35.889.520.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	84.630.386.181,00	86.741.473.606,23	87.000.000.000,00	112.175.322.992,63
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79.317.243.063,00	12.649.807.000,00	-	107.557.730.546,42

Penjelasan Tabel 3.5 untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.673.725.508.964,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan),
4. Pajak Air Tanah,
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan,
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
8. Pajak Parkir,
9. Pajak sarang Burung Walet,
10. Retribusi Pelayanan Pasar,
11. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
16. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
17. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,

18. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
19. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
20. Retribusi Izin Trayek,
21. Retribusi Rumah Potong Hewan,
22. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
24. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
25. Retribusi Puskesmas, dan
26. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 direncanakan Rp. 303.819.251.047,20 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 136.818.502.081,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 44.901.652.187,20 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 7.621.702.693,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 114.477.394.086,00.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2021, prediksi pendapatan daerah dari sumber Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.114.283.684.377,75 Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2021 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2021 masing-masing terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 90.045.417.928,00
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 197.743.175.657,03
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 483.264.864.000,00
d. Dana Alokasi Khusus	Rp. 343.230.226.792,72

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 255.622.573.539.05,- yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 35.889.520.000,00,- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Riau sebesar Rp. 112.175.322.992,63,-, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sebesar Rp. 107.557.730.546,42,-.

3.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.4.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2021 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2019.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan

- a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019.
- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2021 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi

minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2021, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2019.

- c. Perhitungan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan yang yang tercantum dalam Informasi Resmi Situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- c. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan

mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2021 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;

6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.4.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2020. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel 3.5 berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2017-2018, Tahun 2019 dan Proyeksi/target tahun 2020 dan proyeksi Tahun 2021.

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun 2018 s.d 2021

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Belanja Daerah Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
	Realisasi	Realisasi		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	510.188.827.369,00	608.260.697.799,95	642.591.915.055,00	661.841.500.000,00
Belanja Pegawai	495.892.458.089,00	580.940.715.719,95	609.372.902.355,00	639.841.500.000,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	11.143.600.000,00	20.492.212.800,00	32.719.012.700,00	12.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-	2.520.000.000,00	-	-
Belanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	2.652.769.280,00	2.652.769.280,00	-	-
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	1.655.000.000,00	500.000.000,00	10.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	689.888.872.032,98	832.949.294.744,00	791.679.177.941,00	1.011.884.008.964,00
Belanja Pegawai	77.383.506.789,00	93.670.813.571,00	59.619.334.275,00	59.619.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa	425.773.028.697,39	443.943.494.976,24	465.428.495.596,00	271.963.127.000,00
Belanja Modal	186.732.336.546,59	295.334.986.196,76	266.631.348.070,00	425.752.000.000,00

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan E-planning Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7 Rekap Perbandingan Belanja Langsung Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2021

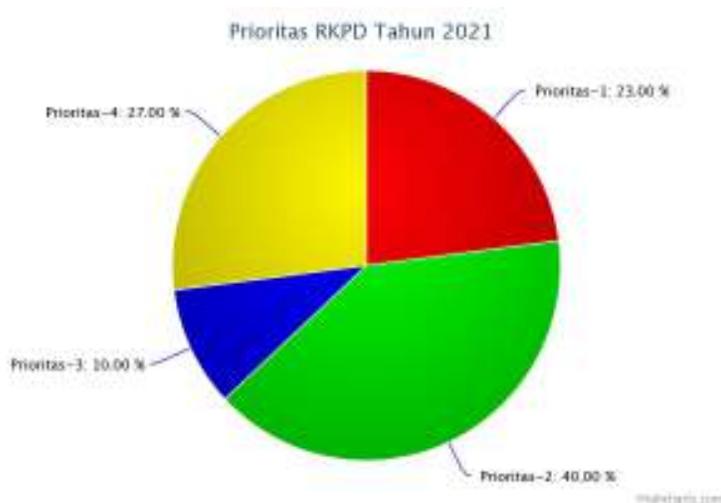
No	Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal RKPD 2021				Rancangan Akhir RKPD 2021				SIPD	Pagu RKPD Pasca Covid	Pagu SIPD Pasca Covid
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (Rp)	%			
1	Dinas Kesehatan	73.752.930.516	18	73	48.431.608.796	65,67%	18	73	73,752,930,470	100%	73,752,930,470.00	86,377,637,423.00	86,377,637,423.00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.643.797.725	18	62	9.117.310.806	72,11%	18	60	12,165,426,905	100%	12,165,426,905.00	10,901,417,953.00	10,901,417,953.00
3	Dinas Perhubungan	21.366.464.200	13	47	14.956.524.940	70%	13	47	34,876,606,642	100%	34,876,606,642.00	32,739,960,222.00	32,739,960,222.00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.559.050.000	8	35	3.598.701.968	78,94%	8	35	4,559,050,000	100%	4,559,050,000.00	4,103,145,000.00	4,103,145,000.00
5	Dinas Sosial	5.379.650.034	14	41	4.186.121.404	77,81%	14	41	7,148,132,034	100%	7,148,132,034.00	24,610,167,031.00	24,610,167,031.00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.324.701.764	10	30	2.327.291.234	70%	10	30	3,324,701,764	100%	3,324,701,764.00	12,992,231,588.00	12,992,231,588.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.282.704.812	10	29	2.568.521.487	78,24%	10	29	3,282,704,812	100%	3,282,704,812.00	3,282,704,812.00	3,282,704,812.00
8	Inspektorat	6.758.437.951	7	40	4.152.474.291	61,44%	7	40	6,758,437,951	100%	6,758,437,951.00	6,082,594,156.00	6,082,594,156.00
9	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	211.430.442.729	13	36	131.322.059.910	62,11%	13	36	211,430,442,729	100%	211,430,442,729.00	207,287,398,456.00	207,287,398,456.00
10	Sekretariat DPRD	41.764.170.814	8	39	41.764.170.814	100%	8	39	41,764,170,814	100%	41,764,170,814.00	30,587,753,733.00	30,587,753,733.00
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.546.083.900	8	43	5.282.258.730	70%	8	43	7,546,083,900	100%	7,546,083,900.00	6,791,475,510.00	6,791,475,510.00
12	Dinas Pendidikan Dan	145.379.833.892	17	142	123.379.833.892	84,87%	17	142	145,379,833,892	100%	145,379,833,892.00	131,441,850,503.00	131,441,850,503.00

No	Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal RKPD 2021				Rancangan Akhir RKPD 2021				SIPD	Pagu RKPD Pasca Covid	Pagu SIPD Pasca Covid
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (Rp)	%			
	Kebudayaan												
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	152.418.712.834	19	62	106.693.098.983	70%	19	62	152.625.112.834	100%	152,625,112,834.00	137,176,841,551.00	137,176,841,551.00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	45.033.808.138	12	35	33.930.954.238	75,35%	12	35	31.523,665,696	100%	31,523,665,696.00	27,020,284,882.00	27,020,284,882.00
15	Dinas Lingkungan Hidup	19.538.754.801	15	47	13.677.128.360	70%	15	47	19.538,754,801	100%	19,538,754,801.00	17,584,879,321.00	17,584,879,321.00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.725.538.772	11	48	7.424.464.342	96,1%	11	48	7,725,538,772	100%	7,725,538,772.00	6,952,984,895.00	6,952,984,895.00
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.941.945.011	12	34	7.941.945.011	100%	12	34	7,941,945,011	100%	7,941,945,011.00	7,147,750,510.00	7,147,750,510.00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.587.914.103	9	42	5.318.539.871	70,09%	9	42	7,587,914,103	100%	7,587,914,103.00	6,829,122,693.00	6,829,122,693.00
19	Dinas Perdagangan	4.066.974.140	11	31	2.911.881.898	71,6%	11	31	4,066,974,140	100%	4,066,974,140.00	13,660,276,726.00	13,660,276,726.00
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11.339.622.294	17	50	7.937.735.605	70%	17	50	11,339,622,294	100%	11,339,622,294.00	20,205,660,065.00	20,205,660,065.00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.291.554.167	11	37	3.931.622.174	74,3%	11	37	5,291,554,167	100%	5,291,554,167.00	4,762,398,750.00	4,762,398,750.00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	17.480.208.674	13	44	27.480.208.674	157,21 %	13	44	17,480,208,674	100%	17,480,208,674.00	18,732,187,807.00	18,732,187,807.00
23	Dinas Perikanan	4.124.359.900	13	34	2.887.051.929	70%	13	34	4,124,359,900	100%	4,124,359,900.00	5,711,923,910.00	5,711,923,910.00
24	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4.230.287.896	14	37	3.309.469.526	78,23%	14	37	4,230,287,896	100%	4,230,287,896.00	18,330,282,925.00	18,330,282,925.00

No	Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal RKPD 2021				Rancangan Akhir RKPD 2021				SIPD	Pagu RKPD Pasca Covid	Pagu SIPD Pasca Covid
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (Rp)	%			
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.985.351.438	6	63	10.213.558.887	73,03%	6	63	13.985,351,438	100%	13,985,351,438.00	12,586,816,294.00	12,586,816,294.00
26	Badan Pendapatan Daerah	14.233.000.000	6	58	9.963.100.000	70%	6	58	14,233,000,000	100%	14,233,000,000.00	12,809,700,000.00	12,809,700,000.00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	3.669.508.500	9	36	3.669.508.500	100%	9	36	3,669,508,500	100%	3,669,508,500.00	3,302,557,650.00	3,302,557,650.00
28	Sekretariat Daerah Kota Dumai	57.599.832.994	33	102	52.593.991.854	91,31%	33	102	54,852,680,837	100%	54,852,680,837.00	42,050,022,669.00	42,050,022,669.00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.827.369.050	12	52	4.402.322.755	34,32%	12	52	12,827,369,050	100%	12,827,369,050.00	11,544,632,145.00	11,544,632,145.00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.796.460.700	10	37	5.796.460.700	100%	10	37	5,796,460,700	100%	5,796,460,700.00	4,221,031,500.00	4,221,031,500.00
31	Kec. Dumai Barat	11.506.554.952	27	86	4.310.404.952	37,46%	27	86	11,614,967,523	100%	11,614,967,523.00	10,464,312,028.00	10,464,312,028.00
32	Kec. Dumai Timur	11.634.648.574	31	137	5.668.689.474	48,72%	31	137	11,934,093,145	100%	11,934,093,145.00	10,579,596,288.00	10,579,596,288.00
33	Kec. Bukit Kapur	16.357.330.627	31	229	5.341.511.877	32,66%	31	229	16,465,743,198	100%	16,465,743,198.00	14,830,010,136.00	14,830,010,136.00
34	Kec. Sungai Sembilan	14.898.484.240	28	134	7.147.641.720	47,98%	28	133	15,006,896,811	100%	15,006,896,811.00	13,517,048,387.00	13,517,048,387.00
35	Kec. Medang Kampai	10.771.866.000	31	118	4.919.047.000	45,67%	31	118	10,880,278,571	100%	10,880,278,571.00	9,803,091,971.00	9,803,091,971.00
36	Kec. Dumai Kota	13.176.927.184	30	149	4.511.927.184	34,24%	30	149	13,285,339,755	100%	13,285,339,755.00	11,967,647,037.00	11,967,647,037.00
37	Kec. Dumai Selatan	14.206.888.740	30	129	4.759.287.740	33,5%	30	129	14,315,301,311	100%	14,315,301,311.00	12,894,612,437.00	12,894,612,437.00
-	Total	1.024.632.172.066	585	2.448	737.828.431.526	72,01%	585	2.447	1,024,331,451,040	100%	1,024,331,451,040	1,011,884,008,964	1,011,884,008,964

Table 3.7 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Pemantapan Pelayanan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar	115	450	230.195.289.759	23%
2	SDM yang Berdaya Saing Serta Pemantapan Implementasi Nilai-Nilai Budaya dan Keagamaan	70	355	409.472.702.207	40%
3	Pemantapan Ekonomi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	81	266	98.863.928.151	10%
4	Pemantapan Pelayan Publik	320	1.323	273.352.088.847	27%
-	TOTAL	586	2.394	1.011.884.008.964	100%



Gambar 3.12 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2021 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2020 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan

target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja Perubahan RPJMD 2016-2021 yang belum tercapai;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2021;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;

8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;
11. Kebijakan pada belanja barang dan jasa yang diterapkan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi sisa persediaan tahun anggaran 2021. Kebutuhan riil dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan setiap OPD;
 - b) Alat Tulis Kantor (ATK) disetiap OPD ditempatkan pada Sekretariat OPD tersebut;
 - c) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - d) Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan OPD dan dilakukan evaluasi terhadap inventaris barang yang masih baik kondisinya maupun umur ekonomisnya;
 - e) Melakukan pembatasan rapat-rapat diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya;
 - f) Penganggaran untuk mengikuti pelatihan hanya diperkenankan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang Akreditasi dan Kompetensinya sudah diakui.
12. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan berimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan.
13. Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007, penganggaran belanja

modal harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan/dimanfaatkan;

14. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

c. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2019.

1. Kebijakan terkait Belanja Pegawai meliputi sebagai berikut :
 - a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun 2021 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;
 - b) Menganggarkan belanja pegawai dalam APBD 2021 untuk mengantisipasi pengangkatan CPNS Kota Dumai sesuai dengan kebutuhan dan formasi pegawai;
 - c) Memperhitungkan *acress* sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.
 - d) Penganggaran asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang kecelakaan kerja dan kematian bagi .
 - e) Penganggaran tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Penganggaraan penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai serta belanja penunjang kegiatan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan

- kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial;
 5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.
 6. Kebijakan terkait Belanja Hibah pada tahun anggaran 2021:
 - a) Pemberian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan pemerintah atau semi pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2006 tentang tatacara pemberian Hibah dan Bansos.
 - b) Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
 - c) Penentuan penerima Hibah dilakukan secara selektif dan rasional serta tidak wajib, tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 7. Belanja Hibah kepada instansi vertikal menggunakan mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada pengelolaan keuangan daerah, bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018. Kebijakan terkait Bantuan Sosial pada tahun 2021:

- a) Pemberian bantuan sosial diberikan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2016 tentang tatacara pemberian Hibah dan Bansos serta Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 240/97/Adm-Kesra tanggal 30 Januari 2017.
- b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diperuntukkan membantu korban kebakaran, banjir dan kejadian bencana tak terduga lainnya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar Dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

8. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021:

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kota Dumai Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi / Target pada Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-			-	
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	41.896.118.427,21	23.704.008.005,09	65.313.698.309,99	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			-	-	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah penerimaan pembiayaan		41.896.118.427,21	23.704.008.005,09	65.313.698.309,99	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00				
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya	0,00				

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi / Target pada Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
Jumlah pengeluaran pembiayaan						
Jumlah pembiayaan NETTO		41.896.118.427,21	23.704.008.005,09	65.313.698.309,99	-	

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *deviden* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Kota Dumai merupakan penjabaran Perubahan RPJMD kota Dumai 2016-2021. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 mengacu pada pencapaian visi dan misi Perubahan RPJMD 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 dan RKP tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2020-2024.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Pokok-pokok Pikiran Dewan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

4.1.1. Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perubahan RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin
Arti kata :
 - a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat

- b) Lahir : keduniaan; jasmani
 - c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)
- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban
- Arti kata:
- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
 - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu;
 - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
 - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan

6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan dan mendorong tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Dumai secara merata dan terjangkau sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan hajat hidup (biologis) utama masyarakat. Penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Dumai merupakan harapan masyarakat Dumai sampai saat ini, dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Dumai dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota yang akan dilakukan secara bertahap. Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Dumai. Penyediaan air bersih dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Dumai. Peningkatan infrastruktur air bersih tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan air baku, pemeliharaan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat kota Dumai.

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastuktur dasar permukiman dan perkotaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (*Amenity*) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi;

penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan diseluruh kelurahan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukannya sehingga diharapkan prinsip *sustainable development* akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Mulai berlakunya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra terkait kawasan perdagangan bebas, Masyarakat ekonomi Asean dan kesepakatan lainnya mengharuskan kita mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing secara global mengharuskan masyarakat Dumai mampu menjadi pelaku utama didaerah sendiri.

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang

merata dan terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Dumai, sehingga dan dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan ketrampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kinerja sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Misi 3: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Misi ini akan memaksimalkan Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Disamping hal tersebut, Koperasi, UMKM dan Industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan.

Selanjutnya, dalam pengentasan kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai

Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. **Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan**
2. **Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.**
3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik.**
4. **Mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.**
5. **Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.**

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produktifitas serta keunggulan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan agar mampu memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, nelayan dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, misi ini juga untuk meningkatkan swasembaya dan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan Pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa, Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah.

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative* (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan citra kota dari *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan akan situasi dan pelayanannya) dan aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang nyaman), sehingga menjadikan kota Dumai sebagai kota tujuan bagi masyarakat lokal maupun regional. Misi ini akan dicapai melalui peningkatan citra kota secara keseluruhan baik dari segi fisik kota, pelayanan publik dan *amenity*

Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis Serta Berbasis Budaya Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan sebuah kota tidak lepas dari adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (fisik) dan pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Misi ini ditempuh sebagai upaya untuk sumberdaya manusia masyarakat dumai agar memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

Budaya Melayu akan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah

payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. **Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :**
 - a) **Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;**
 - b) **Meningkatnya infrastruktur perkotaan;**
 - c) **Meningkatnya kualitas lingkungan.**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :**
 - a. **meningkatnya partisipasi pendidikan;**
 - b. **meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;**
 - c. **meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.**
3. **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:**
 - a. **Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;**
 - b. **Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.**

4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
 - d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industry sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;
 - b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Dumai Yang Makmur Dan Madani Pada Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
			2 Meningkatkan infrastruktur perkotaan
			3 Meningkatkan kualitas lingkungan
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1 Meningkatkan partisipasi pendidikan
			2 Meningkatkan angka kelulusan Pendidikan dasar
			3 Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar
		2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat
			2 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		3 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	1 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga
3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat
			2 Menurunnya persentase penduduk miskin
			3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
			4 Meningkatkan lapangan kerja
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik
			2 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	1 Meningkatkan pendapatan petani
			2 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah
			2 Meningkatkan investasi di Kota Dumai
7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu	1 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	1 Meningkatkan implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar
			2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

(Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai)

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2021 sesuai dengan Musrenbang RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Industri;**
- 2) Pengembangan Pertanian;**
- 3) Pengembangan Pariwisata;**
- 4) Pembangunan Infrastruk dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**
- 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing.**

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2021

Adapun arah kebijakan umum provinsi riau pada tahun 2021 adalah Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi dimana dijabarkan dengan kebijakan dibawah ini :

- 1. Meningkatkan produksi hasil industri**
- 2. Meningkatkan produksi pertanian**
- 3. Memperbaiki iklim & promosi investasi**
- 4. Menjamin distribusi, keamanan & kualitas bahan pangan**
- 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin**
- 6. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa**
- 7. Meningkatkan keterampilan & kompetensi tenaga kerja**
- 8. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda**
- 9. Meningkatkan pengelolaan & pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau**
- 10. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata**
- 11. Meningkatkan promosi & kelembagaan pariwisata**
- 12. Memantapkan jalan & jembatan**
- 13. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu**
- 14. Memantapkan pelabuhan**
- 15. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi**
- 16. Meningkatkan ketersediaan air baku & sanitasi yang berkualitas**
- 17. Meningkatkan akses & infrastruktur energi keseluruh wilayah**
- 18. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh**

19. Meningkatkan layanan irigasi & penanganan abrasi/banjir
20. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
21. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana & pasca bencana
22. Meningkatkan pemeliharaan & pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
23. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut & DAS
24. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
25. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan
26. Meningkatkan kualitas & pemerataan tenaga pendidik
27. Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
28. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu & terdampak krisis kesehatan akibat bencana & kejadian luar biasa
29. Menyediakan & meningkatkan mutu sarana & prasarana kesehatan
30. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
31. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, & Pengelolaan Keolahragaan
32. Meningkatkan kualitas hidup & peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
33. Meningkatkan perlindungan perempuan & anak dari berbagai tindak kekerasan
34. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang & kelangsungan hidup
35. Meningkatkan pemahaman & pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
36. Meningkatkan pembangunan & pelayanan sarana keagamaan

4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2021 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dijelaskan bahwa untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2021 diarahkan pada 5 arahan utama presiden Republik Indonesia yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 arahan utama tersebut, Pemerintah pusat menurunkan menjadi prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang difokuskan pada :
 - a) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

- b) **Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**
 - c) **Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan**
 - d) **Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan**
 - e) **Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi**
 - f) **Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi**
 - g) **Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**
 - h) **Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang difokuskan pada:**
- a) **Pengembangan Kawasan Strategis**
 - b) **Pengembangan Sektor Unggulan**
 - c) **Pengembangan Kawasan Perkotaan**
 - d) **Pemenuhan Pelayanan Dasar**
 - e) **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi**
 - f) **Kelembagaan dan Keuangan Daerah**
3. **Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang difokuskan pada:**
- a) **Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan**
 - b) **Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial**
 - c) **Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**
 - d) **Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**
 - e) **Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**
 - f) **Mengentaskan Kemiskinan**
 - g) **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing**
4. **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang difokuskan pada:**
- a) **Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila**

- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 - c) Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas
 - d) Memperkuat Moderasi Beragama
5. **Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yang difokuskan pada:**
- a) **Infrastruktur Pelayanan Dasar**
 - b) **Infrastruktur Ekonomi**
 - c) **Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan**
 - d) **Energi dan Ketenagalistrikan**
 - e) **Transformasi Digital**
6. **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang difokuskan pada:**
- a) **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
 - b) **Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**
 - c) **Pembangunan Rendah Karbon**
7. **Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang difokuskan pada:**
- a) **Konsolidasi Demokrasi**
 - b) **Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**
 - c) **Penegakan Hukum Nasional**
 - d) **Reformasi Kelembagaan Birokrasi**
 - e) **Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021

Tabel 4.2 Perbandingan Prioritas Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020	Tahun 2021
1. Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar
2. Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan

Tahun 2020	Tahun 2021
4. Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	4. Pemantapan pelayanan publik
5. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	
6. Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	
7. Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2021, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2021 adalah :

“Pemantapan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai yang makmur dan madani”

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021

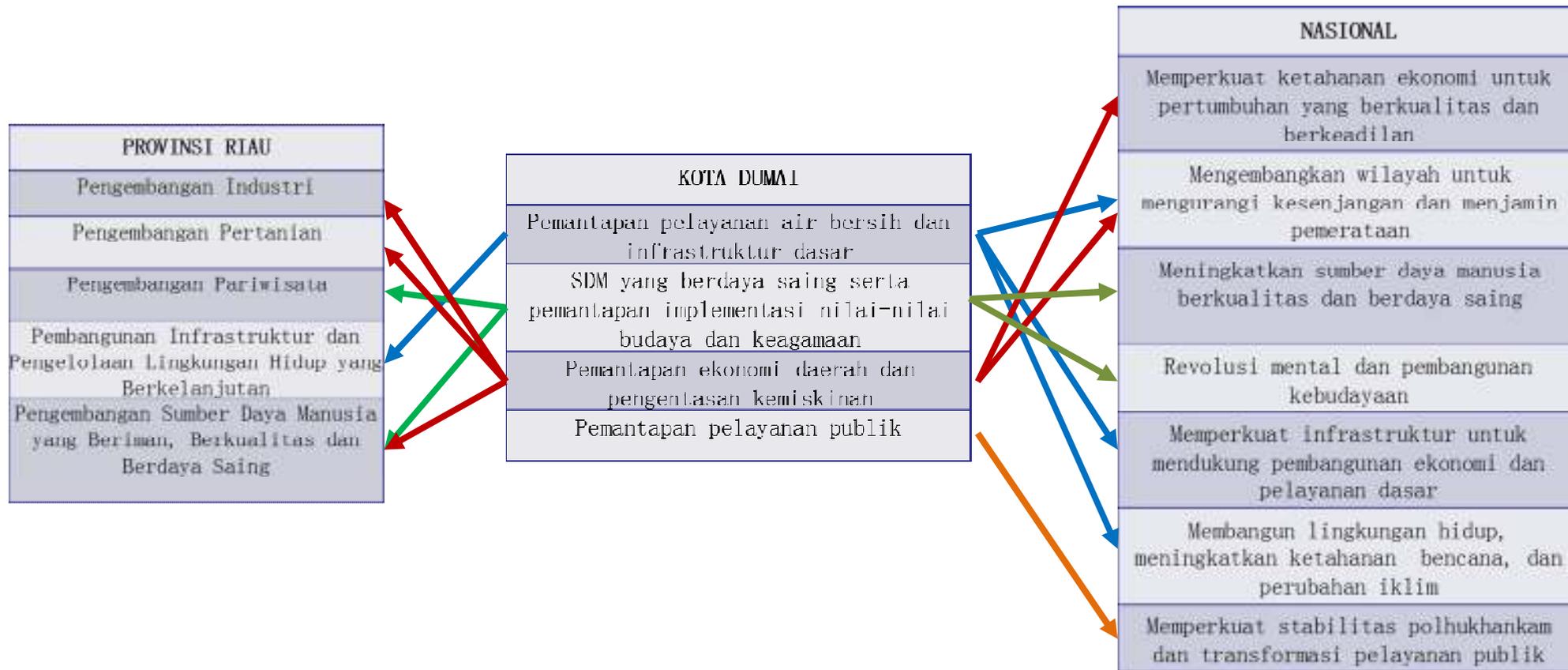
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	16230
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,55
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,94
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,9
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	457
Meningkatnya	Persentase Kualitas udara	%	85	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	kualitas lingkungan	Persentase kualitas air	%	85
2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,48
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100
	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,277083333
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,370138889
	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192.887
	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	100
Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	100	
	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan olahraga	Peringkat Olahraga ditingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ Popda)	peringkat	-
3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.47
		Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.85
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.142.556.041.695
	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,4
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,34
	Menurunnya	Persentase laju pertumbuhan	%	2,068

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	laju pertumbuhan penduduk	penduduk (LPP)		
	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98
	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	223,24
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	83,74
4. Pemantapan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2021 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021



Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2021 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021

KOTA DUMAI					PROVINSI RIAU				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipa	Sambungan Rumah	16230	Infrastruktur dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	%	0,63
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,55		Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	%	73,44
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,94			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	78,73
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,9		Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	%	94,00
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	26,30
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,60
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	457			Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,60
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%		85		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks
	Persentase kualitas air		%	85		Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	GgCO₂-e	302.901
	2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%		99,48	Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas dan	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun

KOTA DUMAI					PROVINSI RIAU					
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
nilai budaya dan keagamaan		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	Berdaya Saing		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,74	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,67	
	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,98	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100		Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Keurukunan Umat Beragama	Indeks	74,22	
	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,277083333						
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,370138889						
	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100						
		Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100						
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100						
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31						
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192.887						
	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar					Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan	%	78,00

KOTA DUMAI					PROVINSI RIAU				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	100			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan	%	10
							Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan	%	10
							Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jiwa	200,319
							Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	hari	3,57
3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.47	Pengembangan Industri	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK	milyar rupiah	510.942,99
		Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.85			Koefisien Gini	Indeks	0,284
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.142.556.041.695		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	juta rupiah	163.296,86
	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,4		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	%	6,62
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,34			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,96
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,068					

KOTA DUMAI					PROVINSI RIAU				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98	Pengembangan Pertanian	Meningkatnya Ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	54,00
	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	223,24					
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	83,74					
4. Pemantapan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP					
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B					

Jika dilihat dari Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan Provinsi tahun 2021 pada table berikut :

Tabel 4.6 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021

PRIORITAS PROVINSI RIAU TAHUN 2021	RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2021		
	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Pengembangan Industri	23	198	19.203.173.809
Pengembangan Pertanian	14	33	9.127.197.285
Pengembangan Pariwisata	7	67	13.068.406.745
Infrastruktur dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	37	476	274.346.362.827
Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	43	336	419.884.462.450

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.6 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional Tahun 2021 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2021

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaian	Sambungan Rumah	16230	Memperkuat Infrastrktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	%	92,67
	Meningkatnya infrastruktur infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,55			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	%	81,99
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,94			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	%	47,62
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,9			Rasio outstanding KPR terhadap PDB	%	2,90
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	%	73,43% akses Layak (termasuk 9,72% akses aman)
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	%	4,46
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	457			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di Perkotaan	%	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan
		Meningkatnya kualitas	Persentase Kualitas udara	%			85	Persentase rumah tangga yang menempati	%

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	lingkungan						hunian dengan akses air minum layak		
		Persentase kualitas air	%	85			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	8,40
							Volume tampungan air per kapita	m3/kapita	52,20
							Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	N/A	3
							Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang Beririgasi meningkat	Hektare	116 Ribu
							Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	N/A	20
							Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan	m3/detik	92,72
							Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010)	%	60
						Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2500 km)	Km	408
							Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar	Lokasi	2
							Panjang jaringan KA yang beroperasi	Km	6.639
						Energi Dan Ketenagalistrikan	Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	KwH	1.130
							Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Juta Ton	4,92
						Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor	%	8,80

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							TIK (rata-rata)		
							Persentase pengguna internet	%	79,20
							Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	73
					Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,20
							Indeks Kualitas Air	Indeks	55,20
							Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	59,00
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	Indeks	62,50
						Peningkatan ketahanan Bencana dan iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	%	0,10
							Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	%	0,59
							Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Menit	4,50
						Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	%	10,95 ^d
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan	%	10,93 ^d
							Persentase penurunan	%	7,79 ^d

KOTA DUMAI					NASIONAL						
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
							emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah				
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU	%	0,97 ^d		
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisirdan kelautan	%	5,60 ^d		
2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,48	Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Peningkatan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas					
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100					Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains	%	33 30 42,60
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100					Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Tahun	8,85
	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Tahun	13,40		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100		Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Angka kelahiran total (Total fertility Rate/TFR)	per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,24		
	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,27708333 3		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	217,0		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,37013888 9			Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	19,50		

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100			Angka kematian neonatal	per 1000 kelahiran hid	12,20
		Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Nilai	62,16
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,30
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1000 perempuan)	24
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192.887			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,10
	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	100			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	7,80
	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	100			Insidensi HIV	(per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21
							Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	252
							Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	345,0
						Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	9	

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21,80
							Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	80
							Persentase rumah sakit terakreditasi	%	90
						Peningkatan kualitas anak, Perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,10
							Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	%	Menurun
							Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,28
							Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,50
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,13
							Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	%	Menurun
							Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,09
					Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan Pembinaan ideologi pancasila Untuk memperkuat ketahanan Budaya bangsa dan	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	Nilai	79,06

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
						membentuk Mentalitas bangsa yang maju, Modern, dan berkarakter			
						Meningkatkan pemajuan dan Pelestarian kebudayaan untuk Memperkuat karakter dan Memperteguh jati diri bangsa, Meningkatkan kesejahteraan Rakyat, dan mempengaruhi arah Perkembangan peradaban dunia	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Nilai	49,36
						Memperkuat moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, kerukunan dan Harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	74,60
						Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan kreativitas bagi Terwujudnya masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	12

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.47	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	14,5
		Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.85			Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity)	(m ³ /Kg)
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.142.556.041.695		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	%	3,64
							Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan non Migas	%	3,35-4,21
							Kontribusi PDB pariwisata	%	4,20
							Nilai tambah ekonomi kreatif	(Rp triliun)	1.314-1.333
							Pertumbuhan investasi (PMTB)	%	6,00-7,10
							Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta orang	2,70-3,00
							Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,6
						Jumlah tenaga kerja industri	Juta orang	17,90	

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Jumlah tenaga kerja pariwisata	Juta orang	11,50
							Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta orang	20
						Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan	%	4,17 ^h
							Biaya logistik terhadap PDB	Persen	22,20
							Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index	Peringkat	36-39
	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,4		Penguatan kewirausahaan , Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional	%	3,63
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,34					
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,068			Kontribusi koperasi terhadap PDB	%	5,20
	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor Non Migas	%	5,96-7,86
							Neraca perdagangan	USD miliar	10,76-12,75
							Nilai devisa pariwisata	USD miliar	10,40-14,00
	Meningkatnya	Pendapatan perkapita	Rp. Juta	223,24		Peningkatan	Konservasi kawasan	Juta ha	24,20

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	pendapatan petani	petani				pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	kelautan		
							Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	<67
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	83,74		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	91,60
							Angka Kecukupan Energi (AKE)	kcal/hari	2.100,0
							Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kapita/hari	57,0
							Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	5,8
							Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat	%	4,8
					Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Pengentasan Kemiskinan			
						Peningkatan produktivitas Dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	%	45,43
							Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University a. Top 200 b. Top 300 c. Top 500		0 1 2

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
							Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	%	44,55	
4. Pemantapan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi demokrasi				
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP			Optimalisasi kebijakan luar negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	Indeks	95,27
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B			Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,67
						Reformasi birokrasi dan tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	%	75	
							Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	%	60	
							Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	%	35	
						Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	Indeks	0,25	
							Global Terrorism Index	Indeks	4.39	
							Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	%	>55	
							Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	Indeks	3,2	

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan Nasional tahun 2021 pada table berikut :

Tabel 4.8 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021	RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2021		
	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	41	240	35.810.449.206
Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	28	339	234.404.496.086
Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	43	336	419.884.462.450
Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	4	59	5.588.328.633
Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	13	141	38.208.190.943
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	13	106	10.135.870.358

4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2021 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2021

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2021 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota dumai tahun 2021

Tabel 4.9. Sinkronisasi SPM Tahun 2021 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-	Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
1	2	3
	hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemantapan pelayanan publik
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan

4.4. Pelaksanaan Target *Sustainable Development Goals* (SDG's) Target kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.11. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2021

No	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan	1. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan 2. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan

No	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
	<p>Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</p> <p>4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia</p> <p>5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan</p>	
2	<p>Pilar Pembangunan Ekonomi :</p> <p>1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi</p> <p>3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara</p>	<p>1. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan</p> <p>2. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar</p>
3	<p>Pilar Lingkungan Hidup :</p> <p>1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan</p>	<p>Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar</p>
4	<p>Pilar Pembangunan Hukum :</p> <p>1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan</p>	<p>Pemantapan pelayanan publik.</p>

4.5. Antisipasi Pemulihan Pembangunan Pasca Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Provinsi Riau, khususnya kota Dumai juga tidak luput dari pandemi Covid-19 ini.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah

penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di

pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan akan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan

meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Berkenaan dengan kondisi wabah Covid-19 ini, Pemerintah Pusat melali Bappenas melakukan perubahan tema pembangunan yang semula :

“Meningkatkan industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM, dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas”

dirubah menjadi :

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Adapun kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan (*recovery*) ekonomi sesuai dengan arahan Pemerintah pusat sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

2. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) *Free Trade Agreement* (FTA) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan

Berkenaan dengan perubahan tersebut, maka pemerintah Provinsi Riau juga melakukan penyesuaian tema yang semula :

”Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi”

disesuaikan menjadi :

“Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemantapan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa”

Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka pemerintah kota Dumai jugamelakukan penyesuaian tema pembangunan daerah yang semula :

“pemantapan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani”

Disesuaikan menjadi :

“Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui penguatan sektor kesehatan, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani”

Terkait penyesuaian tema tersebut, maka penekanan-penekanan yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam mengimplementasikan penyesuaian tema tetap mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Adapun penekanan tersebut dilaksanakan pada :

- 1. sektor kesehatan;**
- 2. sektor perlindungan sosial;**
- 3. sektor industri dan UMKM**
- 4. sektor perdagangan;**
- 5. sektor pariwisata;**
- 6. sektor Ketenagakerjaan;**
- 7. sektor ketahanan pangan dan pertanian**
- 8. sektor perikanan;**
- 9. dan sektor investasi.**

Penekanan terhadap kesembilan sektor tersebut dituangkan kedalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sektor berkenaan, berikut lampiran tabel 4.12 Skenario pemulihan ekonomi dan social pasca covid-19.

Tabel 4.11 Skenario Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Pasca Pandemi COVID-19 Untuk RKPD 2021

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Sektor Kesehatan (peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan)	RSUD Kota Dumai	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pembangunan Rumah Sakit (Isolasi)	RSUD Kota Dumai	Terlaksananya pembangunan RSUD	5,000,000,000
			Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	RSUD Kota Dumai	Persentase alat-alat kesehatan yang memenuhi standar	3,000,000,000
			Pengadaan obat-obatan rumah sakit	RSUD Kota Dumai	Terpenuhinya obat-obatan rumah sakit	2,000,000,000
	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	500,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan Perawat	600,000,000
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan e-kinerja	
					Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan/ diklat	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Masyarakat Kota Dumai	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	2,550,000,000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas jaringannya	Masyarakat Kota Dumai	Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas	7,375,293,047
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Masyarakat Kota Dumai	Pelatihan mutu kader posyandu	200,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
					Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk	
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas, Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan	500,000,000
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah apotek yang diawasi dan dibina	200,000,000
					Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina	
					Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina	
					Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina	
					Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio)	200,000,000
					Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV)	

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif menggunakan media cetak (buletin koran)	
					Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah pembinaan posyandu dalam upaya peningkatan strata	200,000,000
					Jumlah pelatihan dokter kecil	
					Jumlah penilaian PHBStatanan rumah tangga	
					Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBStatanan sekolah	
					Pelaksanaan lomba Posyandu teladan (posyandu)	
					Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya	
			Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan	600,000,000
					Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan	

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	
					Jumlah PNSberprestasi yang mendapatkan penghargaan	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan aplikasi SDMK	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Masyarakat Kota Dumai	Pengadaan vitamin A untuk bayi, balita dan ibu nifas	500,000,000
					Jumlah PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk	
					Jumlah balita yang mendapat vitamin	
					Jumlah PMT Bumil KEK	
					Jumlah PMT KLB gizi buruk	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Masyarakat Kota Dumai	Dokumen pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan	300,000,000
					Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan	

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
					Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	
					Dokumen pelaksanaan penanganan bencana asap yang dihasilkan	
					Dokumen pelaksanaan kesehatan olah raga	
					Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	
					Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Masyarakat Kota Dumai	Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/ AIDS	500,000,000
					Pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif	
					Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru	
					Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS	
					Pelaksanaan lavarsida massal diwilayah kerja puskesmas	

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial wabah	2,000,000,000
					Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sstem Informasi Kesehatan	200,000,000
					Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sstem Informasi Kesehatan	
					Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan	
					Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SK yang dilaksanakan	
					Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan	
					Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan	

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pembangunan puskesmas	Masyarakat Kota Dumai	Jumlah Puskesmas yang dibangun (pengembangan)	500,000,000	
			Rehap sedang/ Berat Puskesmas		Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi atau renovasi	200,000,000	
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling		Jumlah pengadaan ambulans	2,374,706,953	
			Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu		Jumlah puskesmas pembantu/ poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi	500,000,000	
Sub Total						30,000,000,000	
Pembangunan SDM (diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Pemaksimalan Manfaat Sarana Pemko Dumai ; Sarana Transportasi	Tersedianya mobil pelatihan Keterampilan Keliling atau Mobile Training Unit (MTU) 1 unit	550,000,000	

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
				Penunjang Fasilitas Rumah Terampil	Tersedianya Sarana transportasi - 1 unit mobil	285,000,000
				Pemaksimalan Manfaat Sarana Pemko Dumai; Sarana dan prasarana rumah terampil Disnakertrans	Tersedianya peralatan rumah terampil :	
					RT Dumai Timur	300,000,000
					RT Medang Kampai	250,000,000
					RT Sungai Sembilan	300,000,000
				RT Bukit Kapur	250,000,000	
				- Pencari Kerja - Anak Putus Sekolah - Tenaga Kerja dampak Covid 19	Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat :	
					RT Dumai Timur (Teknologi Informasi dan Garmen Apreal; 8 paket x 16 org)	1,190,000,000
					RT Medang Kampai (Mekanik Otomotif Roda 4 dan Mekanik Otomotif Roda 2; 8 paket x 16 org)	1,400,000,000
					RT Bukit Kapur (Mekanik Otomotif Roda 4 dan Mekanik Otomotif Roda 2; 8 paket x 16 org)	1,400,000,000
					RT Sungai Sembilan (Operator Mesin Bubut dan Rewinding Motor Listrik; 8 paket x 16 org)	1,500,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
				Sarana dan prasana rumah terampil	Terlaksananya perawatan dan perbaikan Rumah Terampil - 4 unit	150,000,000
				Pencari Kerja dan Tenaga Kerja Dampak Copid 19	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi; 2 paket x 16 org :	400,000,000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Masyarakat dan Tenaga Kerja Terdampak Copid 19	Terwujudnya kesempatan kerja dan terbentuknya wirausaha baru melalui :	
					1. Tenaga Kerja Mandiri 3 paket; @ 20 org	825,000,000
				2. Teknologi Tepat Guna 3 paket; @ 20 org	600,000,000	
				Masyarakat dan Tenaga Kerja Terdampak Copid 19	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya produktif; 3 paket x 66 org	600,000,000
Sub Total						10,000,000,000
Perluasan Program Perlindungan Sosial	Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terdampak covid - 19	Persentase (%) jumlah Masyarakat yang terdampak covid -19	300,000,000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terdampak covid-19	Persentase (%) jumlah Masyarakat yang terdampak covid -19	400,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan	Masyarakat yang terdampak covid-19	Persentase (%) jumlah Masyarakat yang terdampak covid -19	17,300,000,000
Sub Total						18,000,000,000
Pemulihan Industri dan Perdagangan; stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya; Pembangunan Infrastruktur padat karya mendukung Kawasan industri dan pariwisata	industri dan UKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Smpn Pinjam/Unit Smpn Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	7 Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan pembinaan dan pengembangan koperasi yang ada di Kota Dumai, Terlaksananya Kegiatan yang mendukung tumbuh Kembang koperasi dengan Serangkaian Memperingati HUT Koperasi	611,000,000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Smpn Pinjam/Unit Smpn Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7 Kecamatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	235,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	koperasi	Terlaksananya pelatihan perpajakan dan pengembangan bagi pengurus koperasi	713,180,400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	7 Kecamatan	Terlaksananya Pembuatan/ Penyusunan Profil Koperasi (Data Koperasi Lengkap, Buku Profil, Papan Data)Koperasi	99,500,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM yang terdampak Covid-19	Jumlah UMKM yang terdata dan terbina di 7 Kecamatan	5,772,306,566

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	UMKM yang terdampak Covid-19	Jumlah Pengembangan Usaha Bagi UMKM	2,178,461,413
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM yang terdampak Covid-19	jumlah Kesepakatan kerjasama swasta dan IKM Kota Dumai	1,405,663,910
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	IKM yang terdampak Covid-19	Jumlah Sarana Informasi Untuk Izin Usaha Industri	559,718,000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZINUSAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	IKM yang terdampak Covid-19	Adanya peningkatan Perizinan bagi pelaku industri	600,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemulihan IKM, UMKM, Koperasi yang terdampak Covid	Tersedianya fasilitasi penunjang program dan Kegiatan penanganan stimulus Covid	5,904,197,994
Sub Total						18,079,028,283

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
Akselerasi Investasi (Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.	DPMPTSP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Sosialisasi Pelayanan Terpadu	Jumlah terlaksananya sosialisasi perizinan	Jumlah terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan	400,000,000
			Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya koordinasi pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan	500,000,000
			Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya peningkatan pengawasan pengaduan perizinan dan non perizinan	Jumlah pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	300,000,000
			Survey Penerbitan Izin	Terlaksananya survei izin usaha	Jumlah izin usaha yang akan diterbitkan	595,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya informasi potensi dan peluang investasi	110,000,000
			Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terlaksananya penyusunan rancangan umum penanaman modal	Tersusunnya rencana umum Penanaman Modal	152,639,000
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terselenggaranya optimalisasi koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal	Terlaksananya fasilitas kerjasama UMKM dengan usaha besar di Kota Dumai	65,000,000
			Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM	200,000,000
			Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Tersedianya SDM yang berkompeten bidang pelayanan investasi	Jumlah SDM yang menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	50,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya pameran investasi di Kota Dumai	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/seminat/rakor/presentasi daerah	195,000,000
			Sosialisasi Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi penanaman modal	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan yang berlaku bagi investor	130,000,000
			Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terselenggaranya tanggung jawab sosial perusahaan	Terlaksananya program TJSP di Kota Dumai	110,000,000
			Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik	Terlaksananya penerapan sistem informasi layanan publik	Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	322,500,000
Sub Total						3,130,139,000
Pemulihan Industri dan Perdagangan	Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolagian		Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha	1,668,325,586
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor		Tersosialisasinya peraturan dan prosedur ekspor impor	248,242,000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan pasar lelang daerah		Terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah	360,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar		Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah yang ada	2,500,000,000
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat	3,591,701,000
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan		Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan	470,000,000
			Pendataan Pedagang Kaki Lima		Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima	150,000,000
Sub Total						8,988,268,586
Peningkatan usaha perikanan sebagai alternatif usaha bagi masyarakat terdampak	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah fasilitas kelembagaan nelayan (50 kelompok)	1,056,950,000
					jumlah fasilitas Bantuan kemitraan (50 Kelompok)	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		terpenuhinya kebutuhan pembudidaya ikan air tawar (50 pembudidaya)	1,318,050,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
Sub Total						2,375,000,000
Pemulihan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		1. Tersedianya data dan informasi harga pangan dan neraca pangan 2. Tersedianya data base dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	2,290,000,000
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah pasokan dan harga pangan	1,120,000,000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dan jenis komoditi pangan segar yang diawasi	390,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah sarana pertanian yang terkontrol penggunaannya	2,243,300,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah inseminasi buatan (IB) yang dilakukan dan terlaksananya pembinaan, pendampingan pengembangan tanaman hortikultura	1,163,000,000
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak serta seleksi calon petani calon lokasi yang tepat sasaran	340,115,000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain		Terlaksananya persiapan pelaksanaan benih/bibit ternak dan pelatihan peternak penerima bantuan	930,660,065
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Luas intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan 2. Terlaksananya pembinaan/perlindungan tanaman perkebunan	850,000,000

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Prasarana Pertanian		Terlaksananya pembangunan embung/kolam retensi dan sumur biopori	500,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terawasinya hewan dan produk hewan	450,500,000
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya jasa tenaga pengawasan dan data peredaran ternak dan produk ternak	120,400,000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban dan peredaran BAH/HBAH	210,370,000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Terkendalinya dampak bencana pertanian	2,140,000,500

RANCANGAN KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1. Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/ magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian 2. Jumlah kelompok tani yang terlatih dan dikembangkan	2,480,365,000
Sub Total						15,228,710,565
TOTALI + II + III + IV + V + VI + VII						105,801,146,434



BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2021, maka Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2021

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
Pemantapan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar (Misi 1)	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	16230 SR	Dinas PUPR
	2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%	
	1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Dinas Perkim
			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman	3%	
	2	Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	3%	
	3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana, sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman	4%	
	4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	58,94%	
	5	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	93,70%	Dinas PU PR

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
	6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan	16%	
	7	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai	17%	Dinas Perkim
	8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10 dokumen	Dinas Perhubungan
	9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	50 Unit	
	10	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal	0,68%	
	11	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2 Lokasi	
	12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai	25 Unit	
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai	2 Unit	
	14	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	Bappeda
	15	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman	16%	Dinas Perkim
	16	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
	17	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	Dinas PUPR
	18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07	
	19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	
	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah	Dinas Lingkungan hidup
	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan Dumai yang optimal	85%	
	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam	85%	
	4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%	
	5	Program peningkatan	Persentase status	85%	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
		pengendalian polusi	mutu udara di Kota Dumai		
	6	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR
SDM yang Berdayasaing serta Pemantapan Implementasi Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan. (Misi 2 dan Misi 7)	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	95%	
	3	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%	
	4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.500 orang	
			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	17.086 Judul Buku	
	1	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	95%	
	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	18	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	25	
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
			Umur Harapan Hidup	71.04	
			Persentase Balita dengan Gizi Buruk	1%	
			Persentase Balita dengan Gizi Kurang	3%	
	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	18	
			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	25	
	3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.04	
	4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
5	Program pengadaan, peningkatan	Persentase	75%		

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
		dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik		
	6	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.04	
	7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	
	8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
			Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
			Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
			Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
	9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	50%	
			Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	58%	
			Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan	
			Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan	
	10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1	
			Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%	
			Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1	
			Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55	
	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	18	
			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	25	
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
			Umur Harapan Hidup	71.04	
			Persentase Balita	1%	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
			dengan Gizi Buruk		
			Persentase Balita dengan Gizi Kurang	3%	
	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	100%	RSUD
	3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%	
	4	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%	
	5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%	
	6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%	
	7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	100%	
	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	100%	
	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	100%	
	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	-	
	4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga	100%	
	5	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%	
	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	
	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
	1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran	100%	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
			serta masyarakat dalam kepariwisataan		
	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan		Sekretariat Daerah
			Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ, DTA dan madrasah	100%	
			Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ, DTA dan madrasah	12 Bulan	
	2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama		
			Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95%	
Pemantapan Ekonomi Daerah dan pengentasan Kemiskinan (Misi 3 dan Misi 6)	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	16.225 UMKM	
	1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	30%	Dinas Sosial
	2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	30%	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	12%	
	3	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	30%	
	4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	30%	
	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
	6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	53%	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	12%		
	7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	53%	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
			Persentase PMKS yang tertangani	30%	
			Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90%	
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
	8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.575 UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	88%	
	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak		
	3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87%	
	4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87%	
	6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	91%	
	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	2.200 orang	
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen	
	2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	72 kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	271 Perusahaan	
	4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan	90 orang	
	1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	
	2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%	
	3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok	15.000	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
			Masyarakat		
			Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12	Dinas Perdagangan
			Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar	
			Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5	
	4	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan	10 Bulan	
	1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu	240 IKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM	40 IKM	
	3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	300 IKM	
			Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	300 Orang	
			Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk	
	4	Program penataan struktur industri	Jumlah fasilitasi Kawasan Industri/Ekonomi	1 Kawasan	
	5	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sarana Informasi Industri	15 Sarana	
	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional	169 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemantapan Pelayanan Publik (Misi 4)	1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	
	3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	Sekretariat Daerah
	4	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
	5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
	7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	85%	
	9	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	95%	
	10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	95%	
	11	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota Dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	12	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	13	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
	14	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
	15	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	
	16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%	
	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100%	Sekretariat Daerah
	18	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	85%	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
	20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
	21	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai	70%	
	22	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Dumai Barat
	23	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
	24	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
	25	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%	Kec. Dumai Timur
	26	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	90%	
	27	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	90%	
	28	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Bukit Kapur
	29	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
	30	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
	31	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Medang Kampai
	32	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
	33	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	85%	
	34	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	85%	Kec. Sungai Sembilan
	35	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
	36	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan	
	37	Program mengintensifkan penanganan pengaduan	Persentase Meningkatnya	85%	Kec. Dumai Kota

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
		masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik		
	38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
	39	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
	40	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Kec. Dumai Selatan
	41	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%	
	42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%	
	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55%	
	2	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pelanggaran disiplin	0.15%	OPD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian/ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	73%	
			Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	80%	
	3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	70%	
			Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	12 Dok	Inspektorat
			Level Maturitas SPIP	Level 3	
			Level Kapabilitas APIP	Level 3	
	4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	50 Orang	
	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 4	Sekretariat Daerah
			Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	
	6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Persentase belanja pendidikan (20%) - Persentase belanja kesehatan (10%) - Penetapan APBD	20% 10% Tepat Waktu	
			- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
	7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	
	8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip yang terkumpulkan		
			Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku	81%	
	9	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan	90%	
	10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		
			Jumlah SDM pengelola kearsipan	105 Orang	
	11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	
	13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%	
	14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	Sekretariat Daerah
	15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%	
	16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	100%	
	17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	Sekretariat DPRD
	18	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	Bappeda
	19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	
	20	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen	4 dokumen	

Prioritas Daerah Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5
			perencanaan bidang sosial budaya		
	21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	29%	Badan Pendapatan Daerah
	22	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	23	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	
	24	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
	25	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%	

Tabel 5.2 Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Misi 1												
1	Pemantapan pelayanan Air Bersih dan Infruktur Dasar	1.1 Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	16.230	1.1.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	16.230 SR	Dinas PUPR			
						1.1.2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%				
	1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	16	1.2.1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Dinas Perkim		
			Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondidi Baik	%	58.94			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman	3%			
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.9	1.2.2	Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	3%			
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7	1.2.3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman	4%			
			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72	1.2.4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	58.94%		Dinas PU PR	
			Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437	1.2.5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	93.70%			
							1.2.6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan		16%	Dinas Perkim
							1.2.7	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota dumai		17%	
							1.2.8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		10 dokumen	Dinas Perhubungan
							1.2.9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai		50 Unit	
							1.2.10	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal		0.68%	
							1.2.11	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		2 Lokasi	
							1.2.12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai		25 Unit	
							1.2.13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai		2 Unit	Bappeda
							1.2.14	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfatan ruang		100%	
							1.2.15	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman		16%	
				1.2.16	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup				
				1.2.17	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	Dinas PUPR				
				1.2.18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07					

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					1.2.19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	
	1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan							
		Persentase Kualitas udara	%	85	1.3.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah	
		Persentase kualitas air	%	85	1.3.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	80%	
					1.3.3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam	85%	Dinas Lingkungan hidup
					1.3.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%	
					1.3.5	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai	85%	
					1.3.6	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR
	Misi 2								
2	SDM Yang Berdayasaing Serta Pemantapan Implementasi nilai-nilai Budaya dan Keagamaan	2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan						
		Angka melek huruf	%	99.48	2.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	2.1.2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	2.1.3	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%	
					2.1.4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip
							Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.500 orang	
							Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	17.086 Judul Buku	
		2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar						
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	2.2.1	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	2.2.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	95%	
		2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar						
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333	2.3.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889					
		2.4	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat						
		Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	2.4.1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	18	Dinas Kesehatan
		Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	25	
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
							Umur Harapan Hidup	71.04	
							Persentase Balita dengan Gizi Buruk	1%	
							Persentase Balita dengan Gizi Buruk	3%	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Kurang			
					2.4.2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	18	
							Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	25	
					2.4.3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.04	
					2.4.4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
					2.4.5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	75%	
					2.4.6	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.04	
					2.4.7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	
					2.4.8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
				Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan			100%		
				Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan			100%		
				Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan			100%		
				2.4.9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	50%		
						Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	58%		
						Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%		
						Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan		
						Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan		
				2.4.10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1		
						Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%		
						Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1		
						Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55		
2.5	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	2.5.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	18	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192,887			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	25		
							Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102		
							Umur Harapan Hidup	71.04		
							Persentase Balita dengan Gizi Buruk	1%		
							Persentase Balita dengan Gizi Kurang	3%		
					2.5.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	100%		
					2.5.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%		
					2.5.4	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%	RSUD	
					2.5.5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%		
					2.5.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%		
					2.5.7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	100%		
	2.6	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat	3	2.6.1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	100%		
					2.6.2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	100%		
					2.6.3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	
					2.6.4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga	100%		
					2.6.5	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%		
					2.6.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%		
Misi 7										
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	7.1	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	100	7.1.1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
						7.1.2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						7.1.3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
						7.1.4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
						7.1.5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
						7.1.6	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	100%	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	7.2	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	100	7.2.1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan		Sekretariat Daerah	
								Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ,DTA dan madrasah	100%		
								Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ,DTA dan madrasah	12 Bulan		
						7.2.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama			
								Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95%		
Misi 3											
3	Pemantapan Ekonomi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	3.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0.400	3.1.1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							3.1.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	16.225 UMKM	
		3.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4.34	3.2.1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	30%	Dinas Sosial
							3.2.2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	30%	
								Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	12%		
							3.2.3	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	30%	
							3.2.4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	30%	
							3.2.5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
							3.2.6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	53%	
								Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	12%		
								Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	53%		
								Persentase PMKS yang tertangani	30%		
							3.2.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90%	
								Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%		

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					3.2.8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.575 UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	3.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.08	3.3.1	Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	88%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
						3.3.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak			
						3.3.3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87%		
						3.3.4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87%		
						3.3.5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87%		
						3.3.6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	91%		
	3.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.98	3.4.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	2.200 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen			
						3.4.2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	72 kasus		
						3.4.3	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	271 Perusahaan		
						3.4.4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan	90 orang		
	Misi 6										
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	6.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.47	6.1.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	
							6.1.2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%	Dinas Perdagangan
							6.1.3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat	15.000	
								Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12		
								Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar		
								Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5		
	Misi 4										
4	Pemantapan Pelayanan Publik	4.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4	4.1.1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					4.1.2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					4.1.3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	
					4.1.4	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	Sekretariat Daerah
					4.1.5	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
					4.1.6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					4.1.7	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	
					4.1.8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					4.1.9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	85%	
					4.1.10	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	95%	
					4.1.11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	95%	
					4.1.12	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					4.1.13	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
					4.1.14	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
					4.1.15	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
					4.1.16	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	
					4.1.17	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%	Sekretariat Daerah
					4.1.18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100%	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					4.1.19	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					4.1.20	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	85%	
					4.1.21	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
					4.1.22	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai	70%	
					4.1.23	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Dumai Barat
					4.1.24	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
					4.1.25	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
					4.1.26	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%	Kec. Dumai Timur
					4.1.27	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	90%	
					4.1.28	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	90%	
					4.1.29	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Bukit Kapur
					4.1.30	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
					4.1.31	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
					4.1.32	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Medang Kampai
					4.1.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
					4.1.34	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	85%	
					4.1.35	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	85%	Kec. Sungai Sembilan
					4.1.36	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
					4.1.37	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan	
					4.1.38	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	85%	Kec. Dumai Kota
					4.1.39	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
					4.1.40	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
					4.1.41	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Kec. Dumai Selatan

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					4.1.42	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%		
					4.1.43	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%		
	4.2 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP	4.2.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55%	OPD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B			Persentase pelanggaran disiplin	0.15%		
					4.2.2	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	73%		
							Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	80%		
						4.2.3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	70%	Inspektorat
							Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	12 Dok		
							Level Maturitas SPIP	Level 3		
							Level Kapabilitas APIP	Level 3		
						4.2.4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	50 Orang	
						4.2.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 4	Sekretariat Daerah
							Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%		
						4.2.6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
								- Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	
								- Penetapan APBD	Tepat Waktu	
						- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP			
					4.2.7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%		
					4.2.8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan			
							Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku	81%		
					4.2.9	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/ arsip yang tersimpan	90%		
					4.2.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku			
							Jumlah SDM pengelola kearsipan	105 Orang		
					4.2.11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					4.2.12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan	100%		

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2021	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						akurat		
					4.2.13 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%	
					4.2.14 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	Sekretariat Daerah
					4.2.15 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%	
					4.2.16 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	100%	
					4.2.17 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	Sekretariat DPRD
					4.2.18 Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	
					4.2.19 Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	
					4.2.20 Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	4 dokumen	Bappeda
					4.2.21 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	29%	Badan Pendapatan Daerah
					4.2.22 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%	
					4.2.23 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					4.2.24 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
					4.2.25 Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%	

Tabel 5.3 Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Pemerintah Kota Dumai

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar	115	450	230.195.289.759
2	SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan	70	355	409.472.702.207
3	Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan	81	266	98.863.928.151
4	Pemantapan pelayanan publik	320	1.323	273.352.088.847
	Total			1.011.884.008.964

Tabel 5.4 Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai, Prioritas Provinsi Riau Tahun 2021

PRIORITAS PROVINSI RIAU TAHUN 2021	RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2021		
	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Pengembangan Industri	23	198	19.203.173.809
Pengembangan Pertanian	14	33	9.127.197.285
Pengembangan Pariwisata	7	67	13.068.406.745
Infrastruktur dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	37	476	274.346.362.827
Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	43	336	419.884.462.450
Total			735.629.603.116

Tabel 5.5 Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai dan Prioritas Nasional Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021	RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2021		
	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	41	240	35.810.449.206
Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	28	339	234.404.496.086
Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	43	336	419.884.462.450
Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	4	59	5.588.328.633

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021	RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2021		
	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	13	141	38.208.190.943
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	13	106	10.135.870.358
Total			744.031.797.676

Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai, Rencana Kerja ini juga memuat program dan kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2021.

Program/kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021.



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri Nomor 86 tahun 2017. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	100
	Sasaran 1.1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	16230
	Sasaran 1.2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,55
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,94
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,9
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas jalan	437
	Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	85
		Persentase kualitas air	%	85

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5
2	Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,77
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,68
	Sasaran 2.1 Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,48
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	100
	Sasaran 2.2 Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	Sasaran 2.3 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889
3	Tujuan 3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04
	Sasaran 3.1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
	Sasaran 3.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192.887
4	Tujuan 4 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POFDA)	Peringkat	-
	Sasaran 4.1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POFDA)	Peringkat	-
5	Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	13.176
		PDRB per kapita	Rp. 000	121.044,95
	Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,400
	Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,34
	Sasaran 5.3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,068
	Sasaran 5.4 Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98
6	Tujuan 6 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.5
	Sasaran 6.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan public	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4
	Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
7	Tujuan 7 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan local	Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan	Rp. Milyar	2.275,14
	Sasaran 7.1 Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	223,24

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka 83,74
8	Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	% 4,42
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	% 21.47
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	% 54.85
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah 6.142.556.041.695
9	Tujuan 9	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	% 100
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	% 100
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	% 100

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2021 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 merujuk kepada penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada dokumen perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 6.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2021**

NO	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021
1	2	3	4
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,42
1.2	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	121.044,95
1.3	Indeks Gini	Indek	0,400
1.4	Tingkat Kemiskinan	%	4,34
1.5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	74,798
1.6	Angka melek huruf	%	99,48
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1	Pendidikan		
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,77
1.2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,68
1.3	Angka Partisipasi Kasar		
	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100
1.4	Angka Partisipasi Murni		
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100
2	Kesehatan		
2.1.	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	80
2.2.	ALOS Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3
2.3.	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5
2.4.	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65
2.5.	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
2.6.	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20
3	Ketenagakerjaan		
	Jumlah lembaga pelatihan keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan	Lembaga	50
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA			
1	Kebudayaan		
1.1.	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	40
ASPEK PELAYANAN UMUM			
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Pendidikan		
1.1.	Angka partisipasi kasar PAUD	%	96,73
1.2.	Pendidikan Dasar		
1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah		
	1. SD/MI	per 1.000 siswa	1 : 339
	2. SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473
1.2.2.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
	1. SD/MI	per siswa	1 : 32
	2. SLTP	per siswa	1 : 34
1.2.3.	Angka Kelulusan		
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100
	3. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/ D-IV	%	100
2	Kesehatan		
2.1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04

NO	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021
1	2	3	4
2.2.	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
2.3.	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
2.4.	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
2.5.	Persentase balita dengan gizi buruk	%	1
2.6.	Persentase balita dengan gizi kurang	%	3
2.7.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	18
2.8.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	25
2.9.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	102
2.10.	Umur Harapan Hidup	tahun	71,04
2.11.	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1
2.12.	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	%	88
2.13.	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	%	<1
2.14.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55
2.15.	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192.887
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1.	Pekerjaan Umum		
3.1.1.	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	16230
3.1.2.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,35
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	71,20
3.1.4.	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	72
3.2.	Penataan Ruang		
3.2.1.	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	87,5
3.2.2.	Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	87,5
3.2.3.	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	6,5
4	Perumahan dan Pemukiman		
4.1.	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,55
4.2.	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
4.3.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,9
4.4.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	Ruas jalan	457
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
5.1.	Cakupan patroli petugas Sat pol PP	Patroli/ Kecamatan	3
5.2.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang sigap dan tanggap	%	60
5.3.	Persentase penegakan peraturan daerah/ perwako	%	60
5.4.	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	70
5.5.	Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai	%	90
5.6.	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100
5.7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	%	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	15
5.8.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebencanaan	waktu	-
			-
			-
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (W MK)		
	Permukiman (waktu maks. 15 menit)	%	40
	Lahan (waktu maks. 30 menit)	%	30
	Hutan (waktu maks. 60 menit)	%	32
5.9.	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	%	100
6	Sosial		
6.1.	Jumlah Sarana social	Unit	21
6.2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	53
6.3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	30

NO	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021
1	2	3	4
6.4.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	90
6.5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
6.6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	12
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	Tenaga Kerja		
1.1.	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85
	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	50
1.2.	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	%	50
1.3.	Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1
1.4.	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	%	50
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	91
2.2.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	55,01
2.3.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90
2.4.	Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Nindya
2.5.	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,085
3	Pangan		
3.1.	Angka Kecukupan Protein	Gram/kapita/hari	52
4	Pertanahan		
4.1.	Jumlah konflik/permasalahan tanah di daerah Kota Dumai yang terselesaikan	Kasus	5
5	Lingkungan Hidup		
5.1.	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	Wilayah	5
5.2.	Persentase Kualitas udara	%	85
5.3.	Persentase Kualitas air	%	85
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1.	Kepemilikan KTP Elektronik	%	93,7
6.2.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95
6.3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	85
6.4.	Kepemilikan KIA	%	50
6.5.	Kepemilikan KK	%	98
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	288
7.2.	PKK aktif	%	100
7.3.	Posyandu aktif	%	100
7.4.	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	85
7.5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	85
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1.	Rasio akseptor KB	Rasio	-
8.2.	Cakupan peserta KB aktif	%	-
8.3.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,068
8.4.	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	%	64,1
8.5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)(%)	%	18,5
8.6.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan	Institusi	30

NO	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021
1	2	3	4
	informal yang melakukan pendidikan kependudukan		
9	Perhubungan		
9.1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	10.500
9.2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	74
9.3.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,68
9.4.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
9.5.	Rasio ijin trayek	Rasio	01:32.190
10	Komunikasi dan Informatika		
10.1.	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	2,81
10.2.	Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	36
		SKPD/kantor/sarana publik	-
10.3.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7
10.4.	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan ke media massa	%	100
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11.1.	Persentase koperasi yang aktif	%	93,17
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,67
12	Penanaman Modal		
12.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.0142.556.041.695
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1.	Prestasi olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-
13.2.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	62
13.3.	Jumlah klub olahraga	Klub	82
13.4.	Lapangan olahraga	Lapangan	2
13.5.	Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabor	28
14	Kebudayaan		
14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Penyelenggaraan	3
14.2.	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	100
14.3.	Persentase Benda, Stus dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30
14.4.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	100
14.5.	Persentase sekolah Pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	100
14.6.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	100
15	Perpustakaan		
15.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	22.500
15.2.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	17.086
16	Kearsipan		
16.1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100
16.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	105
LAYANAN URUSAN PILIHAN			
1	Pariwisata		
1.1.	Kunjungan Wisata		
	1. Mancanegara	Pengunjung	
	2. Domestik	Pengunjung	
1.2.	Kunjungan wisata	%	48

NO	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021
1	2	3	4
2	Pertanian		
2.1.	Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan	Rp. Milyar	2.275,14
2.2.	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	223,24
2.3.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	83,74
2.4.	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	192
2.5.	Produksi komoditi pertanian	Ton	21.266
2.6.	Produksi komoditi perkebunan	Ton	85.766
2.7.	Populasi ternak	Satuan ternak	6.400
2.8.	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	8
2.9.	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	5
2.10.	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	10
3	Kehutanan		
3.1.	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	-
4	Perdagangan		
4.1.	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.47
4.2.	Persentase pasar tradisional yang sesuai standard	%	31
4.3.	Ekspor bersih perdagangan	Rp. Milyar	2.078,05
5	Perindustrian		
5.1.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	68
5.2.	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	%	75
5.3.	Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	%	100
6	Transmigrasi		
6.1.	Persentase Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	%	50
7	Perikanan dan Kelautan		
7.1.	Produksi perikanan kelompok nelayan/ produksi perikanan tangkap	ton	-
	Produksi perikanan tangkap	ton	334,77
7.2.	Kelompok pembudidaya ikan yang dibina	kelompok	-
	Cakupan Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	40
7.3.	Kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	-
	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	37
7.4.	Nilai konsumsi ikan	Kg/ kapita/ th	31
7.5.	Produksi perikanan budidaya	ton	292,18
PENUNJANG URUSAN			
1	Perencanaan		
1.1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	30
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	3
1.3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
2	Keuangan		
2.1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	21
2.2.	Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah terhadap PAD	%	48
2.3.	Persentase peningkatan pajak daerah pada Bapenda	%	100
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	20
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	10
2.6.	Penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak tidak tepat waktu	Tepat waktu
2.7.	Opini BPK	Opini	WTP

NO	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021
1	2	3	4
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		
3.1.	Persentase pelanggaran disiplin	%	0,15
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	73
3.3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32
4	Pengawasan		
4.1.	Nilai SAKIP Kota Dumai	Nilai	B
4.2.	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4
4.3.	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	%	70
4.4.	Jumlah Dokumen yang di Review setiap Tahunnya	Dokumen	12
5	Sekretariat DPRD		
5.1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100
5.2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	ada/tidak	Ada
5.3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	ada/tidak	Ada
5.4.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
FOKUS FASILITAS WILAYAH INFRASTRUKTUR			
1	Perhubungan		
1.1.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
FOKUS IKLIM BERINVESTASI			
1	Penanaman Modal		
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,5
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
2.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	85

Dari seluruh indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2021 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 diatas, maka indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi Walikota Dumai “Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021” adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	2021
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur pada Tahun 2021</i>				
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	72,618	74,798
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,42
3	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	93,003	119,123
4	Indeks Gini	Indek	0,450	0,400
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,34

No	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	2021
1	2	3	4	5
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	6,98
7	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	2,04	7
<i>Terwujudnya masyarakat Dumai yang madani pada Tahun 2021</i>				
1	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,120	0,085
2	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indek	85	90
3	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	%	0	100
4	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	35	60
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan	2	3
6	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik social	%	100	100
7	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25	30

Dari tabel 6.3 diatas telah diuraikan bahwa untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021 dapat diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Adapun pengertian dari masing-masing indikator utama diatas adalah:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM):** Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik;
2. **Pertumbuhan Ekonomi:** Tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dari seri data PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;
3. **PDRB perkapita (ADHB):** nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penilaian dilakukan pada harga tahun berjalan. PDRB perkapitan didapat dari perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk;
4. **Indeks Gini:** ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk yang nilainya berkisar antara nol (pemerataan

sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks ini dihitung dengan rumus koefisien gini atau dengan menggunakan kurva *lorenz*;

5. **Tingkat kemiskinan:** ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat miskin dalam suatu populasi. Tingkat kemiskinan didapat dengan menghitung persentase penduduk miskin;
6. **Tingkat Pengangguran Terbuka:** ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat Kota Dumai yang tidak mempunyai pekerjaan dalam usia angkatan kerja;
7. **Persentase pembangunan rumah layak huni:** ukuran yang digunakan untuk mengetahui persentase rumah layak huni yang dibangun;
8. **Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO:** adalah persentase penurunan perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang;
9. **Indek pembangunan gender:** ukuran yang digunakan untuk menghitung kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;
10. **Jumlah masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan:** ukuran untuk melihat sejauhmana masyarakat Dumai memiliki keseimbangan hidup lahir dan bathin;
11. **Persentase Perda yang ditegakan:** ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Kota Dumai menjunjung tinggi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah;
12. **Penyelenggaraan festival seni dan budaya:** ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah;
13. **Konflik sosial:** ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masalah sosial dapat menimbulkan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
14. **Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan:** ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah.



BAB VII PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021, merupakan penjabaran pelaksanaan tahap ke-5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019, Dokumen RKPD 2021 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun Kelima Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun *Tahap Pemantapan* yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar perkotaan serta perekonomian dengan fokus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Dumai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2021. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.**

2. RKPD Kota Dumai tahun 2021 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2021, RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2021.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.
6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing

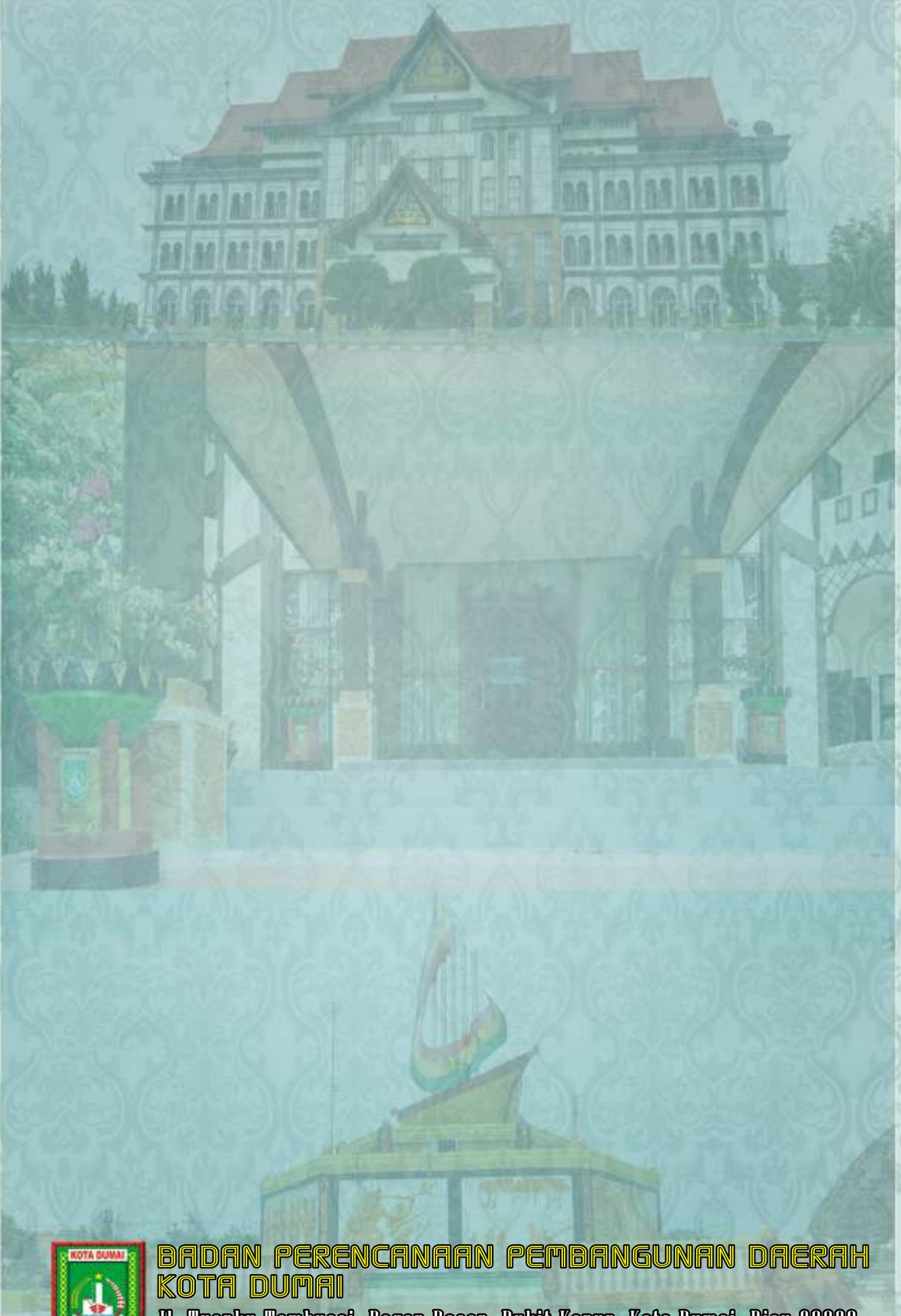
dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.

8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2021 dan penyelenggaraan Forum PD serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.
9. RKPD Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALIKOTA DUMAI



Drs. H. ZULKIFLI, AS, M.Si



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id